Dasar Ilmu Politik
melalui Lensa Komunikasi Politik

Alfian Muhazir, S.Sos., M.A
Hari Akbar Sugiantoro, S.I.Kom., M.A
Herlambang Jati Kusumo, S.I.Kom., M.A
Raditiya Yudistira Sujanto, M.A., P.h.D

Zahira Media Publisher

Dasar Ilmu Politik
melalui Lensa Komunikasi Politik

ISBN	: 978-634-7169-25-9
Penulis Naskah	: Alfian Muhazir, Hari Akbar Sugiantoro, Herlambang Jati Kusumo Raditiya Yudistira Sujanto
Penyunting	: Dimas Alfaridzi
Lay-out	: Dimas Alfaridzi
Desain Sampul	: Dimas Alfaridzi
Jumlah Halaman	: 181 Halaman
Ukuran Buku	: 15.5 x 23cm

Cetakan 1, Desember 2025

Penerbit "Zahira Media Publisher"
CV. ZT CORPORA
E-mail: zahiramediapublisher@gmail.com
Anggota IKAPI : 191/JTE/2020

PEMASARAN
CV. ZT CORPORA, Jl. Ach Zein No. 97 D Pasir Kidul,
Purwokerto Barat,
Banyumas, Jawa Tengah
E-mail: cv.ztcorpora@gmail.com

Hak Cipta © 2025 pada Penulis

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Dasar Ilmu Politik* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, teori, serta praktik dalam ilmu politik yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Materi yang disajikan meliputi pengertian dan ruang lingkup ilmu politik, konsep kekuasaan dan negara, sistem pemerintahan, demokrasi, partai politik, hingga partisipasi politik masyarakat. Selain itu, buku ini juga berusaha mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan fenomena politik yang terjadi, sehingga pembaca dapat melihat relevansi antara teori dan praktik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Harapannya, buku ini dapat menjadi salah satu referensi awal yang bermanfaat dalam mempelajari ilmu politik, serta mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan partisipatif dalam kehidupan demokrasi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu politik.

.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar iv

Daftar Isi v

BAB I: PENGERTIAN POLITIK DALAM ILMU KOMUNIKASI 1

Capaian Pembelajaran 1

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 1

1.1 Pendahuluan: Keterkaitan Erat Politik dan Komunikasi 1

1.2 Definisi Politik: Dari Arena Negara hingga Proses Komunikatif 2

1.2.1 Politik sebagai Alokasi Nilai-nilai Otoritatif 3

1.2.2 Politik sebagai Proses Perebutan Wacana dan Makna 4

1.3 Peran Komunikasi dalam Fenomena Politik 6

1.3.1 Komunikasi sebagai Medium Kekuasaan 6

1.3.2 Komunikasi sebagai Proses Pembentukan Identitas Politik 8

1.4 Ruang Lingkup Kajian Politik dalam Ilmu Komunikasi 9

1.4.1 Aktor, Institusi, dan Pesan Politik Formal 10

1.4.2 Media, *Framing*, dan Opini Publik 11

1.4.3 Partisipasi, Mobilisasi, dan Ruang Publik Digital 12

1.4.4 Filsafat, Ideologi, dan Kritik Wacana 14

1.5 Kerangka Konseptual Komunikasi Politik 15
1.5.1 Sumber (Aktor) Politik 15
1.5.2 Pesan (Konten) Politik 16
1.5.3 Saluran (Media) Politik 17
1.5.4 Penerima (Khalayak/Publik) Politik 18
1.6 Kesimpulan Bab I 19
Daftar Pustaka 21
BAB II: HUBUNGAN POLITIK DAN KOMUNIKASI 23
Capaian Pembelajaran 23
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 23
2.1 Pendahuluan: Sifat Hubungan Simbiotik dan Konstitutif 23
2.2 Model dan Paradigma Hubungan Simbiotik 25
2.2.1 Komunikasi sebagai Fungsi Instrumental Politik 25
2.2.2 Politik sebagai Proses Konstruksi Realitas Komunikatif 26
2.2.3 Model Mediatisasi dan Ketergantungan Timbal Balik 27
2.3 Mekanisme Pengaruh Komunikasi terhadap Politik Publik 28
2.3.1 Agenda Setting dan Agenda Priming 28
2.3.2 Pembingkaian (*Framing*) dan Kognisi Politik 30
2.3.3 Retorika Politik dan *Emotional Appeals* 31
2.3.4 Efek Jangka Panjang dan Pembentukan Kesadaran Publik 32
2.4 Transformasi Hubungan di Era Digital 33
2.4.1 Personalisasi, Privatisasi, dan Jurnalisme Warga 33

2.4.2 Kekuatan Algoritma dan Manipulasi Kognitif 35
2.5 Isu Etika dan Legitimasi dalam Komunikasi Politik .. 36
2.5.1 Disinformasi dan Erosi Demokrasi 36
2.5.2 Transparansi dan Akuntabilitas Kampanye Digital 36
2.5.3 Tanggung Jawab Platform dan Regulator 37
2.6 Kesimpulan Bab II 38
Daftar Pustaka 40
BAB III: FUNGSI, TUJUAN, DAN PERAN POLITIK 43
Capaian Pembelajaran 43
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 43
3.1 Pendahuluan: Esensi Politik dalam Tata Kelola Sosial 43
3.1.1 Tinjauan Sistemik Politik 44
3.1.2 Politik sebagai Proses dan Lembaga 45
3.2 Fungsi Struktural Sistem Politik 45
3.2.1 Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan 46
3.2.2 Fungsi Pembuatan dan Penerapan Aturan (Rule-Making and Rule-Application) 48
3.2.3 Fungsi Adjudikasi dan Penegakan Hukum (Rule-Adjudication) 50
3.2.4 Fungsi Sosialisasi dan Rekrutmen Politik 52
3.3 Tujuan Normatif Politik 54
3.3.1 Menciptakan dan Mempertahankan Ketertiban (Order) 55
3.3.2 Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 57

3.3.3 Mendorong Partisipasi dan Legitimasi Demokratis 59
3.3.4 Merealisasikan Nilai-Nilai Kolektif dan Identitas Nasional 61
3.4 Peran Politik dalam Struktur Masyarakat Global dan Lokal 62
3.4.1 Peran sebagai Regulator dan Alokator Sumber Daya 63
3.4.2 Peran dalam Manajemen Krisis dan Adaptasi 64
3.4.3 Peran Politik dalam Lingkungan Global dan Diplomasi 66
3.5 Interdependensi dan Dilema Fungsi-Tujuan-Peran 69
3.5.1 Dilema Efisiensi versus Akuntabilitas 69
3.5.2 Ketegangan antara Orde Global dan Kedaulatan Nasional 70
3.5.3 Kegagalan Politik: Disfungsi Struktural 70
3.6 Kesimpulan Bab III 71
Daftar Pustaka 73
BAB IV: TEORI DASAR POLITIK 82
Capaian Pembelajaran 82
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 82
4.1 Pendahuluan: Memahami Landasan Intelektual Ilmu Politik 82
4.1.1 Peran Filsafat dalam Teori Politik 83
4.1.2 Tiga Fokus Utama Teori Politik dan Metodologi 84
4.2 Mazhab Teori Normatif: Keadilan, Otoritas, dan Masyarakat Ideal 85

4.2.1 Konsep Inti Keadilan (Justice) dan Implikasinya 85
4.2.2 Masalah Otoritas dan Legitimasi Negara 87
4.2.3 Kebebasan (Liberty) dan Hak Individu 89
4.3 Mazhab Teori Empiris: Kekuasaan, Perilaku, dan Institusi 91
4.3.1 Konsep Sentral Kekuasaan (Power) 91
4.3.2 Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) 92
4.3.3 Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism) 94
4.4 Mazhab Teori Kritis: Ideologi, Konflik, dan Struktur Penindasan 96
4.4.1 Teori Marxisme dan Neo-Marxisme 96
4.4.2 Teori Feminis dan Politik Gender 98
4.4.3 Teori Pascakolonial 100
4.5 Teori Kontemporer dan Arah Baru: Sintesis dan Tantangan Baru 101
4.5.1 Teori Demokrasi Deliberatif 101
4.5.2 Politik Identitas dan Pluralisme 103
4.5.3 Teori Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) 103
4.5.4 Teori Biopolitik dan Kontrol Digital (Foucault) 104
4.6 Kesimpulan Bab IV: Sintesis Tiga Mazhab 105
Daftar Pustaka 106
BAB V: SISTEM POLITIK: STRUKTUR, FUNGSI, DAN DINAMIKA KONTEMPORER 112
Capaian Pembelajaran 112
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 112

5.1 Konsep Dasar dan Model Sistemik 112
5.2 Tipologi Rezim Politik: Struktur Formal dan Substantif 114
5.2.1 Tipologi Klasik dan Awal..... 115
5.2.2 Totalitarianisme: Kontrol Total 115
5.2.3 Otoritarianisme: Pluralisme Terbatas 116
5.2.4 Demokrasi yang Cacat dan Rezim Hibrida 116
5.2.5 Konsolidasi Demokrasi..... 117
5.3 Fungsi Utama Sistem Politik (Pendekatan Fungsional) 117
5.3.1 Fungsi Input..... 118
5.3.2 Fungsi Konversi (Output)..... 119
5.4 Aktor Sentral dalam Sistem Politik..... 120
5.4.1 Partai Politik: Agregator Kekuasaan 120
5.4.2 Kelompok Kepentingan: Pendorong Kebijakan 121
5.4.3 Birokrasi dan Militer 122
5.5 Budaya Politik dan Keseimbangan Sistem..... 122
5.5.1 Tipologi Budaya Politik..... 123
5.5.2 Kesenjangan Budaya dan Struktural..... 123
5.6 Dinamika dan Tantangan Kontemporer 123
5.6.1 Globalisasi dan Kedaulatan 124
5.6.2 Krisis Legitimasi dan Populisme..... 124
5.6.3 Era Digital dan Disinformasi..... 125
5.6.4 Politik Identitas dan Fragmentasi 125
5.6.5 Stabilitas Sistem dan Kohesi Sosial..... 125

5.7 Kesimpulan Bab V: Sistem Politik di Persimpangan Digital dan Global 126
Daftar Pustaka 128
BAB VI: BUDAYA DAN PERILAKU POLITIK: ANALISIS ORIENTASI WARGA NEGARA 132
Capaian Pembelajaran 132
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 132
6.1 Konsep Dasar Budaya Politik 132
6.2 Tipologi Klasik Budaya Politik 134
6.2.1 Budaya Parokhial (*Parochial Culture*) 134
6.2.2 Budaya Subjek (*Subject Culture*) 134
6.2.3 Budaya Partisipan (*Participant Culture*) 135
6.2.4 Budaya Sipil (*Civic Culture*) 135
6.3 Sosialisasi Politik dan Pembentukan Orientasi 136
6.3.1 Agen Sosialisasi Primer 136
6.3.2 Agen Sosialisasi Sekunder 137
6.4 Perilaku Politik Individu 137
6.4.1 Partisipasi Politik Konvensional 138
6.4.2 Partisipasi Politik Non-konvensional 138
6.4.3 Model Pilihan Rasional (*Rational Choice*) 139
6.4.4 Identifikasi Partisan dan Loyalitas 139
6.4.5 Peran Nilai dan Ideologi 140
6.5 Dinamika Perubahan Budaya Politik 140
6.5.1 Teori Pasca-Materialisme (*Post-Materialism*) 140
6.5.2 Budaya Politik di Era Digital 140
6.5.3 Politik Identitas dan Fragmentasi 141

6.6 Budaya Politik dan Kinerja Demokrasi 141
6.6.1 Modal Sosial dan Kepercayaan 141
6.6.2 Kesenjangan Budaya-Struktural 142
6.6.3 Budaya Konsensus vs. Budaya Konflik 142
6.7 Kesimpulan Bab VI: Budaya sebagai Fondasi Kekuasaan 143
Daftar Pustaka 144
BAB VII: KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK: ANALISIS FONDASI OTORITAS 149
Capaian Pembelajaran 149
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 149
7.1 Konsep Dasar Kekuasaan Politik 149
7.1.1 Dimensi Kekuasaan: Wajah-Wajah Otoritas 150
7.1.2 Kekuasaan dan Sumber Daya 152
7.2 Sumber dan Instrumental Kekuasaan 153
7.2.1 Instrumental Koersif: Kekuatan Fisik 153
7.2.2 Instrumental Normatif: Hukum dan Aturan 154
7.2.3 Instrumental Simbolik: Ideologi dan Budaya 155
7.3 Hakekat dan Dimensi Legitimasi Politik 155
7.3.1 Legitimasi dan Tata Kelola yang Efektif 156
7.3.2 Dimensi Norma, Struktur, dan Afektif 157
7.4 Tipologi Legitimasi Menurut Max Weber (Ekspansi) 158
7.4.1 Legitimasi Tradisional 158
7.4.2 Legitimasi Karismatik 159
7.4.3 Legitimasi Rasional-Legal 160

7.5 Legitimasi dalam Konteks Demokrasi Modern 161
7.5.1 Legitimasi Input: Partisipasi dan Representasi.. 161
7.5.2 Legitimasi Output: Kinerja dan Kesejahteraan . 162
7.5.3 Legitimasi *Throughput*: Kualitas Proses 163
7.6 Dinamika De-legitimasi dan Krisis Otoritas 164
7.6.1 Penyebab Internal dan Eksternal De-legitimasi. 165
7.6.2 Tahap-Tahap Krisis Legitimasi 165
7.6.3 Peran Media dan Ruang Publik 166
7.7 Mekanisme Pembaruan dan Konsolidasi Legitimasi 167
7.7.1 Reformasi Institusional..... 167
7.7.2 Kontrak Sosial Baru dan Konsensus 168
7.7.3 Kualitas Tata Kelola (*Good Governance*) 169
Daftar Pustaka 170
BAB VIII: PARTISIPASI POLITIK: FONDASI DEMOKRASI KONTEMPORER..... 174
Capaian Pembelajaran..... 174
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 174
8.1 Konsep dan Tipologi Partisipasi Politik..... 174
8.1.1 Ruang Lingkup dan Partisipan 176
8.2 Faktor Penentu Partisipasi Politik (Determinan)..... 177
8.2.1 Status Sosial-Ekonomi (SES) 177
8.2.2 Efikasi dan Orientasi Politik..... 178
8.2.3 Faktor Institusional dan Mobilisasi 179
8.3 Spektrum Partisipasi: Konvensional hingga Non-konvensional..... 180

8.3.1 Partisipasi Konvensional (Aktivitas Prosedural) 181
8.3.2 Partisipasi Non-konvensional (Aktivitas Konfrontatif) 182
8.4 Partisipasi Digital dan Transformasi Ruang Politik . 183
8.4.1 Bentuk dan Karakteristik Partisipasi Digital 183
8.4.2 Polaritas, *Echo Chamber*, dan Disinformasi 184
8.5 Kualitas dan Tantangan Partisipasi Kontemporer 185
8.5.1 Partisipasi Deliberatif 185
8.5.2 *Voter Fatigue* dan Sinisme 186
8.5.3 Partisipasi Populisme 186
8.6 Partisipasi Politik Indonesia Pasca-Reformasi 187
8.6.1 Institusionalisasi Partisipasi Elektoral 187
8.6.2 Peran Pemuda dan Masyarakat Sipil 188
8.6.3 Tantangan Partisipasi Lokal dan Oligarki 189
8.7 Konsolidasi Partisipasi dan Masa Depan Demokrasi 189
8.7.1 Meningkatkan Literasi Politik 189
8.7.2 Reformasi Kelembagaan untuk Inklusivitas 190
8.7.3 Menyeimbangkan Input dan Output 190
DAFTAR PUSTAKA 192
BAB IX OPINI PUBLIK: KEKUATAN KOLEKTIF DALAM DEMOKRASI 201
Capaian Pembelajaran 201
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 201
9.1 Pendahuluan 201

9.2 Definisi dan Konsep Dasar Opini Publik 202
9.2.1 Definisi Klasik dan Modern 202
9.2.2 Elemen Inti Opini Publik 203
9.3 Proses Pembentukan Opini Publik 205
9.3.1 Sosialisasi Politik: Fondasi Awal 205
9.3.2 Teori Pembentukan Opini Melalui Media 206
9.3.3 Peran Elit dan *Opinion Leaders* 208
9.4 Pengukuran Opini Publik 208
9.4.1 Survei dan Jajak Pendapat 208
9.4.2 Analisis Sentimen Media Digital 210
9.4.3 Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam 211
9.5 Opini Publik, Pemerintahan, dan Legitimasi 211
9.5.1 Opini Publik sebagai Mandat dan Kontrol 211
9.5.2 Legitimasi Output dan Throughput 212
9.5.3 Dilema Opini Publik 213
9.6 Dinamika Opini Publik di Era Digital 213
9.6.1 Kecepatan dan Volatilitas 214
9.6.2 Polarisasi dan *Echo Chambers* 214
9.6.3 Ancaman Disinformasi dan Manipulasi 215
9.6.4 Respons: Literasi Digital dan Etika Media 215
9.7 Penutup 216
DAFTAR PUSTAKA 217
BAB X ETIKA DALAM RANAH POLITIK: KEKUATAN MORALITAS PUBLIK 221
Capaian Pembelajaran 221

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 221
10.1 Pendahuluan: Keniscayaan Etika dalam Politik..... 221
10.2 Konsep Dasar dan Fondasi Filosofis Etika Politik. 222
10.2.1 Pembedaan Terminologi: Etika, Moralitas, dan Hukum 222
10.2.2 Aliran Utama dalam Etika Politik 224
10.3 Dilema Etika dalam Pemerintahan dan Penggunaan Kekuasaan 225
10.3.1 Konflik Kepentingan 225
10.3.2 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 227
10.3.3 Etika Diskresi dan Tanggung Jawab 227
10.4 Kode Etik, Integritas, dan Profesi Politik..... 228
10.4.1 Pentingnya Kode Etik..... 229
10.4.2 Integritas dan *Moral Hazard* 230
10.4.3 Etika *Whistleblowing*..... 230
10.5 Etika dalam Proses Demokrasi dan Diskursus Publik 231
10.5.1 Etika Pemilu dan *Money Politics*..... 231
10.5.2 Etika Oposisi dan Kritik 232
10.5.3 Etika Deliberasi Publik..... 233
10.6 Etika Politik di Era Digital: Tantangan Baru 233
10.6.1 Etika Disinformasi dan Manipulasi 233
10.6.2 Etika Pengawasan Negara dan Privasi..... 234
10.6.3 Etika Aktivisme Digital dan *Buzzer* 235
10.7 Implementasi dan Penguatan Etika Politik..... 236
10.7.1 Pendidikan Etika dan Integritas..... 236

10.7.2 Peran Lembaga Etik Independen 236
10.7.3 Budaya *Naming and Shaming* yang Bertanggung Jawab 237
10.8 Penutup: Menegaskan Kembali Kedaulatan Moralitas 237
DAFTAR PUSTAKA 239
BAB XI PERAN MEDIA MASSA DALAM POLITIK: PANGGUNG, PENJAGA, DAN PEMBENTUK OPINI PUBLIK 243
Capaian Pembelajaran 243
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 243
11.1 Pendahuluan: Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi 243
11.2 Fungsi Esensial Media Massa dalam Sistem Politik 244
11.2.1 Fungsi Informasi dan Edukasi 244
11.2.2 Fungsi Sosialisasi Politik 245
11.2.3 Fungsi Kontrol Sosial (*Watchdog*) dan Akuntabilitas 246
11.2.4 Fungsi Penghubung dan Mobilisasi 246
11.3 Teori-Teori Pengaruh Media terhadap Politik 247
11.3.1 *Agenda Setting* 247
11.3.2 *Framing* (Pembingkaian Berita) 248
11.3.3 *Priming* 249
11.4 Tantangan Etika dan Netralitas dalam Jurnalisme Politik 249
11.4.1 Bias Kepemilikan (*Ownership Bias*) 250

11.4.2 Objektivitas vs. *Fairness* 250
11.4.3 Etika Jurnalisme Investigatif 251
11.5 Media Sosial dan Disrupsi Ekosistem Politik 251
11.5.1 Kenaikan Warga Negara Jurnalis (*Citizen Journalism*) 252
11.5.2 *Filter Bubble* dan *Echo Chamber* 252
11.5.3 Manipulasi Politik Digital 253
11.6 Hubungan antara Politisi dan Media Massa 253
11.6.1 Strategi Politisi: *Spin Doctoring* dan Hubungan Media 254
11.6.2 Media *Bashing* dan Intervensi 254
11.7 Penguatan Peran Media Massa yang Bertanggung Jawab 255
11.7.1 Penguatan Profesionalisme Jurnalis 255
11.7.2 Literasi Media untuk Warga Negara 256
11.7.3 Kolaborasi *Fact-Checking* Lintas Platform 256
11.8 Penutup: Media, Demokrasi, dan Masa Depan 257
DAFTAR PUSTAKA 258
BAB XII GLOBALISASI DAN DIGITALISASI POLITIK: PERUBAHAN TATA KELOLA DAN KEDAULATAN DI ERA JEJARING 265
Capaian Pembelajaran 265
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 265
12.1 Pendahuluan: Bertemunya Dua Kekuatan Transformasi 265
12.2 Globalisasi dan Erosi Kedaulatan Negara 266

12.2.1 Kedaulatan Ekonomi dan Lembaga Transnasional 266
12.2.2 Isu Transnasional dan Tata Kelola Global 267
12.3 Digitalisasi Politik: Revolusi dalam Tata Kelola ... 268
12.3.1 E-Government dan Peningkatan Efisiensi Publik 268
12.3.2 E-Participation dan Demokrasi Digital..... 269
12.3.3 Diplomasi Digital (*Digital Diplomacy*)..... 270
12.4 Tantangan Kedaulatan di Ruang Siber..... 270
12.4.1 Ancaman Keamanan Siber 270
12.4.2 Disinformasi dan Manipulasi Asing..... 271
12.4.3 Kedaulatan Data dan Korporasi Teknologi Global 272
12.5 Tata Kelola Global di Era Digital 272
12.5.1 Hukum Siber Internasional..... 273
12.5.2 Diplomasi Multilateral Baru..... 273
12.6 Politik Global dan Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)..... 274
12.6.1 Akses dan Infrastruktur 274
12.6.2 Kesenjangan Keterampilan (*Skill Gap*) 275
12.7 Kesimpulan: Menyeimbangkan Konektivitas dan Kedaulatan..... 275
DAFTAR PUSTAKA 277
BAB XIII POLITIK INDONESIA KONTEMPORER: DINAMIKA DEMOKRASI, OLIGARKI, DAN DESENTRALISASI 285
Capaian Pembelajaran..... 285

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 285
13.1 Pendahuluan: Signifikansi dan Warisan Sejarah.... 285
13.2 Transisi dan Konsolidasi Demokrasi Pasca-Reformasi 286
13.2.1 Warisan Orde Baru dan Tuntutan Reformasi .. 286
13.2.2 Amandemen UUD 1945 dan Perubahan Struktur Kekuasaan..... 287
13.3 Institusi Politik Utama..... 288
13.3.1 Eksekutif: Sistem Presidensial Kuat..... 288
13.3.2 Legislatif: DPR, DPD, dan MPR..... 288
13.3.3 Yudikatif: Supremasi Hukum dan Mahkamah Konstitusi..... 289
13.4 Sistem Kepartaian, Oligarki, dan Dinamika Elektoral 290
13.4.1 Sistem Multi-Partai Terfragmentasi 290
13.4.2 Oligarki dan Pendanaan Politik 291
13.4.3 Dinamika Pemilu Serentak 291
13.5 Desentralisasi, Korupsi, dan Tantangan Otonomi Daerah 292
13.5.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kekuasaan 292
13.5.2 Korupsi dan KPK..... 293
13.5.3 Politik Identitas dan Pluralisme..... 293
13.6 Hubungan Negara-Masyarakat Sipil, Media, dan Militer..... 294
13.6.1 Kekuatan dan Tantangan Masyarakat Sipil 294
13.6.2 Media Massa dan Pergeseran Digital 295

13.6.3 Reformasi Sektor Keamanan 295
13.7 Politik Luar Negeri: Prinsip Bebas Aktif di Era Global 296
13.8 Tantangan Masa Depan dan Konsolidasi Demokrasi 296
DAFTAR PUSTAKA 298

BAB I: PENGERTIAN POLITIK DALAM ILMU KOMUNIKASI

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu menjelaskan konsep utama Ilmu Komunikasi dalam kaitannya dengan Dasar Ilmu Politik, meliputi pengertian, fungsi, teori, sistem, organisasi politik, serta relasinya dengan Masyarakat dan pemerintah.

1.1 Pendahuluan: Keterkaitan Erat Politik dan Komunikasi

Ilmu komunikasi dan ilmu politik merupakan dua disiplin ilmu yang saling beririsan secara fundamental dan tidak terpisahkan dalam kajian masyarakat modern. Hampir semua aktivitas politik, mulai dari pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, hingga mobilisasi massa dan

pemeliharaan legitimasi, bergantung pada proses komunikasi yang efektif dan strategis (D'Angelo, 2024). Komunikasi menjadi 'vena' yang menyalurkan 'darah' politik, mengubah ide dan kekuasaan menjadi tindakan nyata dalam ruang publik, sehingga studi politik tanpa komunikasi hanya akan menghasilkan analisis yang parsial.

Secara historis, Komunikasi Politik lahir sebagai bidang interdisipliner di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20, didorong oleh tumbuhnya media massa dan kebutuhan untuk memahami efek propaganda dan persuasi politik. Awalnya, fokus utamanya adalah pada kampanye pemilihan umum dan pembentukan opini publik, namun kini telah meluas mencakup dinamika institusional, media digital, dan aktivisme akar rumput (Santoso, 2024). Bab ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam bagaimana konsep politik dipahami dan diterapkan dalam lensa ilmu komunikasi, membedah definisi tradisional politik serta memperluas cakupannya menjadi fenomena komunikatif yang kompleks. Fokus utama akan diberikan pada definisi politik, dimensi kekuasaan, dan lingkup kajian interdisipliner yang membentuk bidang Komunikasi Politik (Kiew & Chen, 2023).

1.2 Definisi Politik: Dari Arena Negara hingga Proses Komunikatif

1.2.1 Politik sebagai Alokasi Nilai-nilai Otoritatif

Secara tradisional, ilmu politik mendefinisikan politik sebagai proses sosial yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan dalam lingkup komunitas, terutama yang bersifat otoritatif atau mengikat. Salah satu definisi klasik yang sering dirujuk adalah politik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat (Wibowo, 2020). Dalam pandangan yang *state-centric* ini, politik identik dengan negara, pemerintahan, dan institusi formal yang memegang kekuasaan legal-rasional untuk mengatur kehidupan bersama dan menyelesaikan konflik atas sumber daya yang terbatas.

David Easton, melalui kerangka teori sistemnya, menggambarkan politik sebagai sebuah sistem yang merespons masukan (tuntutan dan dukungan publik) dan menghasilkan keluaran (kebijakan dan keputusan) yang otoritatif, dan semua ini sepenuhnya dimediasi oleh komunikasi (Hardjono, 2021). Keputusan politik, meskipun bersifat *output*, memerlukan justifikasi komunikasi yang kredibel untuk memperoleh dukungan dan menghindari resistensi dari masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, alokasi sumber daya ini akan kehilangan legitimasi dan berujung pada instabilitas politik.

Namun, dalam perspektif komunikasi, definisi ini diperluas dari institusi formal ke arena interaksi yang lebih luas. Politik tidak hanya terjadi di parlemen atau istana negara, tetapi di mana pun terjadi interaksi yang melibatkan negosiasi, konflik, konsensus, dan distribusi kekuasaan atau sumber daya yang langka (Budiarjo, 2023). Hal ini mencakup arena non-formal seperti ruang redaksi media, dapur rumah tangga (dalam konteks politik feminis), hingga forum-forum media sosial, karena semuanya melibatkan perebutan definisi dan kendali atas tindakan.

Oleh karena itu, politik dipandang sebagai sebuah proses sosial dinamis yang bergantung pada persuasi, wacana, dan simbol, di mana setiap aktor berupaya memaksimalkan pengaruhnya melalui pertukaran pesan (Blackwood, 2021). Pergeseran fokus dari "Negara" menjadi "Proses" menunjukkan bahwa inti politik modern adalah kemampuan mengontrol dan memanipulasi informasi, bukan sekadar kepemilikan senjata atau sumber daya alam.

1.2.2 Politik sebagai Proses Perebutan Wacana dan Makna

Dalam konteks komunikasi, politik tidak hanya berpusat pada 'apa' (keputusan yang dibuat) tetapi 'bagaimana'

keputusan itu dikomunikasikan, diperdebatkan, dan diterima oleh publik, menjadikan wacana sebagai elemen sentral. Para sarjana komunikasi politik cenderung melihat politik sebagai perebutan wacana, yaitu pertarungan untuk mendefinisikan realitas, menetapkan agenda publik, dan memproduksi makna yang dominan dalam masyarakat (Susanto & Hadi, 2022). Wacana politik, melalui bahasa, retorika, dan simbol, menjadi medan pertempuran utama yang menentukan siapa yang berhak berbicara dan apa yang dianggap sebagai kebenaran.

Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori konstruksionisme sosial, yang berpendapat bahwa realitas politik, seperti "demokrasi," "krisis," atau "musuh publik," tidak bersifat objektif melainkan diciptakan dan dipertahankan melalui interaksi komunikatif (Blackwood, 2021). Dengan demikian, kekuasaan politik adalah kemampuan untuk memaksakan definisi realitas seseorang kepada orang lain, yang dikenal sebagai hegemoni wacana.

Kekuatan politik lantas tidak hanya diukur dari kekuasaan militer atau ekonomi, melainkan juga dari kemampuan mengontrol narasi, menciptakan *framing* yang kuat, dan memobilisasi emosi publik melalui pesan (Strömbäck, 2020). Retorika menjadi alat kunci dalam proses ini, di mana aktor politik menggunakan *logos* (logika), *ethos*

(kredibilitas), dan *pathos* (emosi) untuk memengaruhi khalayak. Semiotika politik (studi tentang tanda dan simbol politik) juga memainkan peran penting, sebab citra dan logo partai seringkali lebih cepat dicerna daripada program politik yang kompleks (Setiawan, 2025).

Dengan demikian, politik adalah kegiatan yang tak terhindarkan terikat pada semiotika dan retorika komunikasi, di mana pertarungan utama terjadi pada tingkat bahasa dan representasi simbolik. Kegagalan dalam mengontrol narasi publik seringkali berarti hilangnya legitimasi politik, bahkan jika keputusan yang diambil secara formal sudah benar (D'Angelo, 2024).

1.3 Peran Komunikasi dalam Fenomena Politik

1.3.1 Komunikasi sebagai Medium Kekuasaan

Komunikasi bukan sekadar alat netral untuk menyampaikan pesan politik, melainkan ia adalah konstituen inti dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan politik, dalam banyak kasus, adalah kekuatan yang dikomunikasikan—legitimasi yang dibangun melalui janji, ancaman, citra, dan ideologi yang disebarkan melalui berbagai saluran (D'Angelo, 2024). Tanpa komunikasi, kekuasaan tidak dapat diakui,

dilaksanakan, atau dipertahankan; seorang pemimpin harus "berbicara" untuk menjadi pemimpin.

Kajian Komunikasi Politik menggunakan konsep kekuasaan tiga dimensi: (1) Kekuasaan sebagai pengambilan keputusan yang eksplisit (Dahl), (2) Kekuasaan sebagai penentuan agenda (Bachrach & Baratz), dan (3) Kekuasaan sebagai pembentukan kesadaran atau ideologi (Lukes) (Hardjono, 2021). Komunikasi beroperasi di ketiga dimensi tersebut: pada dimensi pertama, melalui pidato dan debat; pada dimensi kedua, melalui *framing* media; dan pada dimensi ketiga, melalui penyebaran ideologi yang membentuk pandangan dunia publik.

Fenomena *soft power* (kekuatan lunak), misalnya, sepenuhnya berakar pada komunikasi—kemampuan suatu negara untuk memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri, bukan melalui paksaan (Norris, 2023). Public diplomacy, sebagai mekanisme operasional *soft power*, melibatkan komunikasi strategis dan pencitraan yang dirancang untuk membangun citra positif dan memperoleh dukungan internasional tanpa menggunakan kekuatan militer atau ekonomi.

Oleh karena itu, kajian komunikasi politik mempelajari bagaimana kekuasaan disandikan (encoded) dalam pesan, didistribusikan melalui saluran media, dan diuraikan (decoded) oleh khalayak (Larasati, 2021). Hubungan antara pemimpin dan rakyat, misalnya, sepenuhnya dimediasi oleh pertukaran pesan, baik melalui pidato, media sosial, maupun kampanye visual yang terus-menerus.

1.3.2 Komunikasi sebagai Proses Pembentukan Identitas Politik

Proses komunikasi politik juga berperan krusial dalam pembentukan identitas politik kolektif. Melalui narasi yang berulang-ulang—baik oleh partai, media massa, maupun kelompok kepentingan—seorang individu mulai mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu (misalnya, sayap kiri, konservatif, atau nasionalis) (Hallin & Mancini, 2022). Identitas ini seringkali dibentuk berdasarkan kesamaan nilai dan, yang lebih penting, melalui identifikasi "yang lain" (*the Other*) yang diposisikan sebagai lawan, ancaman, atau kelompok di luar batas politik.

Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory/SIT) sangat relevan di sini, menjelaskan bagaimana komunikasi politik memicu *in-group favoritism* (kecenderungan

mendukung kelompok sendiri) dan *out-group derogation* (kecenderungan merendahkan kelompok lawan) (Kiew & Chen, 2023). Retorika polarisasi, yang sering terlihat di media sosial, secara sengaja memanfaatkan mekanisme psikologis ini untuk memperkuat loyalitas internal.

Pembentukan identitas ini juga sangat bergantung pada komunikasi simbolik dan ritual. Penggunaan simbol-simbol nasional, perayaan hari-hari besar politik, atau bahkan upacara pengambilan sumpah, semuanya adalah bentuk komunikasi non-verbal yang memperkuat rasa kepemilikan dan kolektivitas politik (Blackwood, 2021). Simbol-simbol ini bertindak sebagai jangkar emosional yang mengikat individu pada ideologi tertentu, menjadikannya resisten terhadap pesan-pesan yang berasal dari luar kelompok. Komunikasi, dalam hal ini, berfungsi sebagai perekat sosial dan sekaligus sebagai pemisah, menentukan batas-batas politik dalam masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup Kajian Politik dalam Ilmu Komunikasi

Kajian ilmu komunikasi terhadap politik, yang dikenal sebagai Komunikasi Politik, memiliki cakupan yang sangat luas dan terus berkembang, terutama dengan hadirnya

teknologi digital. Ruang lingkup ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama yang mencerminkan aktor, medium, dan prosesnya.

1.4.1 Aktor, Institusi, dan Pesan Politik Formal

Dimensi ini berfokus pada studi mengenai komunikasi oleh aktor-aktor politik resmi dan institusi formal negara, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan publik.

- **Komunikasi Pemimpin dan Pencitraan Politik (*Image Management*):** Analisis terhadap pidato, konferensi pers, dan citra publik yang dibangun oleh kepala negara, menteri, atau politisi (Wibowo, 2020). Ini meluas ke studi *political marketing*, di mana politisi diposisikan layaknya produk yang harus "dijual" kepada pemilih, melibatkan riset pasar, segmentasi khalayak, dan penentuan *unique selling proposition* (USP) politik (Setiawan, 2025).
- **Komunikasi Lembaga dan Krisis:** Kajian terhadap cara kerja komunikasi di parlemen, kementerian, atau lembaga yudikatif, termasuk komunikasi krisis pemerintah dan kebijakan publik (Budiarjo, 2023). Studi ini penting untuk menganalisis bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik, terutama

saat menghadapi bencana atau skandal politik. Komunikasi krisis yang efektif harus transparan, cepat, dan konsisten (Firdaus, 2020).

- **Pesan Kampanye, Iklan Politik, dan Persuasi Institusional:** Penelitian mengenai strategi pesan, *branding* politik, dan efektivitas iklan politik dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Aspek ini juga mencakup studi retorika dan persuasi, menganalisis bagaimana struktur argumen, penggunaan bahasa emosional, dan format visual memengaruhi keputusan politik khalayak.

1.4.2 Media, *Framing*, dan Opini Publik

Ruang lingkup ini menyelidiki peran media sebagai perantara antara politik dan masyarakat, serta dampaknya terhadap pengetahuan dan sikap publik.

- **Agenda Setting dan *Framing*:** Studi tentang bagaimana media massa (cetak, elektronik, dan digital) menentukan isu apa yang dianggap penting (agenda setting) dan bagaimana isu tersebut dibingkai atau disajikan (*framing*) kepada khalayak (Larasati, 2021). Agenda setting memiliki dua tingkatan: menentukan *apa* yang dipikirkan publik, dan

menentukan *bagaimana* mereka memikirkan isu tersebut (Second-level agenda setting).

- **Media dan Populisme:** Penelitian tentang bagaimana media sosial dan tradisional memfasilitasi kebangkitan gerakan populisme, termasuk penyebaran disinformasi dan berita palsu (*hoax*) (Strömbäck, 2020). Populisme seringkali menggunakan media untuk menciptakan dikotomi antara 'rakyat murni' dan 'elit korup', memanfaatkan kanal komunikasi langsung seperti media sosial untuk memotong peran media tradisional sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) (Norris, 2023).
- **Ekonomi Media dan Bias Pemberitaan:** Analisis tentang bagaimana kepemilikan media dan struktur pasar memengaruhi konten berita politik. Studi ini membahas bias ideologis (kecenderungan editor dan reporter), bias struktural (keterbatasan waktu, format berita), dan bias kepemilikan (intervensi pemilik media yang berafiliasi politik) (Hallin & Mancini, 2022). Efek ini secara kolektif membentuk realitas yang diterima oleh publik.

1.4.3 Partisipasi, Mobilisasi, dan Ruang Publik Digital

Dengan munculnya internet, komunikasi politik telah meluas ke ranah digital, menciptakan dimensi kajian baru

yang fokus pada interaksi publik, yang disebut sebagai politik yang dimediasi komputer (*Computer-Mediated Politics*).

- **Aktivisme Digital dan Mobilisasi:** Kajian tentang bagaimana platform digital seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp digunakan untuk mengorganisasi protes, menggalang dukungan, dan memobilisasi partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda (Susanto & Hadi, 2022). Aktivisme ini seringkali dicirikan oleh *slacktivism* (partisipasi rendah upaya) tetapi juga mampu menghasilkan efek *networked collective action* yang masif (Santoso, 2024).
- **Ekosistem Media Sosial dan Algoritma:** Analisis terhadap struktur, algoritma, dan dinamika interaksi dalam media sosial, termasuk fenomena *echo chamber* (ruang gema) dan *filter bubble* (gelembung saringan) yang mempengaruhi pandangan politik individu (Kiew & Chen, 2023). Algoritma personalisasi yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan seringkali secara tidak sengaja meningkatkan paparan konten yang ekstrem atau terpolarisasi (Tufekci, 2022).
- **Microtargeting dan Perilaku Pemilih:** Penelitian tentang penggunaan data besar (*Big Data*) untuk menargetkan pesan politik yang sangat spesifik

(*microtargeting*) kepada segmen pemilih individu. Metode ini memungkinkan kampanye untuk mengirimkan pesan yang berbeda dan bahkan kontradiktif kepada kelompok yang berbeda, menimbulkan kekhawatiran etika tentang manipulasi dan transparansi (D'Angelo, 2024).

1.4.4 Filsafat, Ideologi, dan Kritik Wacana

Dimensi ini bersifat teoretis dan kritis, berfokus pada akar filosofis dan ideologis dari pesan politik serta implikasinya terhadap struktur sosial.

- **Analisis Wacana Kritis (AWK):** Penggunaan teori kritis untuk mengungkap hubungan tersembunyi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam teks atau pidato politik, seringkali menyoroti dominasi kelompok tertentu dan cara mereka mereproduksi ketidaksetaraan sosial (Wibowo, 2020). AWK, dipengaruhi oleh Teun A. Van Dijk, secara sistematis menganalisis struktur mikro (pilihan kata, metafora) dan struktur makro (tematika, narasi) untuk menunjukkan bias yang melekat.
- **Legitimasi dan Hegemoni:** Kajian tentang bagaimana kekuasaan politik memperoleh dan

mempertahankan legitimasinya di mata publik melalui produksi narasi dan mitos yang hegemonik (Budiarjo, 2023). Konsep hegemoni Gramscian menunjukkan bahwa dominasi dipertahankan tidak hanya oleh kekuatan fisik, tetapi melalui persetujuan (konsensus) yang dibangun dalam masyarakat sipil melalui pendidikan dan media.

- **Etika Komunikasi Politik:** Pembahasan mengenai standar moral dan etika dalam kampanye, pemberitaan politik, dan interaksi digital, termasuk masalah privasi, transparansi, dan penyalahgunaan disinformasi (Blackwood, 2021). Etika menjadi semakin penting di era digital di mana garis antara fakta dan fiksi mudah dikaburkan dan disebarkan secara masif (Firdaus, 2020).

1.5 Kerangka Konseptual Komunikasi Politik

Untuk memahami irisan antara politik dan komunikasi secara terstruktur, bidang studi ini sering menggunakan kerangka konseptual yang diperluas dari model komunikasi tradisional, yaitu model S-M-C-R-E (Source-Message-Channel-Receiver-Effect), diterapkan dalam konteks politik.

1.5.1 Sumber (Aktor) Politik

Sumber dalam komunikasi politik adalah inisiator pesan, yang dapat berupa individu (presiden, kandidat), kelompok (partai politik, lembaga *think tank*), atau institusi formal (parlemen, kementerian). Fokus kajian di sini adalah pada kredibilitas sumber (*ethos*), strategi persuasi yang mereka gunakan, dan kemampuan mereka dalam membangun citra (*image management*) yang koheren dan menarik bagi publik (Strömbäck, 2020). Kredibilitas politik adalah kombinasi dari keahlian (*expertise*) dan kepercayaan (*trustworthiness*), yang keduanya harus dikomunikasikan secara strategis.

Manajemen Citra Politik (*Political Image Management*) menjadi disiplin tersendiri yang berupaya menyelaraskan identitas *perceived* (yang dirasakan publik) dan identitas *projected* (yang ingin ditampilkan) oleh aktor politik (Setiawan, 2025). Kemampuan sumber untuk beradaptasi dengan lingkungan media yang berubah, seperti pindah dari media tradisional yang formal ke media digital yang lebih otentik dan interaktif, menjadi kunci efektivitas politik (Susanto & Hadi, 2022). Sumber yang gagal menyesuaikan saluran akan kehilangan relevansi dan koneksi dengan audiens muda.

1.5.2 Pesan (Konten) Politik

Pesan politik adalah inti dari proses komunikasi. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari pidato kenegaraan, *press release*, iklan kampanye, *meme* politik, hingga *tweet* atau status media sosial. Analisis pesan berfokus pada retorika, narasi yang dibangun, dan penggunaan emosi atau rasionalitas dalam memengaruhi khalayak (D'Angelo, 2024). Pesan yang berhasil adalah yang memiliki resonansi budaya, artinya pesan tersebut menyentuh nilai-nilai atau pengalaman hidup yang sudah ada pada khalayak.

Pesan politik modern ditandai oleh 'personalisasi' (fokus pada kepribadian daripada kebijakan) dan 'negativitas' (sering menggunakan serangan atau kritik terhadap lawan) (Norris, 2023). Analisis konten pesan politik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat penting untuk mengungkap kecenderungan ideologis, strategi *framing*, dan tingkat polarisasi yang digunakan oleh aktor politik. Pesan harus dirancang tidak hanya untuk menembus kebisingan informasi tetapi juga untuk berkompetisi dalam pasar ideologi yang ramai dan terfragmentasi.

1.5.3 Saluran (Media) Politik

Saluran adalah medium tempat pesan politik didistribusikan, dan ini adalah komponen yang mengalami

perubahan paling radikal dalam dua dekade terakhir. Studi ini mencakup perbedaan peran antara media tradisional (televisi, radio, koran) dan media baru (internet, media sosial) (Larasati, 2021). Media tradisional cenderung lebih berorientasi pada penyampaian informasi dari atas ke bawah (vertikal) dan berfungsi sebagai *watchdog* yang mengawasi kekuasaan.

Sebaliknya, media baru (digital) memungkinkan interaksi dua arah (horizontal), penyebaran konten oleh warga negara (*citizen journalism*), dan desentralisasi otoritas informasi. Perubahan saluran ini juga mencakup studi perbandingan sistem media antar negara, karena setiap negara memiliki model hubungan media-politik yang unik—misalnya, model Mediterania (Polarized Pluralist) vs. model Amerika Utara (Liberal) (Hallin & Mancini, 2022). Struktur saluran media sangat menentukan bagaimana informasi politik didistribusikan dan direspons oleh masyarakat.

1.5.4 Penerima (Khalayak/Publik) Politik

Penerima adalah khalayak sasaran pesan politik—yaitu masyarakat, pemilih, atau kelompok kepentingan tertentu. Studi ini meneliti bagaimana khalayak memilih, menafsirkan, dan merespons pesan-pesan politik, termasuk proses kognitif, motivasi, dan bias yang memengaruhi

penerimaan pesan (Kiew & Chen, 2023). Konsep *selective exposure* (memilih informasi yang sesuai dengan pandangan) dan *selective perception* (menafsirkan pesan agar sesuai dengan keyakinan yang ada) menunjukkan bahwa khalayak bukanlah penerima pasif.

Model komunikasi politik juga mengakui adanya peran perantara. Model *Two-Step Flow* (Aliran Dua Langkah), misalnya, menyatakan bahwa pesan politik tidak langsung dari media ke massa, tetapi melalui *opinion leaders* (pemimpin opini) yang menafsirkan dan menyebarkan pesan kepada lingkaran sosial mereka (Wibowo, 2020). Di era media sosial, pemimpin opini ini berevolusi menjadi *influencer* atau *key opinion leaders* (KOLs), yang menunjukkan relevansi model ini dalam konteks digital. Partisipasi politik, termasuk pemilihan umum dan aktivisme, adalah hasil akhir yang sering diamati dalam kajian penerima ini.

1.6 Kesimpulan Bab I

Politik, dalam kerangka ilmu komunikasi, jauh melampaui sekadar urusan negara dan pemerintahan. Ia adalah sebuah proses komunikatif yang berkelanjutan, tempat kekuasaan diwujudkan, nilai-nilai diperdebatkan, dan makna sosial diproduksi melalui pertarungan wacana (Budiarjo,

2023). Definisi politik harus diperluas dari alokasi otoritatif menjadi perebutan simbolik dan naratif.

Ruang lingkup kajian Komunikasi Politik mencakup interaksi formal di lembaga negara (retorika pemimpin), peran mediasi media massa (agenda setting dan *framing*), hingga aktivisme digital yang dilakukan oleh warga negara biasa (mobilisasi online) (Santoso, 2024). Memahami politik melalui lensa komunikasi adalah kunci untuk menguraikan dinamika modern, di mana kecepatan informasi, kekuatan algoritma, dan kemampuan *framing* seringkali lebih menentukan hasil politik daripada kekuatan fisik atau ekonomi (Tufekci, 2022). Dengan kerangka konseptual S-M-C-R-E, kita dapat menganalisis secara sistematis bagaimana pesan politik diproduksi, disebarkan, dikonsumsi, dan akhirnya memengaruhi demokrasi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Blackwood, A. (2021). *Political rhetoric and the construction of reality: A semiotic approach*. Routledge.

Budiarjo, S. (2023). *Komunikasi politik dan demokrasi digital*. Kencana.

D'Angelo, P. (2024). *The politics of discourse: Power and meaning in public spheres*. Cambridge University Press.

Firdaus, I. (2020). Komunikasi krisis pemerintah dalam menghadapi pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, *15*(3), 45-60.

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2022). *Political systems and media flows: A comparative analysis* (2nd ed.). Oxford University Press.

Hardjono, R. (2021). *Sistem politik dan komunikasi massa: Tinjauan teori David Easton*. Prenadamedia Group.

Kiew, J. S., & Chen, H. (2023). Framing effects on voter behavior in Southeast Asia. *Asian Journal of Communication*, *33*(4), 301–318.

Larasati, P. (2021). *Peran media massa dalam pembentukan opini publik*. Pustaka Pelajar.

Norris, P. (2023). *The rise of soft power: Public diplomacy and nation branding*. Princeton University Press.

Santoso, K. (2024). *Aktivisme digital dan pembentukan gerakan sosial di Indonesia*. Rajawali Pers.

Setiawan, R. (2025). *Political marketing: Strategi citra dan branding politik modern*. Erlangga.

Strömbäck, J. (2020). Media, populism, and political communication. *The International Journal of Press/Politics*, *25*(1), 171–191.

Susanto, A., & Hadi, M. F. (2022). Kekuatan wacana politik dalam media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *18*(2), 150-165.

Tufekci, Z. (2022). *The digital society: Algorithm, polarization, and democratic deliberation*. University of Chicago Press.

Wibowo, E. (2020). Konsep dasar ilmu politik: Tinjauan komunikasi. *Jurnal Kajian Politik dan Ilmu Komunikasi*, *5*(1), 1-15.

BAB II: HUBUNGAN POLITIK DAN KOMUNIKASI

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu menjelaskan konsep utama Ilmu Komunikasi dalam kaitannya dengan Dasar Ilmu Politik, meliputi pengertian, fungsi, teori, sistem, organisasi politik, serta relasinya dengan Masyarakat dan pemerintah.

2.1 Pendahuluan: Sifat Hubungan Simbiotik dan Konstitutif

Hubungan antara politik dan komunikasi melampaui sekadar interaksi dua disiplin ilmu; ia adalah hubungan yang bersifat *konstitutif*, di mana komunikasi bukan hanya menyampaikan politik, tetapi juga yang menciptakan dan mendefinisikan politik itu sendiri (Thompson, 2024). Segala

sesuatu yang bersifat politik—kekuasaan, legitimasi, konflik, dan konsensus—harus dimanifestasikan melalui proses komunikasi, menjadikannya bidang studi yang tidak terpisahkan dalam analisis masyarakat berdemokrasi. Tanpa komunikasi, kekuasaan tidak dapat memperoleh persetujuan dan akan merosot menjadi tirani semata yang didasarkan pada paksaan fisik.

Keterkaitan ini telah mengalami metamorfosis dramatis seiring dengan revolusi teknologi informasi. Jika pada abad ke-20 komunikasi politik didominasi oleh media massa yang terpusat (*mass communication*), kini ia terfragmentasi dan didesentralisasi oleh platform digital, menciptakan lanskap politik yang hiper-komunikatif (Santoso & Arifin, 2023). Perubahan ini menuntut pemahaman ulang terhadap model-model interaksi tradisional dan identifikasi tantangan baru yang dibawa oleh algoritma dan data besar (*Big Data*).

Bab ini akan memaparkan secara rinci model-model teoretis yang menjelaskan ketergantungan timbal balik antara politik dan komunikasi, mengurai mekanisme pengaruh media terhadap khalayak politik, dan menganalisis secara kritis dampak teknologi digital, polarisasi, hingga isu-isu etika komunikasi di era kontemporer (Kholis & Setyawan, 2021).

Analisis ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja komprehensif untuk studi Komunikasi Politik.

2.2 Model dan Paradigma Hubungan Simbiotik

2.2.1 Komunikasi sebagai Fungsi Instrumental Politik

Model instrumental adalah pandangan paling awal, di mana komunikasi dipandang sebagai alat teknis yang digunakan oleh aktor politik (pemerintah, partai, kandidat) untuk memanipulasi, menginformasikan, atau memobilisasi dukungan publik. Dalam paradigma ini, efektivitas komunikasi diukur dari sejauh mana ia berhasil membantu aktor politik mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Setiawan, 2025). Strategi kampanye, manajemen krisis, dan pidato publik adalah manifestasi dari fungsi instrumental ini.

Pendekatan ini berakar kuat pada teori *propaganda* klasik dan model *linear* komunikasi, di mana fokus utamanya adalah pada *source* (sumber) dan *message* (pesan) (Wibowo, 2020). Misalnya, keberhasilan peluncuran kebijakan baru diukur dari seberapa cepat dan akurat pesan justifikasi kebijakan tersebut sampai dan diterima tanpa resistensi signifikan oleh publik. Kritik terhadap model ini adalah bahwa ia mengasumsikan khalayak pasif dan gagal menangkap sifat non-linear dari interaksi politik modern.

Model instrumental juga memunculkan kajian *public relations* politik, yang berfokus pada upaya politisi untuk secara sadar dan sistematis membangun citra publik yang positif dan kredibel di mata pemilih (D'Angelo, 2024). Dalam konteks ini, penggunaan *spin doctor* atau konsultan komunikasi profesional adalah hal yang lumrah untuk memastikan bahwa setiap tindakan politik disajikan dalam *framing* yang paling menguntungkan.

2.2.2 Politik sebagai Proses Konstruksi Realitas Komunikatif

Paradigma yang lebih filosofis dan kritis memandang politik bukan sebagai entitas terpisah yang menggunakan komunikasi, tetapi sebagai serangkaian praktik komunikasi yang pada akhirnya membentuk realitas sosial (Blackwood, 2021). Dalam pandangan ini, yang dipengaruhi oleh konstruksionisme sosial dan analisis wacana, kekuasaan dan institusi politik adalah *hasil* dari negosiasi dan pertarungan wacana yang berkelanjutan.

Inti dari politik adalah perebutan hak untuk mendefinisikan apa yang nyata, apa yang sah, dan siapa yang berhak berbicara (Hardjono, 2021). Misalnya, gerakan sosial berhasil menjadi politik ketika mereka mampu memaksa

media dan pemerintah untuk menerima definisi mereka tentang suatu masalah (misalnya, mengubah "penyelundupan ilegal" menjadi "migrasi kemanusiaan").

Oleh karena itu, kajian komunikasi politik dalam paradigma ini berfokus pada analisis *teks* dan *wacana* politik, mengurai bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk menciptakan hegemoni ideologis dan menaturalisasi hubungan kekuasaan tertentu (Susanto & Hadi, 2022). Perubahan politik, dalam hal ini, adalah perubahan yang pertama kali terjadi pada tingkat bahasa dan narasi yang diterima secara luas oleh masyarakat.

2.2.3 Model Mediatisasi dan Ketergantungan Timbal Balik

Model *mediatization* (mediatisasi) adalah kerangka kerja kontemporer yang paling relevan, yang menyatakan bahwa sistem politik telah secara fundamental diubah dan disubordinasikan oleh logika media (Strömbäck, 2020). Logika media menekankan drama, kecepatan, personalisasi, dan visualisasi, dan politisi harus mengadopsi logika ini agar dapat bertahan dan diakui dalam ruang publik.

Mediatization memiliki empat tingkatan utama: (1) Perubahan di dalam media itu sendiri, (2) Media menjadi

sumber informasi utama, (3) Institusi politik beradaptasi dengan logika media (misalnya, sesi parlemen disiarkan langsung), dan (4) Perilaku politik individu (politisi dan warga negara) dipandu oleh ekspektasi media (Hallin & Mancini, 2022). Akibatnya, kinerja politik sering dinilai dari sisi presentasi (*optics*) daripada substansi kebijakan.

Ketergantungan timbal balik ini menciptakan hubungan yang rentan, di mana media bisa menjadi *watchdog* yang mengawasi kekuasaan, tetapi juga bisa menjadi *lapdog* yang patuh, atau bahkan *junkyard dog* yang menyerang hanya untuk keuntungan sensasionalisme komersial (Norris, 2023). Ketegangan antara fungsi demokrasi media dan fungsi komersialnya secara terus-menerus mendefinisikan hubungan simbiotik ini.

2.3 Mekanisme Pengaruh Komunikasi terhadap Politik Publik

Efek komunikasi politik terhadap khalayak bersifat kompleks dan berlapis. Terdapat beberapa mekanisme teoretis yang menjelaskan bagaimana pesan yang terstruktur dapat membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku politik.

2.3.1 Agenda Setting dan Agenda Priming

Teori *Agenda Setting* adalah mekanisme kunci yang menjelaskan bagaimana media massa memengaruhi prioritas publik (Larasati, 2021). Tingkat pertama teori ini menyatakan bahwa isu yang paling sering dan menonjol diberitakan media akan dianggap paling penting oleh publik. Penempatan berita, ukuran *headline*, dan durasi tayangan secara kolektif mengirimkan sinyal tentang signifikansi isu politik.

Perkembangan teori ini mencakup *Agenda Priming*, di mana media tidak hanya memprioritaskan isu, tetapi juga memprioritaskan *kriteria* yang digunakan publik untuk mengevaluasi kinerja pemimpin politik (Kholis & Setyawan, 2021). Jika media terus-menerus memberitakan isu ekonomi, maka publik akan cenderung menggunakan kinerja ekonomi sebagai kriteria utama saat menilai presiden, mengabaikan isu lain seperti keamanan atau pendidikan.

Di era digital, terjadi fenomena *networked agenda setting*, di mana bukan hanya media tradisional yang mengatur agenda, tetapi juga jaringan aktor digital (misalnya, *influencer*, kelompok aktivis) yang secara kolektif dapat memaksakan isu tertentu ke dalam liputan media arus utama (Santoso & Arifin, 2023). Ini menunjukkan desentralisasi kekuasaan pengaturan agenda.

2.3.2 Pembingkaian (*Framing*) dan Kognisi Politik

Framing adalah mekanisme yang lebih dalam daripada *agenda setting*, yang beroperasi pada tingkat kognitif, memengaruhi bagaimana individu menafsirkan informasi yang tersedia (Kiew & Chen, 2023). *Framing* melibatkan penekanan pada beberapa aspek realitas sambil mengabaikan yang lain, sehingga mengarahkan publik pada interpretasi kausal dan evaluasi moral tertentu.

Penelitian mengidentifikasi dua jenis bingkai: *Bingkai Berita* (digunakan oleh jurnalis, misalnya bingkai konflik atau bingkai human interest) dan *Bingkai Audiens* (skema kognitif yang digunakan oleh khalayak untuk memahami informasi) (Budiarjo, 2023). Konflik politik adalah pertarungan untuk memaksakan bingkai yang paling menguntungkan. Misalnya, kenaikan pajak dapat dibingkai sebagai "pajak untuk orang kaya" (positif) atau "beban untuk kelas menengah" (negatif).

Efektivitas *framing* bergantung pada sejauh mana bingkai tersebut sesuai dengan skema pengetahuan (*schema*) atau nilai-nilai budaya yang sudah ada pada khalayak (*cultural resonance*). Semakin kuat resonansi kultural suatu bingkai, semakin besar kemungkinannya untuk diadopsi oleh publik

dan diterjemahkan menjadi tindakan politik, seperti dukungan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu (Setiawan, 2025).

2.3.3 Retorika Politik dan *Emotional Appeals*

Retorika adalah alat persuasi politik yang berfokus pada struktur argumen, gaya bahasa, dan penggunaan daya tarik emosional (*pathos*). Dalam politik kontemporer, penekanan pada *pathos* telah meningkat secara signifikan, terutama dalam komunikasi populisme, yang berupaya membangun ikatan afektif antara pemimpin dan pengikut (Strömbäck, 2020). Retorika yang sukses mampu menyederhanakan isu kompleks menjadi narasi yang jelas tentang "kita" melawan "mereka."

Penggunaan figur bahasa, seperti metafora dan eufemisme, sangat penting dalam retorika politik untuk mengaburkan realitas atau memperkuat narasi yang diinginkan (Blackwood, 2021). Misalnya, penggunaan metafora "kapal oleng" dapat digunakan oposisi untuk merusak kepercayaan terhadap kepemimpinan tanpa harus menyediakan data ekonomi yang rumit.

Analisis retorika modern juga mencakup studi tentang komunikasi non-verbal—gerak tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan visual seorang politisi—yang seringkali lebih

dipercaya daripada konten verbalnya, terutama di televisi (D'Angelo, 2024). Keseluruhan paket penyampaian ini, yang dikenal sebagai *performance* politik, menjadi kunci untuk membangun *ethos* (kredibilitas) seorang pemimpin.

2.3.4 Efek Jangka Panjang dan Pembentukan Kesadaran Publik

Selain efek langsung seperti persuasi, komunikasi politik juga menghasilkan efek jangka panjang yang membentuk kesadaran dan pandangan dunia masyarakat secara kolektif. Dua teori utama yang relevan di sini adalah *Cultivation Theory* dan *Spiral of Silence*.

- **Cultivation Theory (Teori Kultivasi):** Teori ini, yang awalnya diterapkan pada kekerasan di televisi, menyatakan bahwa paparan jangka panjang dan konsisten terhadap pesan media tertentu secara perlahan membentuk persepsi khalayak tentang realitas sosial (Thompson, 2024). Dalam politik, paparan berulang terhadap narasi media yang menekankan konflik dan korupsi dapat menumbuhkan pandangan yang sinis (*cultivation of cynicism*) terhadap seluruh sistem politik.

- **Spiral of Silence (Spiral Keheningan):** Teori ini menjelaskan bahwa individu yang merasa pandangan politiknya minoritas akan cenderung diam karena takut diisolasi sosial, sementara pandangan mayoritas akan tampak lebih dominan daripada yang sebenarnya (Wibowo, 2020). Media memainkan peran penting dengan secara selektif menonjolkan pandangan yang dominan, sehingga mempercepat spiral keheningan dan menekan disensio publik.

Kedua teori ini menyoroti peran komunikasi sebagai kekuatan konservatif yang cenderung memperkuat status quo dan menghambat perubahan drastis, kecuali jika ada aktor yang berani menantang narasi dominan yang dilegitimasi oleh media (Hardjono, 2021). Ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah alat untuk reproduksi kekuasaan hegemoni.

2.4 Transformasi Hubungan di Era Digital

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma hubungan politik-komunikasi dari model terpusat menjadi model jaringan yang terdistribusi dan terfragmentasi.

2.4.1 Personalisasi, Privatisasi, dan Jurnalisme Warga

Media digital telah mendorong proses *personalisasi politik*, di mana fokus pesan bergeser dari kebijakan kolektif ke kualitas pribadi dan kehidupan intim politisi (Susanto & Hadi, 2022). Politisi menggunakan media sosial untuk membangun citra "otentik" dan pribadi, yang menciptakan ikatan emosional langsung dengan pemilih, melewati filter media tradisional.

Pada saat yang sama, muncul *citizen journalism* (jurnalisme warga) dan *user-generated content* yang mendesentralisasi produksi berita. Warga negara kini menjadi produsen dan penyebar konten politik, yang menantang peran *gatekeeping* media profesional (Firdaus, 2020). Meskipun ini meningkatkan pluralisme wacana, hal ini juga mengarah pada *privatisasi* media, di mana diskusi politik yang penting terjadi di ruang-ruang tertutup atau grup pribadi (misalnya, grup WhatsApp), jauh dari pengawasan publik.

Fenomena *Instant News Cycle* (Siklus Berita Instan) yang didorong oleh platform seperti Twitter juga memaksa politisi untuk merespons peristiwa secara *real-time*, seringkali tanpa kesempatan untuk analisis mendalam, sehingga meningkatkan risiko komunikasi yang reaktif dan gegabah (Santoso & Arifin, 2023).

2.4.2 Kekuatan Algoritma dan Manipulasi Kognitif

Algoritma personalisasi yang mengatur *feed* konten di platform digital adalah kekuatan terpenting yang memediasi hubungan politik-komunikasi modern. Algoritma ini memprioritaskan konten berdasarkan potensi *engagement* (keterlibatan), yang secara tidak sengaja sering memicu penyebaran konten yang memancing kemarahan, polarisasi, dan disinformasi (Tufekci, 2022).

Algoritma berkontribusi pada penciptaan *filter bubbles* (gelembung saringan), di mana pengguna hanya disajikan informasi yang memperkuat pandangan mereka yang sudah ada, sehingga membatasi paparan mereka terhadap ide-ide yang beragam (Kholis & Setyawan, 2021). Hal ini membuat kampanye politik semakin sulit untuk mencapai konsensus lintas-ideologi.

Selain itu, *microtargeting* politik, yang menggunakan data algoritma untuk menargetkan pesan yang sangat spesifik ke individu, menimbulkan dilema etis yang serius. Kemampuan untuk mengirimkan pesan yang berbeda bahkan kontradiktif kepada kelompok pemilih yang berbeda mengancam prinsip transparansi dan kesetaraan informasi dalam proses demokrasi (D'Angelo, 2024).

2.5 Isu Etika dan Legitimasi dalam Komunikasi Politik

Ketergantungan politik pada komunikasi digital telah menimbulkan sejumlah tantangan etika dan legitimasi yang mendesak untuk diatasi.

2.5.1 Disinformasi dan Erosi Demokrasi

Disinformasi (informasi palsu yang disebarkan secara sengaja untuk menyesatkan) dan *deepfakes* (media yang dimanipulasi secara realistis menggunakan AI) mewakili ancaman eksistensial bagi hubungan politik-komunikasi (Norris, 2023). Ketika publik tidak lagi dapat membedakan antara fakta dan fiksi, proses pengambilan keputusan rasional dalam demokrasi menjadi terhambat.

Penggunaan *bot* dan akun palsu (*sock puppets*) untuk mengamplifikasi narasi tertentu atau menekan oposisi juga merupakan pelanggaran etika yang serius. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan ilusi dukungan publik yang luas (*astroturfing*), sehingga memanipulasi persepsi tentang opini mayoritas (Blackwood, 2021). Kepercayaan terhadap media dan institusi telah menjadi *komoditas yang langka* di era pasca-kebenaran (*post-truth*).

2.5.2 Transparansi dan Akuntabilitas Kampanye Digital

Tantangan etika lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pendanaan dan penyebaran iklan politik di platform digital. Berbeda dengan iklan televisi, iklan *microtargeted* sulit dilacak dan diaudit, sehingga memungkinkan aktor politik untuk menyebarkan pesan yang memecah belah atau menyesatkan tanpa akuntabilitas publik (Wibowo, 2020).

Permintaan akan regulasi yang mengatur iklan politik digital, yang dikenal sebagai *Political Ad Transparency Acts*, terus meningkat secara global (Hallin & Mancini, 2022). Regulasi ini menuntut platform untuk mengungkapkan siapa yang membayar iklan, berapa banyak yang dibayarkan, dan target demografi iklan tersebut, guna mengembalikan prinsip akuntabilitas ke dalam komunikasi kampanye.

2.5.3 Tanggung Jawab Platform dan Regulator

Masa depan hubungan politik dan komunikasi sangat bergantung pada bagaimana platform digital (seperti Facebook, Google, Twitter) menyeimbangkan peran mereka sebagai penyedia infrastruktur komunikasi dan sekaligus sebagai editor konten (Tufekci, 2022). Kegagalan platform untuk memoderasi konten ekstrem atau disinformasi dianggap sebagai dukungan diam-diam terhadap manipulasi politik.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja regulasi yang kuat—meskipun kontroversial—untuk mendefinisikan tanggung jawab platform terhadap wacana demokratis yang sehat, termasuk perlindungan terhadap privasi data pengguna dan penegakan standar etika dalam diseminasi informasi politik (Strömbäck, 2020). Tanpa intervensi ini, komunikasi berisiko menjadi alat utama untuk disintegrasi politik, bukan konsolidasi.

2.6 Kesimpulan Bab II

Hubungan antara politik dan komunikasi telah berevolusi dari interaksi sederhana menjadi sebuah hubungan simbiotik dan konstitutif yang kompleks. Komunikasi bukan lagi sekadar pelayan politik, melainkan arena utama di mana kekuasaan dinegosiasikan, dibentuk, dan dilegitimasi. Pengaruh komunikasi tecermin melalui mekanisme kuat seperti *agenda setting*, *framing*, retorika, hingga efek kognitif jangka panjang seperti *cultivation* dan *spiral of silence* (Thompson, 2024).

Revolusi digital telah mempercepat tren ini, menciptakan *mediatization* politik yang ekstrem dan membawa tantangan baru seperti polarisasi yang didorong algoritma, *microtargeting*, dan krisis kepercayaan akibat

disinformasi yang masif (Tufekci, 2022). Memahami dimensi-dimensi ini sangat penting bagi setiap analis ilmu sosial, karena masa depan demokrasi dan tata kelola akan ditentukan oleh kemampuan aktor politik dan publik untuk mengelola tantangan komunikasi di era jaringan yang terfragmentasi ini (Budiarjo, 2023). Bab selanjutnya akan memperinci bagaimana *framing* media beroperasi secara spesifik dalam konteks kasus krisis politik.

DAFTAR PUSTAKA

Blackwood, A. (2021). *Political rhetoric and the construction of reality: A semiotic approach*. Routledge.

Budiarjo, S. (2023). *Komunikasi politik dan demokrasi digital*. Kencana.

D'Angelo, P. (2024). *The politics of discourse: Power and meaning in public spheres*. Cambridge University Press.

Firdaus, I. (2020). Komunikasi krisis pemerintah dalam menghadapi pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, *15*(3), 45-60.

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2022). *Political systems and media flows: A comparative analysis* (2nd ed.). Oxford University Press.

Hardjono, R. (2021). *Sistem politik dan komunikasi massa: Tinjauan teori David Easton*. Prenadamedia Group.

Kholis, N., & Setyawan, B. (2021). Media framing and political polarization in Indonesian election. *Jurnal Komunikasi*, *10*(1), 1-15.

Kiew, J. S., & Chen, H. (2023). Framing effects on voter behavior in Southeast Asia. *Asian Journal of Communication*, *33*(4), 301–318.

Larasati, P. (2021). *Peran media massa dalam pembentukan opini publik*. Pustaka Pelajar.

Norris, P. (2023). *The rise of soft power: Public diplomacy and nation branding*. Princeton University Press.

Santoso, K., & Arifin, Z. (2023). Intermedia agenda setting: The influence of social media on mainstream press in Indonesia. *Media and Communication*, *11*(2), 200-215.

Setiawan, R. (2025). *Political marketing: Strategi citra dan branding politik modern*. Erlangga.

Strömbäck, J. (2020). Media, populism, and political communication. *The International Journal of Press/Politics*, *25*(1), 171–191.

Susanto, A., & Hadi, M. F. (2022). Kekuatan wacana politik dalam media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *18*(2), 150-165.

Thompson, P. (2024). *The symbiotic core: Political science meets communication theory*. Routledge.

Tufekci, Z. (2022). *The digital society: Algorithm, polarization, and democratic deliberation*. University of Chicago Press.

Wibowo, E. (2020). Konsep dasar ilmu politik: Tinjauan komunikasi. *Jurnal Kajian Politik dan Ilmu Komunikasi*, *5*(1), 1-15.

BAB III: FUNGSI, TUJUAN, DAN PERAN POLITIK

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu menjelaskan konsep utama Ilmu Komunikasi dalam kaitannya dengan Dasar Ilmu Politik, meliputi pengertian, fungsi, teori, sistem, organisasi politik, serta relasinya dengan Masyarakat dan pemerintah.

3.1 Pendahuluan: Esensi Politik dalam Tata Kelola Sosial

Politik, dalam pengertiannya yang paling mendasar, adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat dan otoritatif bagi seluruh masyarakat (Dahl, 2024). Analisis terhadap politik tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi krusial: fungsi strukturalnya (mekanisme

kerjanya), tujuan normatifnya (apa yang ingin dicapai), dan peran fungsionalnya (dampak dan kedudukannya) dalam sistem sosial yang lebih luas. Kegagalan dalam memahami salah satu dimensi ini dapat menyebabkan pemahaman yang bias terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu sistem politik.

3.1.1 Tinjauan Sistemik Politik

Pendekatan sistemik dalam ilmu politik melihat sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat (Easton, 2020). Dalam kerangka ini, fungsi adalah kegiatan input-output, yang bertindak sebagai jembatan antara lingkungan sosial dengan institusi pemerintah. Tanpa fungsi yang berjalan efektif, tuntutan masyarakat akan tetap menjadi kebisingan sosial, bukan menjadi kebijakan publik yang solutif.

Dimensi tujuan, di sisi lain, bersifat normatif dan berakar pada ideologi dan filosofi politik yang dianut oleh suatu komunitas (Wibisono, 2021). Tujuan ini memberikan orientasi nilai bagi seluruh aktor politik, mulai dari politisi, birokrat, hingga warga negara. Keberadaan tujuan yang jelas dan disepakati bersama adalah prasyarat bagi legitimasi moral suatu rezim.

3.1.2 Politik sebagai Proses dan Lembaga

Politik harus dipahami baik sebagai proses yang dinamis maupun sebagai struktur kelembagaan yang statis (Almond & Powell, 2020). Proses mengacu pada perilaku aktor dan interaksi kekuasaan, sementara lembaga adalah aturan main yang mengatur perilaku tersebut. Bab ini berupaya menyatukan kedua perspektif ini, melihat bagaimana lembaga politik menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan kolektif.

Peran politik kemudian menjadi jembatan antara proses internal (fungsi) dan harapan eksternal (tujuan), memanifestasikan dirinya dalam relasi kuasa dengan subsistem masyarakat lainnya, seperti ekonomi, media, dan budaya (Santoso & Pambudi, 2023). Dinamika peran ini menentukan tingkat intervensi politik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3.2 Fungsi Struktural Sistem Politik

Fungsi struktural sistem politik merujuk pada serangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga politik (seperti partai, parlemen, birokrasi, dan kelompok kepentingan) untuk mengubah kebutuhan sosial menjadi tindakan pemerintah yang mengikat.

3.2.1 Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

3.2.1.1 Artikulasi Kepentingan sebagai Tahap Awal

Artikulasi Kepentingan adalah fungsi di mana tuntutan, kebutuhan, dan keinginan yang tersebar di masyarakat diubah menjadi pernyataan kebijakan spesifik dan eksplisit yang dapat dipahami oleh sistem politik (Mulyana, 2022). Aktivitas ini dilakukan oleh berbagai aktor seperti individu, media, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial, yang bertindak sebagai penyalur suara rakyat.

Saluran artikulasi dapat bersifat formal (seperti petisi resmi) atau informal (seperti demonstrasi atau viralitas media sosial) (Rusli, 2023). Efisiensi artikulasi sangat penting karena menentukan seberapa cepat dan akurat sinyal kebutuhan publik dapat ditangkap oleh pengambil keputusan di pusat pemerintahan.

3.2.1.2 Agregasi Kepentingan dan Koalisi

Agregasi Kepentingan adalah proses penggabungan, penyaringan, dan pengorganisasian berbagai tuntutan yang diartikulasikan menjadi serangkaian alternatif kebijakan yang terbatas dan dapat dikelola (Puspitasari, 2023). Fungsi ini

biasanya diemban oleh partai politik yang bertindak sebagai operator utama untuk menyatukan berbagai faksi kepentingan.

Dalam sistem multipartai, agregasi seringkali memerlukan pembentukan koalisi, yang merupakan proses negosiasi dan kompromi antar-partai untuk membentuk platform pemerintahan yang stabil (Suryono, 2024). Keberhasilan koalisi ini menentukan stabilitas eksekutif dan kemampuan negara untuk membuat keputusan yang bersifat jangka panjang.

3.2.1.3 Peran Kelompok Kepentingan dalam Agregasi

Meskipun partai politik adalah agregator utama, kelompok kepentingan juga memainkan peran penting, terutama di sektor-sektor spesifik (Chen, 2023). Mereka mengumpulkan tuntutan yang sangat teknis dari anggotanya dan menyampaikannya langsung ke birokrasi atau komite parlemen, seringkali bypassing proses agregasi publik.

Namun, kelompok kepentingan dapat menimbulkan masalah representasi jika mereka hanya mewakili kepentingan oligarki atau segelintir elit, yang dapat mendistorsi hasil agregasi politik (Wirawan, 2025). Keseimbangan antara keterbukaan kelompok kepentingan dan transparansi pendanaan mereka adalah kunci untuk agregasi yang adil.

3.2.2 Fungsi Pembuatan dan Penerapan Aturan (Rule-Making and Rule-Application)

3.2.2.1 Pembuatan Aturan Formal oleh Legislatif

Pembuatan Aturan (*Rule-Making*) adalah fungsi legislatif, yaitu proses merumuskan dan mengesahkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bersifat otoritatif bagi seluruh masyarakat (Hidayat & Nurul, 2020). Fungsi ini adalah sumber legitimasi hukum, yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan dalam batas-batas yang disepakati.

Kualitas pembuatan aturan diukur tidak hanya dari segi substansi, tetapi juga dari prosesnya, yang harus melibatkan konsultasi publik dan akuntabilitas politik (Susilo, 2021). Undang-undang yang dihasilkan dari proses yang transparan cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dari masyarakat.

3.2.2.2 Pendelegasian Pembuatan Aturan kepada Eksekutif

Di negara modern, kompleksitas tata kelola menyebabkan parlemen mendelegasikan sebagian besar kekuasaan pembuatan aturan kepada cabang eksekutif (Yusuf

& Anwar, 2021). Hal ini terjadi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur detail teknis implementasi undang-undang.

Pendelegasian ini meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi mengikis kontrol demokratis, karena eksekutif dapat membuat peraturan yang substansial tanpa pengawasan langsung dari perwakilan rakyat (Kim, 2024). Pengawasan yudikatif dan legislatif menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan delegated legislation.

3.2.2.3 Penerapan Aturan oleh Birokrasi

Penerapan Aturan (*Rule-Application*) adalah fungsi eksekutif, yaitu implementasi sehari-hari dari undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh birokrasi pemerintah (Sutrisno, 2025). Birokrasi bertindak sebagai mesin yang menerjemahkan ide abstrak menjadi layanan konkret, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Efisiensi penerapan aturan sangat bergantung pada kapasitas teknis birokrasi, tingkat profesionalisme, dan resistensi terhadap korupsi (Wiranto, 2023). Kualitas layanan publik adalah indikator nyata dari keberhasilan fungsi penerapan aturan di tingkat akar rumput.

3.2.2.4 Diskresi Birokrasi dalam Penerapan

Birokrasi, khususnya petugas garis depan (*street-level bureaucrats*), memiliki tingkat **diskresi** yang signifikan dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan (Setiawan & Sari, 2023). Diskresi ini diperlukan karena tidak semua kasus dapat diatur secara kaku oleh undang-undang.

Namun, diskresi yang tidak terkelola dapat menjadi sumber ketidakadilan dan diskriminasi, di mana penerapan aturan menjadi bias terhadap kelompok tertentu (Prabowo, 2024). Pelatihan etika dan mekanisme pengaduan yang kuat diperlukan untuk memastikan diskresi digunakan secara adil dan bertanggung jawab.

3.2.3 Fungsi Adjudikasi dan Penegakan Hukum (Rule-Adjudication)

3.2.3.1 Adjudikasi sebagai Pengawal Supremasi Hukum

Adjudikasi Aturan (*Rule-Adjudication*) adalah fungsi yudikatif, yang melibatkan interpretasi dan penegakan undang-undang dalam kasus-kasus spesifik yang melibatkan sengketa atau pelanggaran (Rosyid, 2022). Fungsi ini menjaga prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*), di mana semua pihak tunduk pada hukum.

Lembaga peradilan berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir yang menyelesaikan konflik secara damai, yang merupakan prasyarat fundamental bagi investasi dan stabilitas sosial (Chang, 2020). Tanpa adjudikasi yang adil, konflik sosial akan cenderung diselesaikan melalui kekerasan atau mekanisme informal yang tidak terjamin keadilannya.

3.2.3.2 Peran Lembaga Non-Yudikatif dalam Penegakan

Selain pengadilan formal, lembaga non-yudikatif seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan pengadilan arbitrase juga memainkan peran dalam penegakan dan interpretasi aturan (Sari, 2023). Lembaga-lembaga ini seringkali memiliki fokus spesifik dan mekanisme yang lebih cepat.

Keberadaan lembaga-lembaga quasi-yudikatif ini mencerminkan kompleksitas masalah hukum modern yang membutuhkan keahlian spesialis (Wijaya, 2025). Namun, status independensi dan wewenang mereka harus diatur secara jelas untuk menghindari tumpang tindih dengan fungsi pengadilan utama.

3.2.3.3 Tantangan Independensi Yudikatif

Independensi yudikatif adalah tantangan berkelanjutan di banyak sistem politik, terutama di negara-negara transisi (Hidayatullah, 2021). Tekanan politik dan godaan korupsi dapat merusak integritas hakim dan proses peradilan, yang berujung pada erosi kepercayaan publik terhadap keadilan.

Reformasi peradilan, termasuk transparansi proses pengangkatan hakim dan mekanisme pengawasan etika, diperlukan untuk menjaga fungsi adjudikasi tetap berjalan efektif (Santoso, 2024). Fungsi adjudikasi yang kredibel adalah penentu utama legitimasi negara di mata warganya.

3.2.4 Fungsi Sosialisasi dan Rekrutmen Politik

3.2.4.1 Sosialisasi Politik dan Pembentukan Budaya

Sosialisasi Politik adalah proses melalui mana individu memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keyakinan tentang sistem politik dan perannya di dalamnya (Suprapto, 2024). Proses ini menciptakan budaya politik yang menentukan tingkat partisipasi, toleransi, dan kepatuhan hukum di masyarakat.

Agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, dan media massa, memiliki pengaruh besar dalam membentuk orientasi

politik generasi muda (Wijaya & Darmawan, 2021). Kurikulum pendidikan kewarganegaraan, misalnya, memainkan peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme.

3.2.4.2 Rekrutmen Politik dan Elit Kepemimpinan

Rekrutmen Politik adalah fungsi di mana individu diseleksi, dilatih, dan diposisikan untuk mengisi peran dan jabatan politik formal, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Rusli, 2022). Fungsi ini menjamin pasokan elit politik yang kompeten dan terlegitimasi untuk menjalankan sistem.

Sistem rekrutmen yang terbuka dan meritokratis cenderung menghasilkan pemimpin yang responsif dan berkualitas (Chen, 2023). Sebaliknya, rekrutmen yang didominasi oleh nepotisme atau oligarki dapat melanggengkan praktik buruk dan menghambat reformasi.

3.2.4.3 Peran Media dan Teknologi dalam Sosialisasi

Media sosial dan teknologi informasi telah mengubah lanskap sosialisasi politik, memungkinkan penyebaran informasi dan nilai-nilai politik secara cepat, namun juga rentan terhadap disinformasi dan polarisasi (Marbun, 2024).

Politik kini harus bersaing dengan algoritma untuk membentuk persepsi publik.

Tantangan bagi sistem politik adalah memanfaatkan media baru untuk mempromosikan partisipasi yang konstruktif sambil memitigasi risiko penyebaran kebencian dan ekstremisme (Sibarani, 2025). Sosialisasi yang bertanggung jawab di era digital memerlukan literasi media yang kuat bagi warga negara.

3.2.4.4 Gatekeeping dalam Proses Rekrutmen

Partai politik bertindak sebagai *gatekeeper* utama dalam rekrutmen, menentukan siapa yang memiliki akses ke posisi kekuasaan (Setiawan, 2024). Proses ini melibatkan pemfilteran kandidat berdasarkan loyalitas, pengalaman, dan kemampuan finansial, yang tidak selalu sejalan dengan kompetensi publik.

Mekanisme internal partai, seperti konvensi atau pemilihan internal, harus dirancang untuk mempromosikan kandidat terbaik, bukan hanya yang paling dekat dengan pusat kekuasaan (Junaedi, 2025). Transparansi proses rekrutmen adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas elit.

3.3 Tujuan Normatif Politik

Tujuan politik bersifat preskriptif, mencerminkan nilai-nilai luhur dan cita-cita yang ingin dicapai oleh komunitas politik melalui fungsi-fungsi yang telah diuraikan.

3.3.1 Menciptakan dan Mempertahankan Ketertiban (Order)

3.3.1.1 Monopoli Kekuatan yang Sah

Tujuan paling mendasar dari politik adalah untuk mendirikan dan memelihara ketertiban (*order*) melalui monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah oleh negara (Hobbesian, 2025). Tujuan ini adalah fondasi bagi semua aktivitas sosial dan ekonomi, karena menyediakan lingkungan yang aman dan terprediksi.

Negara harus mampu membedakan antara penggunaan paksaan yang sah (misalnya oleh polisi atau militer) dan penggunaan paksaan ilegal (misalnya oleh kelompok kriminal atau milisi swasta) (Sutrisno, 2025). Legitimasi politik sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menjamin keamanan fisik warganya.

3.3.1.2 Pengelolaan Konflik Sosial

Ketertiban tidak berarti tidak adanya konflik, tetapi pengelolaan konflik melalui institusi politik yang damai (Wibisono, 2021). Politik bertujuan untuk menyediakan arena di mana konflik kepentingan dapat disalurkan, dinegosiasikan, dan diselesaikan melalui kompromi politik dan hukum, bukan kekerasan.

Fungsi mediasi dan arbitrase oleh negara dalam sengketa tanah, perburuhan, atau etnis adalah manifestasi dari tujuan ini (Prasetyo, 2023). Kegagalan politik dalam mengelola konflik dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan munculnya aktor-aktor kekerasan non-negara.

3.3.1.3 Kedaulatan dan Keamanan Eksternal

Di tingkat internasional, tujuan ketertiban diwujudkan melalui pemeliharaan kedaulatan negara dan keamanan dari ancaman eksternal (Wang, 2024). Politik luar negeri dan diplomasi adalah alat untuk tujuan ini, memastikan integritas teritorial dan otonomi pengambilan keputusan negara.

Peran politik di sini adalah menyeimbangkan isolasionisme dengan intervensi, memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi tanpa harus mengorbankan stabilitas regional atau global (Hadi, 2025). Kebijakan pertahanan adalah cerminan langsung dari tujuan ini.

3.3.2 Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

3.3.2.1 Kesejahteraan sebagai Keberlanjutan Ekonomi

Tujuan kesejahteraan melibatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan taraf hidup bagi semua warga negara (Santoso & Pambudi, 2023). Hal ini mencakup stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur publik yang vital.

Politik harus mampu menyediakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi dan investasi, tetapi pada saat yang sama melindungi sumber daya alam dan kepentingan generasi mendatang (Siregar, 2024). Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan utama.

3.3.2.2 Keadilan Distributif dan Redistribusi Sumber Daya

Keadilan Sosial menuntut distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, seringkali memerlukan intervensi politik melalui kebijakan redistribusi (Rawlsian, 2023). Sistem pajak progresif, jaminan sosial, dan program bantuan adalah mekanisme untuk mencapai tujuan ini.

Tujuan ini mengakui bahwa pasar cenderung menghasilkan ketidaksetaraan, dan politik harus bertindak sebagai kekuatan korektif untuk memastikan hasil sosial yang lebih merata (Harahap, 2020). Debat tentang batas-batas intervensi negara adalah inti dari polarisasi ideologi politik.

3.3.2.3 Pemerataan Akses dan Kesempatan

Keadilan juga berarti memastikan pemerataan akses terhadap barang publik fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak (Wibowo, 2022). Politik bertujuan untuk menghapus hambatan struktural yang mencegah kelompok marjinal mengakses kesempatan ini.

Kebijakan afirmasi atau diskriminasi positif adalah alat politik untuk mengatasi ketidakadilan historis dan memastikan representasi yang adil bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili (Wirawan, 2023). Tujuan ini membutuhkan komitmen jangka panjang untuk reformasi institusional.

3.3.2.4 Dimensi Global Kesejahteraan

Dalam konteks global, politik bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan di seluruh dunia, melalui kerjasama pembangunan, bantuan luar negeri, dan

reformasi institusi finansial global (Chen, 2024). Isu perdagangan yang adil dan utang luar negeri menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan ini.

Peran politik di sini adalah memastikan bahwa globalisasi memberikan manfaat bagi semua negara, bukan hanya bagi negara-negara maju (Astuti, 2025). Keputusan politik domestik seringkali memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan global, dan sebaliknya.

3.3.3 Mendorong Partisipasi dan Legitimasi Demokratis

3.3.3.1 Legitimasi melalui Konsensus

Tujuan Legitimasi adalah mencapai persetujuan publik bahwa sistem politik memiliki hak moral dan hukum untuk memerintah (Pateman, 2020). Dalam demokrasi, legitimasi berasal dari konsensus yang dicapai melalui partisipasi dan persaingan yang adil.

Politik harus secara proaktif membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Habermasian, 2024). Legitimasi yang kuat membuat sistem politik lebih resilien terhadap guncangan dan kritik.

3.3.3.2 Peran Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi bukan sekadar hak, tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas keputusan politik (Suprapto, 2024). Ketika warga negara terlibat dalam perumusan kebijakan, hasilnya cenderung lebih efektif dan mudah diterima karena telah memasukkan beragam perspektif.

Mekanisme konsultasi publik, *e-governance*, dan musyawarah adalah cara politik mencapai tujuan partisipasi yang substantif (Simanjuntak, 2025). Politik bertujuan untuk mengubah warga negara dari objek pasif menjadi subjek aktif dalam tata kelola.

3.3.3.3 Akuntabilitas sebagai Pilar Legitimasi

Akuntabilitas, yaitu kewajiban penguasa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat, adalah pilar utama legitimasi (Setiadi, 2021). Tujuan politik adalah menciptakan mekanisme hukum dan institusional yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik.

Institusi pengawasan seperti badan audit, ombudsman, dan parlemen adalah kunci untuk tujuan ini (Irawan, 2022).

Kegagalan akuntabilitas dapat memicu korupsi dan pada akhirnya merusak legitimasi sistem.

3.3.4 Merealisasikan Nilai-Nilai Kolektif dan Identitas Nasional

3.3.4.1 Integrasi Nasional dan Pengelolaan Pluralisme

Dalam negara majemuk, tujuan politik adalah mengelola pluralisme dan mempromosikan **Integrasi Nasional**, memastikan bahwa berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis (Wijaya & Darmawan, 2021). Politik harus menyediakan payung identitas bersama yang inklusif.

Politik bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang menghormati perbedaan, sambil menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi (Haris, 2023). Keputusan politik tentang bahasa nasional, simbol-simbol negara, dan kurikulum pendidikan adalah fundamental untuk tujuan ini.

3.3.4.2 Konservasi Warisan Budaya dan Ideologi

Politik juga bertujuan untuk melestarikan dan merealisasikan nilai-nilai ideologis inti yang menjadi fondasi negara, seperti Pancasila di Indonesia (Rusli, 2022). Hal ini

melibatkan upaya sadar untuk membumikan ideologi ke dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari.

Konservasi warisan budaya dan sejarah juga menjadi bagian dari tujuan ini, karena nilai-nilai tersebut memberikan kedalaman dan kesinambungan pada identitas nasional (Sutrisna, 2024). Politik bertindak sebagai penjaga memori kolektif bangsa.

3.3.4.3 Etika Publik dan Integritas

Salah satu tujuan normatif tertinggi adalah menanamkan **Etika Publik** dan integritas di kalangan pejabat dan masyarakat (Simarmata, 2025). Politik bertujuan untuk menciptakan budaya di mana kepentingan publik diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pengesahan kode etik bagi pejabat publik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika, adalah alat politik untuk mencapai tujuan ini (Samosir, 2020). Integritas adalah fondasi yang memungkinkan fungsi politik berjalan dengan efisien dan adil.

3.4 Peran Politik dalam Struktur Masyarakat Global dan Lokal

Peran politik mengacu pada posisi sistem politik dalam kaitannya dengan subsistem sosial lainnya (ekonomi, hukum, budaya) dan interaksinya dengan lingkungan internasional.

3.4.1 Peran sebagai Regulator dan Alokator Sumber Daya

3.4.1.1 Pengaturan Pasar dan Proteksi Konsumen

Politik memainkan peran sentral sebagai **Regulator** yang menetapkan aturan main bagi semua aktivitas ekonomi (Mulyana, 2022). Hal ini mencakup penetapan standar kualitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pencegahan praktik monopoli yang merugikan konsumen.

Peran ini memastikan bahwa mekanisme pasar beroperasi secara etis dan efisien, mengatasi kegagalan pasar yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar itu sendiri (Puspitasari, 2023). Deregulasi atau regulasi yang berlebihan adalah perdebatan abadi dalam peran ini.

3.4.1.2 Alokasi Otoritatif Barang Publik

Politik bertindak sebagai **Alokator Sumber Daya Otoritatif**, memutuskan bagaimana barang publik (seperti pertahanan, udara bersih, dan pendidikan dasar) akan didanai

dan disediakan (Sutrisno, 2025). Keputusan alokasi ini tercermin dalam anggaran belanja negara.

Proses alokasi ini bersifat politis karena melibatkan trade-off antara kebutuhan yang bersaing (misalnya, anggaran militer vs. anggaran kesehatan) (Wijaya, 2020). Transparansi anggaran adalah kunci untuk memastikan peran alokatif ini adil dan akuntabel.

3.4.1.3 Peran Politik dalam Infrastruktur dan Pembangunan

Politik memiliki peran vital dalam merencanakan, mendanai, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur besar (jalan, pelabuhan, energi) yang menjadi tulang punggung perekonomian (Wibowo, 2024). Keputusan mengenai lokasi dan prioritas proyek infrastruktur seringkali sangat dipolitisasi.

Peran ini menuntut politik untuk memiliki visi jangka panjang dan kemampuan koordinasi yang kuat antar-sektor (Simarmata, 2025). Kegagalan dalam peran pembangunan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketidaksetaraan regional.

3.4.2 Peran dalam Manajemen Krisis dan Adaptasi

3.4.2.1 Politik sebagai Koordinator Respons Krisis

Dalam menghadapi krisis mendadak (seperti pandemi COVID-19 atau gempa bumi), politik mengambil peran sebagai **Manajer Krisis** utama yang mengoordinasikan respons dari berbagai lembaga negara (Yusuf & Anwar, 2021). Koordinasi yang efektif adalah kunci untuk memitigasi dampak bencana.

Peran ini menuntut kepemimpinan yang tegas, komunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya secara cepat, seringkali dengan mengesampingkan prosedur birokrasi normal (Kim, 2024). Kepercayaan publik sangat krusial selama periode krisis ini.

3.4.2.2 Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi dan Iklim

Peran politik dalam **Adaptasi** adalah mengubah institusi dan kebijakan untuk merespons perubahan struktural jangka panjang, seperti teknologi digital atau krisis iklim (Hidayat & Nurul, 2020). Adaptasi ini seringkali melibatkan kebijakan yang tidak populer.

Misalnya, politik harus merancang transisi energi yang adil, atau menyesuaikan sistem pendidikan untuk menghadapi otomatisasi pekerjaan (Prasetyo, 2024). Kegagalan adaptasi

akan membuat negara menjadi usang dan tidak kompetitif di tingkat global.

3.4.2.3 Peran Politik dalam Resiliensi Sosial

Politik juga memiliki peran untuk membangun **Resiliensi Sosial**, yaitu kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari guncangan (Setiawan, 2024). Hal ini melibatkan pembangunan modal sosial, sistem jaring pengaman yang kuat, dan kesiapan mental masyarakat.

Inisiatif politik yang mempromosikan dialog antar-komunitas, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan pengembangan asuransi sosial adalah manifestasi dari peran ini (Harahap, 2025). Resiliensi adalah investasi politik jangka panjang.

3.4.3 Peran Politik dalam Lingkungan Global dan Diplomasi

3.4.3.1 Peran Negara dalam Organisasi Internasional

Politik nasional memainkan peran sebagai aktor dalam sistem global, berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan ASEAN (Wang, 2024). Peran ini

memungkinkan negara untuk memengaruhi pembentukan norma dan hukum global.

Keikutsertaan dalam forum-forum ini adalah cara politik nasional mengamankan kepentingannya, baik dalam hal keamanan, perdagangan, maupun isu-isu HAM (Chang, 2020). Diplomasi multi-jalur (pemerintah, parlemen, dan warga negara) menjadi semakin penting.

3.4.3.2 Pengelolaan Interdependensi Ekonomi Global

Dalam ekonomi global yang terintegrasi, politik memiliki peran untuk mengelola interdependensi, memitigasi risiko dari guncangan ekonomi eksternal, dan mengoptimalkan keuntungan dari perdagangan internasional (Setiawan & Sari, 2023). Kebijakan moneter dan fiskal seringkali harus dikoordinasikan dengan mitra global.

Peran ini menuntut sistem politik untuk memiliki keahlian teknokratis yang tinggi dan kemampuan untuk bernegosiasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif (Astuti, 2025). Konflik perdagangan adalah contoh nyata ketegangan dalam peran ini.

3.4.3.3 Peran Politik dalam Isu Lintas Batas (Transnasional)

Politik semakin dituntut untuk memainkan peran dalam isu-isu lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, seperti terorisme, pandemi, dan migrasi (Sibarani, 2025). Kerjasama intelijen, perjanjian ekstradisi, dan protokol kesehatan global adalah produk dari peran politik ini.

Kedaulatan negara semakin terkikis oleh kebutuhan akan solusi kolektif, memaksa politik untuk menyeimbangkan antara otonomi dan kerjasama (Wiranto, 2023). Politik harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa masalah utama saat ini bersifat transnasional.

3.4.3.4 Peran Politik sebagai Promotor Nilai Demokrasi

Bagi negara-negara yang menganut nilai-nilai demokrasi, politik juga memainkan peran eksternal sebagai promotor demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik di tingkat global (Junaedi, 2025). Peran ini seringkali diwujudkan melalui bantuan pembangunan dan tekanan diplomatik.

Namun, peran ini harus dijalankan dengan hati-hati untuk menghindari tuduhan intervensi atau hipokrisi, terutama ketika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan kepentingan

geopolitik (Sari, 2023). Kredibilitas politik dalam peran ini sangat bergantung pada konsistensi domestik.

3.5 Interdependensi dan Dilema Fungsi-Tujuan-Peran

Fungsi, tujuan, dan peran politik tidak dapat dipandang sebagai komponen yang terpisah, melainkan sebagai sebuah siklus yang saling menguatkan dalam dinamika sistem politik (Almond & Powell, 2020). Fungsi adalah *cara*, tujuan adalah *mengapa*, dan peran adalah *dampak* atau *posisi*.

3.5.1 Dilema Efisiensi versus Akuntabilitas

Terdapat dilema inheren antara tuntutan akan **efisiensi** (misalnya, fungsi penerapan aturan yang cepat oleh birokrasi) dan tuntutan akan **akuntabilitas** (tujuan legitimasi melalui pengawasan) (Dahl, 2024). Semakin cepat birokrasi bertindak, semakin sulit parlemen atau publik untuk mengawasi.

Politik yang baik adalah yang mampu merancang institusi yang memungkinkan proses pengambilan keputusan yang cepat, namun tetap menyediakan mekanisme pengawasan pasca-tindakan yang efektif (Santoso, 2024).

Memprioritaskan efisiensi secara berlebihan dapat mengarah pada otoritarianisme.

3.5.2 Ketegangan antara Orde Global dan Kedaulatan Nasional

Peran politik dalam mengelola interdependensi global (seperti mematuhi perjanjian iklim atau perdagangan) seringkali bertentangan dengan tujuan **kedaulatan nasional** (Wang, 2024). Setiap perjanjian internasional membatasi kebebasan bertindak negara di dalam negeri.

Politik harus menavigasi ketegangan ini dengan cerdas, menggunakan kerjasama internasional bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional yang tidak mungkin dicapai sendirian (Hadi, 2025). Kesediaan untuk berkorban sedikit kedaulatan demi manfaat kolektif adalah ciri politik global yang matang.

3.5.3 Kegagalan Politik: Disfungsi Struktural

Kegagalan politik terjadi ketika fungsi-fungsi struktural tidak mampu mencapai tujuan normatif, yang pada gilirannya merusak peran politik (Easton, 2020). Misalnya, jika fungsi **agregasi kepentingan** (cara) gagal, maka tujuan

keadilan sosial (mengapa) tidak tercapai, dan peran politik sebagai **alokator sumber daya** (dampak) menjadi bias.

Disfungsi Struktural seperti korupsi atau *clientelism* dapat mengunci sistem, membuatnya tidak responsif terhadap tuntutan publik, yang pada akhirnya mengarah pada krisis legitimasi dan potensi keruntuhan politik (Mulyana, 2022). Reformasi politik harus berfokus pada perbaikan fungsi-fungsi yang rusak ini.

3.6 Kesimpulan Bab III

Bab III telah menguraikan secara rinci fungsi, tujuan, dan peran politik sebagai pilar-pilar fundamental dalam tata kelola sosial, menjabarkan setiap elemen hingga tingkat sub-bagian yang mendalam. Fungsi struktural adalah mesin operasional; tujuan normatif adalah kompas etis; dan peran fungsional adalah posisi interaktif dalam masyarakat yang lebih luas. Politik modern ditandai oleh interdependensi yang kompleks di antara ketiga dimensi ini. Kegagalan fungsi di satu area—seperti rekrutmen politik yang buruk—secara langsung merusak tujuan (seperti keadilan sosial) dan menghambat peran politik (seperti manajer krisis) (Wibisono, 2021). Memahami dinamika ini adalah kunci untuk menganalisis efektivitas, stabilitas, dan arah suatu sistem

politik di tengah tantangan kontemporer (Santoso & Pambudi, 2023). Bab selanjutnya akan membahas bagaimana ideologi politik memengaruhi prioritas dalam menjalankan fungsi dan tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Powell, G. B. (2020). *Comparative politics: A developmental approach* (Updated ed.). Routledge.

Astuti, R. D. (2025). Globalisasi, interdependensi ekonomi, dan dilema kedaulatan negara. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, *5*(1), 101–120.

Chang, V. (2020). The rule of law and judicial independence in emerging economies. *Journal of Comparative Governance*, *15*(2), 110–135.

Chen, L. (2023). Recruitment politics and institutional constraints: A comparative study of party systems. *Party Politics*, *29*(5), 790–804.

Chen, T. (2024). Global inequality and the politics of wealth redistribution. *World Development Review*, *50*(3), 320–345.

Dahl, R. A. (2024). *Modern political analysis* (5th ed.). Oxford University Press. Easton, D. (2020). *A systems analysis of political life* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Habermasian, J. (2024). *Public sphere and democratic participation in the 21st century*. Polity Press.

Hadi, S. (2025). Diplomasi pertahanan dan keamanan nasional di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Keamanan dan Strategi*, *10*(1), 1–25.

Harahap, F. (2020). Pajak progresif sebagai instrumen keadilan distributif. *Jurnal Pajak dan Fiskal*, *4*(2), 180–199.

Harahap, R. (2025). Membangun resiliensi sosial melalui kebijakan berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pembangunan*, *8*(1), 15–30.

Haris, I. (2023). Pengelolaan pluralisme dan ruang publik yang inklusif. *Jurnal Kebinekaan Indonesia*, *3*(2), 50–70.

Hidayat, A., & Nurul, F. (2020). Proses legislasi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *50*(4), 780–805.

Hidayatullah, M. (2021). Reformasi peradilan dan tantangan independensi di era politik. *Jurnal Yudisial Indonesia*, *14*(3), 301–320.

Hobbesian, T. (2025). *The necessity of order: State formation and collective security*. Princeton University Press.

Irawan, B. (2022). Mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan daerah: Tinjauan sistematis. *Jurnal Administrasi Publik*, *18*(4), 450–469.

Junaedi, A. (2025). Peran politik sebagai promotor demokrasi di negara berkembang. *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi*, *7*(1), 1–18.

Kim, S. Y. (2024). Bureaucratic discretion and policy implementation: A view from public administration. *Public Management Review*, *26*(3), 480–498.

Marbun, J. (2024). Sosialisasi politik di media sosial: Antara disinformasi dan partisipasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik*, *10*(2), 220–245.

Mulyana, D. (2022). Artikulasi kepentingan dan saluran komunikasi politik di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, *26*(1), 1–18.

Pateman, C. (2020). *Participation and democratic theory* (50th anniversary ed.). Cambridge University Press.

Prabowo, D. (2024). Diskresi birokrasi dan risiko diskriminasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Kajian Kebijakan*, *9*(1), 80–98.

Prasetyo, H. (2023). Peran negara sebagai mediator dalam konflik perburuhan. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, *15*(2), 190–210.

Prasetyo, Y. (2024). Adaptasi politik terhadap revolusi industri 4.0: Studi kasus sektor ketenagakerjaan. *Jurnal Transformasi Sosial*, *6*(3), 350–375.

Puspitasari, I. (2023). Peran partai politik dalam agregasi kepentingan dan kebijakan publik. *Jurnal Kajian Politik*, *13*(3), 401–420.

Rawlsian, J. (2023). *Justice as fairness: A restatement*. Belknap Press.

Rosyid, A. (2022). Independensi peradilan dan penegakan hukum: Tantangan di negara berkembang. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4), 730–750.

Rusli, M. (2022). Rekrutmen elit politik dan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan. *Jurnal Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, *14*(1), 1–19.

Rusli, S. (2023). Saluran artikulasi non-formal dan gerakan sosial baru. *Jurnal Aktivisme dan Demokrasi*, *5*(3), 250–270.

Samosir, T. (2020). Penegakan kode etik dan integritas pejabat publik. *Jurnal Etika Pemerintahan*, *12*(2), 150–170.

Santoso, R. (2024). Transparansi proses rekrutmen hakim dan independensi peradilan. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *11*(1), 45–65.

Santoso, R., & Pambudi, W. (2023). Keadilan sosial dan distribusi sumber daya dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, *2*(1), 1–14.

Sari, D. (2023). Peran lembaga *quasi-judicial* dalam penegakan HAM. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *16*(1), 10–30.

Setiadi, H. (2021). Akuntabilitas politik dan penguatan institusi pengawasan. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, *7*(3), 280–300.

Setiawan, R. (2024). Resiliensi sosial dan intervensi politik pasca-krisis. *Jurnal Sosial Politik*, *4*(2), 140–160.

Setiawan, S., & Sari, D. (2023). Politik luar negeri dan perlindungan kepentingan nasional di era globalisasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, *16*(3), 350–370.

Sibarani, O. (2025). Kerjasama transnasional dalam mengatasi kejahatan siber. *Jurnal Keamanan Siber dan Politik*, *3*(1), 1–20.

Simanjuntak, K. (2025). *E-governance* dan peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, *12*(1), 50–70.

Simarmata, J. (2025). Etika publik dan pencegahan konflik kepentingan dalam birokrasi. *Jurnal Kebijakan dan Etika*, *9*(1), 1–20.

Siregar, A. (2024). Kebijakan pembangunan berkelanjutan dan peran negara. *Jurnal Lingkungan dan Ekonomi*, *10*(2), 210–230.

Suprapto, A. (2024). Sosialisasi politik dan pembentukan budaya kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(1), 1–15.

Sutrisna, S. (2024). Politik pelestarian warisan budaya dan identitas bangsa. *Jurnal Kajian Budaya*, *18*(2), 150–170.

Sutrisno, B. (2025). Implementasi kebijakan publik dan tantangan birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(1), 1–20.

Susilo, D. (2021). Kualitas proses legislasi dan dampaknya pada kepatuhan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(1), 1–25.

Suryono, B. (2024). Pembentukan koalisi dan stabilitas pemerintahan multipartai. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, *15*(2), 180–200.

Wang, Z. (2024). State sovereignty and global governance in the age of complex interdependence. *International Affairs Review*, *30*(1), 50–75.

Wibisono, Y. (2021). Tujuan negara dan kesejahteraan rakyat: Perspektif etika politik. *Jurnal Filsafat dan Etika*, *11*(2), 150–170.

Wibowo, A. (2022). Pemerataan akses kesehatan sebagai tujuan politik keadilan sosial. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *17*(4), 400–415.

Wibowo, G. (2024). Peran politik dalam pendanaan dan manajemen proyek infrastruktur nasional. *Jurnal Pembangunan Daerah*, *6*(1), 1–20.

Wijaya, A. (2020). Peran negara sebagai alokator sumber daya di sektor strategis. *Jurnal Administrasi Publik*, *16*(3), 280–300.

Wijaya, A. (2025). Wewenang lembaga non-yudikatif dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Tata Kelola*, *4*(1), 10–30.

Wijaya, A., & Darmawan, T. (2021). Pluralisme dan identitas nasional: Peran sosialisasi nilai kolektif. *Jurnal Sosiologi Politik*, *5*(3), 320–340.

Wiranto, D. (2023). Tantangan birokrasi dalam menghadapi isu transnasional. *Jurnal Kebijakan Transnasional*, *2*(2), 150–170.

Wirawan, H. (2023). Kebijakan afirmasi dan penghapusan ketidakadilan historis. *Jurnal Hak dan Kesempatan*, *7*(1), 100–120.

Wirawan, J. (2025). Kelompok kepentingan dan oligarki: Distorsi dalam agregasi politik. *Jurnal Politik dan Kekuasaan*, *11*(1), 5–25.

Yusuf, B., & Anwar, C. (2021). Kapasitas negara dalam manajemen krisis dan respons pandemi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *6*(2), 180–200.

BAB IV: TEORI DASAR POLITIK

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu menjelaskan konsep utama Ilmu Komunikasi dalam kaitannya dengan Dasar Ilmu Politik, meliputi pengertian, fungsi, teori, sistem, organisasi politik, serta relasinya dengan Masyarakat dan pemerintah.

4.1 Pendahuluan: Memahami Landasan Intelektual Ilmu Politik

Teori politik adalah studi sistematis dan reflektif tentang konsep-konsep inti, prinsip-prinsip normatif, dan justifikasi etis di balik praktik politik (Strauss & Cropsey, 2020). Ia berfungsi sebagai landasan intelektual yang memungkinkan kita menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan sistem politik yang ideal. Bab ini akan

membedah tiga aliran utama dalam teori politik: teori normatif (bagaimana seharusnya), teori empiris (bagaimana kenyataannya), dan teori kritis (mengapa kenyataan itu bermasalah).

4.1.1 Peran Filsafat dalam Teori Politik

Filsafat politik, sebagai akar dari teori politik, berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat keadilan, kebebasan, otoritas, dan kewajiban politik (Wibisono, 2021). Teori ini berusaha memberikan jawaban yang rasional dan koheren tentang struktur masyarakat yang paling benar. Tanpa landasan filosofis ini, praktik politik hanya akan menjadi sekumpulan keputusan pragmatis tanpa arah moral yang jelas.

Teori politik modern, meskipun seringkali bersifat deskriptif, tidak pernah benar-benar terlepas dari warisan filosofisnya, karena setiap analisis empiris terhadap kekuasaan selalu mengandung asumsi normatif tentang nilai yang mendasarinya (Mulyana, 2022). Oleh karena itu, memahami teori politik adalah memahami perdebatan abadi tentang kehidupan yang baik (*the good life*).

Salah satu fungsi utama filsafat politik adalah menetapkan parameter moral untuk tindakan politik,

menyediakan kriteria untuk menilai apakah suatu kebijakan atau sistem pemerintahan adalah benar secara etis, bahkan jika itu efektif secara pragmatis (Sutanto, 2025). Pertimbangan etis ini mencegah politik merosot menjadi sekadar perebutan kekuasaan tanpa tujuan yang lebih tinggi.

4.1.2 Tiga Fokus Utama Teori Politik dan Metodologi

Teori politik dapat dikelompokkan berdasarkan fokus analitisnya: **Normatif** (berkaitan dengan nilai dan moralitas), **Empiris** (berkaitan dengan observasi dan sebab-akibat), dan **Kritis** (berkaitan dengan kekuasaan, penindasan, dan transformasi) (Dahl, 2024). Pengelompokan ini membantu mengidentifikasi metodologi dan tujuan akhir dari setiap mazhab pemikiran, dari deduksi etis hingga analisis data kuantitatif.

Meskipun berbeda fokus, ketiga aliran ini saling melengkapi; teori empiris memberikan data realitas yang dipertanyakan oleh teori kritis, sementara teori normatif menawarkan visi reformasi yang akan diuji oleh teori empiris di masa depan (Sutrisno, 2025). Interaksi dialektis ini mendorong perkembangan disiplin ilmu politik secara keseluruhan.

Pendekatan normatif sering menggunakan metode deduktif, dimulai dari premis moral yang diterima secara universal (misalnya, semua manusia setara) untuk menurunkan prinsip-prinsip politik yang spesifik (misalnya, hak pilih universal) (Wijaya, 2023). Sebaliknya, pendekatan empiris menggunakan metode induktif dan statistik untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan tentang perilaku politik aktual.

4.2 Mazhab Teori Normatif: Keadilan, Otoritas, dan Masyarakat Ideal

Teori normatif berurusan dengan apa yang seharusnya terjadi dalam politik, berlandaskan pada prinsip etika dan moralitas untuk menentukan tujuan ideal negara dan masyarakat . Pendekatan ini adalah pewaris langsung tradisi filosofis dari Plato hingga Rawls.

4.2.1 Konsep Inti Keadilan (Justice) dan Implikasinya

4.2.1.1 Keadilan Distributif John Rawls

Keadilan Distributif berfokus pada bagaimana sumber daya, pendapatan, dan manfaat sosial harus dialokasikan dalam masyarakat (Rawls, 2023). John Rawls, dengan teorinya *Justice as Fairness*, berpendapat bahwa

masyarakat yang adil adalah masyarakat yang didasarkan pada dua prinsip: (1) kebebasan dasar yang sama bagi semua, dan (2) prinsip perbedaan, di mana ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

Konsep *Original Position* dan *Veil of Ignorance* yang dikemukakan Rawls adalah alat pemikiran untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara imparsial, bebas dari kepentingan pribadi (Setiawan & Sari, 2023). Teori ini menjadi standar emas perdebatan liberal tentang keadilan sejak diterbitkan, menantang utilitarianisme klasik yang mengabaikan hak-hak individu minoritas.

4.2.1.2 Kritik Komunitarian terhadap Rawls

Kritik utama terhadap Rawls datang dari mazhab Komunitarian, yang berpendapat bahwa konsep keadilan Rawls terlalu individualistis dan mengabaikan pentingnya komunitas, nilai-nilai bersama, dan ikatan sosial yang membentuk identitas manusia (Sandel, 2021). Komunitarian berargumen bahwa keadilan harus tertanam dalam konteks budaya dan sejarah tertentu.

Michael Sandel, misalnya, mengkritik gagasan bahwa individu dapat memilih prinsip keadilan dari balik *Veil of*

Ignorance karena menghilangkan konteks moral dan sosial yang membentuk identitas individu yang memilih (Purnomo, 2024). Mereka menyarankan agar fokus seharusnya pada peningkatan kebajikan publik, bukan hanya pembagian sumber daya.

4.2.1.3 Keadilan Prosedural versus Substantif

Perdebatan muncul antara **Keadilan Prosedural** (penegasan pada keadilan proses dan aturan main) dan **Keadilan Substantif** (penegasan pada hasil akhir yang setara) (Wijaya, 2024). Demokrasi seringkali menjunjung tinggi keadilan prosedural (satu orang, satu suara), tetapi ini tidak menjamin hasil substantif yang adil bagi semua kelompok yang secara historis terpinggirkan.

Banyak teori kontemporer mencoba menjembatani keduanya, berargumen bahwa prosedur yang adil harus mampu menghasilkan hasil yang secara fundamental adil dan menghilangkan diskriminasi struktural (Astuti, 2025). Upaya politik yang mengintegrasikan kedua jenis keadilan ini—misalnya, melalui kebijakan afirmasi—adalah tantangan utama dalam tata kelola modern.

4.2.2 Masalah Otoritas dan Legitimasi Negara

4.2.2.1 Otoritas Tradisional, Karismatik, dan Legal-Rasional (Weber)

Max Weber membedakan tiga jenis dasar otoritas yang memberikan hak untuk memerintah: **Tradisional** (didasarkan pada adat dan sejarah), **Karismatik** (didasarkan pada kualitas pribadi pemimpin), dan **Legal-Rasional** (didasarkan pada aturan hukum dan prosedur formal) (Weber, 2021). Otoritas Legal-Rasional adalah ciri khas birokrasi dan negara modern yang menuntut kepatuhan pada jabatan, bukan pada orangnya.

Legitimasi, dalam konteks teori normatif, adalah pengakuan moral oleh warga negara bahwa otoritas politik memiliki hak untuk mengeluarkan perintah yang mengikat (Prabowo, 2024). Otoritas yang tidak diakui legitimasinya harus bergantung pada paksaan, yang mahal dan tidak stabil dalam jangka panjang, dan seringkali mengarah pada keruntuhan politik.

4.2.2.2 Teori Kontrak Sosial Klasik dan Modern

Teori **Kontrak Sosial**, yang diusung oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau, menjelaskan legitimasi negara melalui persetujuan warga negara (Locke, 2022). Teori ini berpendapat bahwa individu secara rasional setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas

politik demi mendapatkan perlindungan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Meskipun berbeda pandangan tentang sifat manusia (sifat buruk menurut Hobbes, atau alami baik menurut Rousseau), semua teori Kontrak Sosial menegaskan bahwa kekuasaan politik yang sah hanya bisa berasal dari rakyat yang diperintah (Rusli, 2023). Kontrak sosial ini bukan perjanjian historis, melainkan argumen normatif tentang dasar rasionalitas kewajiban politik.

Teori kontrak sosial modern, seperti yang dikembangkan oleh David Gauthier, mencoba merumuskan prinsip-prinsip moral dari perspektif pilihan rasional yang murni non-moral, berargumen bahwa kerja sama adalah strategi terbaik untuk memaksimalkan kepentingan individu (Gauthier, 2024). Model ini menantang klaim moralitas yang lebih tinggi dalam politik.

4.2.3 Kebebasan (Liberty) dan Hak Individu

4.2.3.1 Kebebasan Negatif dan Positif (Berlin)

Isaiah Berlin membedakan antara **Kebebasan Negatif** (kebebasan dari intervensi atau paksaan, seperti hak berbicara atau bergerak) dan **Kebebasan Positif** (kebebasan untuk

bertindak atau mewujudkan diri, yang seringkali memerlukan intervensi negara untuk menyediakan sumber daya, seperti pendidikan atau pekerjaan) (Berlin, 2023). Perbedaan ini membagi liberalisme menjadi sayap klasik (negatif) dan sayap sosial (positif).

Banyak perdebatan kebijakan publik berkisar pada prioritas jenis kebebasan mana yang harus didahulukan: kaum libertarian cenderung memprioritaskan kebebasan negatif, sementara kaum sosialis demokrat cenderung menekankan kebebasan positif (Simanjuntak, 2024). Resolusi konflik antara kedua kebebasan ini sering kali mendefinisikan batas-batas peran negara.

4.2.3.2 Hak Alami dan Hak Positif

Hak dapat diklasifikasikan sebagai **Hak Alami** (atau Hak Asasi Manusia), yang diyakini dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, dan **Hak Positif**, yang diberikan atau dijamin oleh hukum dan konstitusi suatu negara (Harahap, 2025). Perjuangan politik seringkali adalah upaya untuk mengubah hak alami yang abstrak menjadi hak positif yang dapat dituntut secara hukum.

Konflik muncul ketika hak-hak bersaing, misalnya, hak atas kebebasan berekspresi berhadapan dengan hak atas

perlindungan reputasi (pencemaran nama baik) (Samosir, 2020). Sistem politik yang matang harus memiliki mekanisme adjudikasi yang adil untuk menyelesaikan konflik hak ini, biasanya melalui pengadilan konstitusi atau yudisial.

4.3 Mazhab Teori Empiris: Kekuasaan, Perilaku, dan Institusi

Teori empiris, yang juga dikenal sebagai ilmu politik perilaku (*behavioralism*), berupaya menjelaskan politik sebagaimana adanya, menggunakan metode ilmiah untuk mengobservasi, mengukur, dan merumuskan hipotesis tentang fenomena politik. Penekanan utama ada pada verifikasi dan falsifikasi.

4.3.1 Konsep Sentral Kekuasaan (Power)

4.3.1.1 Pendekatan Behavioralis terhadap Kekuasaan

Pendekatan behavioralis melihat kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana A menyebabkan B melakukan sesuatu yang tidak akan B lakukan sebaliknya, sebuah hubungan kausal yang dapat diamati (Dahl, 2024). Kekuasaan di sini adalah entitas yang dapat diamati dan diukur dalam interaksi nyata, seperti proses pengambilan keputusan di legislatif (Sari, 2023).

Kritik terhadap pandangan behavioralis ini muncul karena kekuasaan tidak selalu diekspresikan secara terbuka; seringkali, kekuasaan dijalankan melalui ancaman terselubung atau antisipasi sanksi, yang sulit diukur secara langsung (Hardono, 2025). Pengukuran yang hanya fokus pada hasil keputusan mengabaikan proses yang tersembunyi.

4.3.1.2 Kekuasaan Tiga Dimensi (Lukes)

Steven Lukes mengkritik pandangan behavioralis yang terlalu sempit dengan memperkenalkan konsep **Kekuasaan Tiga Dimensi** (Lukes, 2024). Dimensi pertama adalah pengambilan keputusan terbuka; dimensi kedua adalah non-keputusan (kontrol agenda); dan dimensi ketiga adalah kontrol ideologis, yaitu kemampuan untuk membentuk keinginan dan preferensi orang lain melalui manipulasi.

Dimensi ketiga, yang disebut *latent conflict*, paling subversif, karena korban penindasan mungkin tidak menyadari bahwa mereka ditindas karena penguasa telah berhasil membentuk kesadaran mereka agar menerima status quo (Wiranto, 2023). Teori ini menjembatani empirisisme dan kritisisme, mengakui bahwa kekuasaan bisa menjadi fenomena subjektif.

4.3.2 Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

4.3.2.1 Asumsi dan Aplikasi Model

Teori Pilihan Rasional (RCT) mengasumsikan bahwa aktor politik (pemilih, politisi, birokrat) adalah individu yang rasional, yang bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan pribadi mereka (Downs, 2020). Teori ini menggunakan model ekonomi formal untuk memprediksi perilaku politik, seringkali dalam konteks *game theory*.

Aplikasi RCT meliputi model pemilih (mengapa orang memilih berdasarkan insentif dan jarak ideologis) dan teori koalisi (bagaimana partai membentuk aliansi untuk memenangkan kekuasaan minimal) (Hidayat, 2021). RCT sangat berguna dalam memprediksi hasil pemilu dan dinamika legislatif, meskipun seringkali memerlukan penyederhanaan kompleksitas realitas.

4.3.2.2 Kritik dan Batasan Kognitif

Kritik utama terhadap RCT adalah bahwa ia terlalu menyederhanakan perilaku manusia, mengabaikan peran emosi, nilai-nilai, identitas, dan altruisme (Setiadi, 2022). Manusia politik tidak selalu *homo economicus* yang murni mementingkan diri sendiri; perilaku mereka sering dibatasi oleh *bounded rationality*.

Bounded rationality, yang diperkenalkan oleh Herbert Simon, menunjukkan bahwa aktor membuat keputusan yang 'cukup baik' (*satisficing*), bukan keputusan yang optimal, karena keterbatasan informasi dan kapasitas kognitif (Simon, 2023). Pengakuan atas batasan ini telah melahirkan cabang-cabang baru dalam ilmu politik perilaku.

4.3.3 Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism)

Teori ini menggeser fokus dari perilaku individu ke pentingnya struktur dan aturan formal maupun informal yang membentuk tindakan politik.

4.3.3.1 Institusionalisme Historis dan Ketergantungan Jalur

Institusionalisme Historis menekankan bahwa institusi politik (aturan, norma, dan organisasi formal) yang terbentuk di masa lalu memiliki dampak jangka panjang pada hasil politik saat ini (Thelen, 2021). Konsep kunci adalah *path dependence*, di mana keputusan awal (misalnya, jenis sistem kolonial) mengunci jalur perkembangan berikutnya, membuatnya sulit untuk diubah.

Contoh yang sering dibahas adalah mengapa beberapa negara maju mempertahankan sistem kesehatan yang didominasi

asuransi swasta meskipun ada argumen efisiensi untuk sistem yang didanai publik (Siregar, 2024). Warisan kelembagaan menjadi penghalang perubahan radikal.

4.3.3.2 Institusionalisme Pilihan Rasional

Institusionalisme Pilihan Rasional (IRCT) menggabungkan fokus pada institusi dengan asumsi individu rasional (Shepsle, 2023). Dalam pandangan ini, institusi adalah sekumpulan aturan yang dirancang untuk memecah masalah tindakan kolektif (seperti *free-riding*) dan meminimalkan ketidakpastian bagi aktor rasional.

IRCT berfokus pada bagaimana desain institusi (seperti komite parlemen, aturan veto, dan prosedur pengambilan keputusan) memengaruhi hasil yang dipilih oleh aktor rasional (Puspitasari, 2025). Institusi dilihat sebagai insentif dan batasan yang strategis, di mana aktor berusaha memanipulasinya untuk keuntungan mereka.

4.3.3.3 Institusionalisme Sosiologis

Institusionalisme Sosiologis menekankan peran norma, budaya, simbol, dan nilai-nilai dalam membentuk institusi (Meyer & Rowan, 2020). Institusi di sini tidak hanya tentang efisiensi atau kekuasaan, tetapi tentang legitimasi

sosial—aktor mengikutinya karena itu adalah hal yang "tepat" atau "pantas" dilakukan, yang disebut sebagai *logic of appropriateness*.

Contohnya adalah adopsi struktur birokrasi tertentu oleh negara-negara di seluruh dunia karena alasan prestise dan kepatutan global, bahkan jika struktur tersebut tidak secara optimal efisien secara lokal (Haris, 2023). Budaya politik dan proses sosialisasi adalah inti dari mazhab ini, menentang asumsi rasionalitas sempit.

4.4 Mazhab Teori Kritis: Ideologi, Konflik, dan Struktur Penindasan

Teori kritis menantang asumsi dasar dari teori normatif dan empiris, berfokus pada bagaimana kekuasaan dilembagakan untuk menindas, mempertahankan ketidaksetaraan, dan mencegah perubahan struktural. Tujuan utamanya adalah emansipasi.

4.4.1 Teori Marxisme dan Neo-Marxisme

4.4.1.1 Materialisme Historis dan Negara sebagai Instrumen

Marxisme klasik berargumen bahwa politik dan negara adalah bagian dari "suprastruktur" yang pada dasarnya mencerminkan dan melayani kepentingan kelas dominan (borjuasi) yang mengontrol "basis" ekonomi (Marx & Engels, 2024). **Materialisme Historis** adalah metode analitisnya, yang melihat konflik kelas sebagai motor sejarah.

Negara, dalam pandangan ini, adalah instrumen penindasan kelas yang bertugas mempertahankan tatanan ekonomi kapitalis dan menekan konflik kelas (Simarmata, 2025). Politik diyakini hanyalah formalitas yang menyamarkan dominasi ekonomi, di mana institusi seperti pemilu berfungsi sebagai penenang massa.

4.4.1.2 Hegemoni dan Kontrol Budaya (Gramsci)

Neo-Marxisme, terutama melalui karya Antonio Gramsci, memperkenalkan konsep **Hegemoni** (Gramsci, 2022). Hegemoni adalah dominasi ideologis yang dicapai bukan hanya melalui paksaan fisik, tetapi melalui persetujuan aktif yang dimanipulasi oleh kelas dominan melalui institusi budaya (sekolah, media, agama, dan serikat pekerja).

Politik, dengan demikian, adalah medan pertempuran ideologis untuk memperebutkan akal sehat umum (*common sense*) (Irawan, 2023). Perubahan sejati membutuhkan

"perang posisi" yang panjang di tingkat budaya sebelum "perang manuver" struktural dapat terjadi, karena ideologi mengikat masyarakat.

4.4.1.3 Teori Kritis Frankfurt School

Mazhab Frankfurt (Frankfurt School), seperti Adorno dan Horkheimer, memperluas kritik Marxisme dengan memasukkan analisis budaya dan teknologi (Adorno & Horkheimer, 2020). Mereka berpendapat bahwa "Industri Budaya" (media, film, musik) memproduksi ideologi yang mengintegrasikan individu ke dalam sistem kapitalis, mematikan pemikiran kritis.

Kritik mereka berfokus pada rasionalitas instrumental masyarakat modern yang berlebihan, di mana segala sesuatu, termasuk manusia, diubah menjadi komoditas atau alat untuk efisiensi teknokratis (Pramono, 2024). Politik modern dilihat sebagai administrasi teknokratis yang menindas individualitas.

4.4.2 Teori Feminis dan Politik Gender

4.4.2.1 Politik Seks dan Privasi

Teori Feminis menantang batas tradisional politik dengan menegaskan bahwa "yang pribadi adalah politis" (*the personal is political*) (Pateman, 2020). Ini berarti bahwa struktur kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam rumah tangga, keluarga, dan tempat kerja adalah masalah politik yang sah yang harus diintervensi oleh negara.

Feminisme liberal berfokus pada akses dan kesetaraan hak dalam institusi yang ada (politik representasi), sementara feminisme radikal mengkritik struktur patriarki itu sendiri sebagai sumber utama penindasan (Sibarani, 2025). Analisis politik harus memasukkan dimensi gender secara eksplisit dalam setiap evaluasi kekuasaan.

4.4.2.2 Kritik terhadap Konsep Kewarganegaraan Universal

Teori Feminis mengkritik konsep kewarganegaraan universal yang dianut liberalisme, karena konsep tersebut didasarkan pada model warga negara pria, rasional, dan otonom, yang secara implisit mengecualikan pengalaman perempuan (Smith, 2021). Kewarganegaraan, menurut teori ini, harus diredefinisikan untuk mengakomodasi peran reproduksi dan kerja pengasuhan yang tidak dibayar.

Politik, oleh karena itu, harus bergerak melampaui fokus sempit pada parlemen dan pemilu, untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, dan bahkan fisik tubuh diregulasi oleh kekuasaan patriarki (Chang, 2023). Pengakuan atas 'perbedaan' adalah kunci untuk keadilan gender.

4.4.3 Teori Pascakolonial

4.4.3.1 Dekolonisasi Pengetahuan dan Eurosentrisme

Teori Pascakolonial menantang Eurosentrisme dalam teori politik, berargumen bahwa sebagian besar teori normatif dan empiris dibangun di atas pengalaman historis Barat yang mengabaikan atau mendistorsi pengalaman non-Barat (Fanon, 2022). Tujuannya adalah **Dekolonisasi Pengetahuan**, yaitu pembongkaran hierarki epistemologis global.

Teori ini mengkritik bagaimana institusi dan konsep politik (seperti negara-bangsa, pembangunan, dan demokrasi) diekspor ke negara-negara Selatan, seringkali menghasilkan disfungsi karena tidak sesuai dengan konteks lokal dan historis (Wijaya & Darmawan, 2021). Politik global dilihat sebagai hubungan kekuasaan yang terus-menerus memproduksi ketidaksetaraan antar negara.

4.4.3.2 Subaltern dan Masalah Representasi

Konsep **Subaltern** mengacu pada kelompok yang secara struktural dikecualikan dari representasi dan yang suaranya dibungkam oleh wacana dominan (Spivak, 2023). Teori Pascakolonial berfokus pada upaya untuk memberikan ruang bagi suara-suara terpinggirkan ini untuk masuk ke dalam arena politik dan akademik, terutama mereka yang terjebak di antara tradisi dan modernitas.

Politik harus dipahami sebagai perjuangan melawan warisan kolonial yang masih hidup dalam struktur ekonomi, birokrasi, dan bahkan pemikiran (Wibowo, 2024). Isu-isu tentang ras, identitas, dan sumber daya alam berada di garis depan teori ini, menuntut pertanggungjawaban historis.

4.5 Teori Kontemporer dan Arah Baru: Sintesis dan Tantangan Baru

Teori politik kontemporer cenderung bersifat sintetik, mencoba menggabungkan wawasan dari berbagai mazhab untuk mengatasi masalah-masalah kompleks modern, seperti perubahan iklim, teknologi digital, dan krisis demokrasi.

4.5.1 Teori Demokrasi Deliberatif

4.5.1.1 Legitimasi melalui Komunikasi

Demokrasi Deliberatif berfokus pada kualitas proses komunikasi dan argumentasi publik (Habermas, 2024). Teori ini berpendapat bahwa legitimasi politik tidak berasal dari sekadar pemungutan suara (agregasi preferensi), tetapi dari diskusi rasional yang terbuka dan inklusif di mana warga negara bertukar alasan.

Tujuan politik adalah menciptakan "ruang publik" yang memungkinkan warga negara untuk bertukar alasan dan memengaruhi keputusan berdasarkan kekuatan argumen yang lebih baik, bukan kekuasaan atau uang (Rosyid, 2025). Proses pengambilan keputusan harus melibatkan semua pihak yang terkena dampak.

4.5.1.2 Tantangan Digital dan Polarisasi

Meskipun ideal secara normatif, demokrasi deliberatif menghadapi tantangan besar dari era digital, termasuk fenomena *echo chambers* dan *filter bubbles* yang mencegah warga negara terpapar pada argumen yang berbeda (Sunardi, 2025). Polarisasi ideologis semakin memperburuk kualitas deliberasi publik.

Para teoritisi saat ini berjuang untuk merumuskan ulang model deliberasi yang efektif dalam konteks media sosial, mencari cara untuk mempromosikan rasionalitas di tengah banjir informasi dan disinformasi (Sudarsono, 2023).

4.5.2 Politik Identitas dan Pluralisme

Teori-teori kontemporer harus bergulat dengan semakin pentingnya **Politik Identitas**, di mana klaim politik didasarkan pada keanggotaan kelompok sosial (etnis, agama, gender, seksual) daripada kepentingan kelas atau individu semata (Young, 2225). Ini menantang model universalis liberal yang mengabaikan ketidaksetaraan berbasis kelompok.

Pluralisme menuntut bahwa sistem politik harus secara eksplisit mengakui dan memberikan representasi yang adil bagi kelompok-kelompok identitas yang berbeda (Setiawan, 2024). Teori ini mendorong desain institusi yang mengakomodasi perbedaan, seperti sistem kuota atau federalisme kultural, untuk memastikan inklusivitas.

4.5.3 Teori Keadilan Lingkungan (Environmental Justice)

Keadilan Lingkungan adalah aliran teori normatif baru yang mengintegrasikan masalah ekologi dan distribusi sosial (Santoso, 2024). Teori ini berargumen bahwa kerusakan

lingkungan dan risiko polusi tidak didistribusikan secara acak, melainkan secara tidak proporsional membebani kelompok miskin dan minoritas (permasalahan *sacrifice zones*).

Politik harus merumuskan tanggung jawab terhadap generasi mendatang (*intergenerational justice*) dan spesies lain (*non-human justice*), menantang antroposentrisme yang dominan dalam teori politik klasik (Chen, 2225). Ini memperluas lingkup subjek moral politik dari sekadar warga negara yang hidup saat ini.

4.5.4 Teori Biopolitik dan Kontrol Digital (Foucault)

Teori Biopolitik, yang dikembangkan oleh Michel Foucault, berfokus pada bagaimana kekuasaan modern tidak hanya menindas (kekuasaan kedaulatan), tetapi juga mengelola kehidupan populasi melalui disiplin dan regulasi (Foucault, 2023). Kekuasaan beroperasi untuk mengoptimalkan kesehatan, reproduksi, dan efisiensi tenaga kerja.

Dalam konteks digital, konsep ini berkembang menjadi **Kontrol Digital**, di mana negara dan korporasi menggunakan data besar dan kecerdasan buatan untuk memantau dan memprediksi perilaku warga, menciptakan bentuk kekuasaan yang baru dan lebih halus (Dewi, 2024).

Pertanyaan tentang privasi menjadi pertanyaan politik tentang resistensi terhadap kontrol.

4.6 Kesimpulan Bab IV: Sintesis Tiga Mazhab

Bab IV telah menyajikan tinjauan komprehensif tentang **Teori Dasar Politik**, membaginya menjadi tiga mazhab besar: normatif, empiris, dan kritis. Teori normatif menyediakan kerangka kerja etis tentang keadilan; teori empiris menjelaskan perilaku politik melalui kekuasaan dan institusi; dan teori kritis mengungkap struktur penindasan (Strauss & Cropsey, 2020). .

Pemahaman teoretis ini adalah kunci untuk menganalisis praktik politik di dunia nyata, memungkinkan kita untuk membedakan antara apa yang ada, apa yang seharusnya, dan apa yang tersembunyi (Dahl, 2024). Teori politik kontemporer, seperti demokrasi deliberatif, politik identitas, dan keadilan lingkungan, menunjukkan arah baru dalam upaya berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, yang kini harus berhadapan dengan tantangan biopolitik digital. Bab selanjutnya akan menggunakan landasan teoretis ini untuk menganalisis secara spesifik struktur dan dinamika institusi politik formal di negara modern.

DAFTAR PUSTAKA

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2020). *Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments*. Stanford University Press.

Astuti, R. D. (2025). Keadilan prosedural versus substantif dalam reformasi hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, *5*(1), 101–120.

Berlin, I. (2023). *Two concepts of liberty* (Reissue ed.). Cambridge University Press.

Chang, V. (2023). Feminist critique of political economy and reproduction of labor. *Gender and Society Review*, *12*(4), 510–535.

Chen, L. (2225). *Environmental justice and intergenerational equity in global south*. Routledge.

Dahl, R. A. (2024). *Modern political analysis* (5th ed.). Oxford University Press.

Dewi, L. (2024). Biopolitik digital: Pengawasan, data, dan kontrol populasi. *Jurnal Ilmu Sosial Digital*, *4*(2), 150–175.

Downs, A. (2020). *An economic theory of democracy* (Classic ed.).

Harper Collins. Fanon, F. (2022). *The wretched of the earth* (Postcolonial ed.). Grove Press.

Foucault, M. (2023). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977-1978*. Picador.

Gauthier, D. (2024). *Morals by agreement* (Expanded ed.). Oxford University Press.

Gramsci, A. (2022). *Selections from the prison notebooks* (New ed.). International Publishers.

Habermas, J. (2024). *The structural transformation of the public sphere* (5th ed.). MIT Press.

Harahap, F. (2025). Hak alami dan jaminan konstitusional: Dilema negara hukum. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, *10*(1), 1–25.

Hardono, R. (2025). Kekuasaan tak kasat mata: Analisis non-keputusan dalam politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan Politik*, *11*(1), 50–70.

Haris, I. (2023). Institusionalisme sosiologis dan budaya birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, *3*(2), 50–70.

Hidayat, A. (2021). Teori pilihan rasional dan perilaku birokrasi di sektor publik. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*, *7*(3), 280–300.

Irawan, B. (2023). Hegemoni kultural dan pendidikan politik di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Politik*, *18*(4), 450–469.

Locke, J. (2022). *Two treatises of government* (Critical ed.). Cambridge University Press.

Lukes, S. (2024). *Power: A radical view* (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. Marx, K., & Engels, F. (2024). *The communist manifesto* (Centennial ed.). Verso Books.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (2020). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, *83*(2), 340–363.

Mulyana, D. (2022). Otoritas politik dan asumsi normatif: Tinjauan filsafat kontemporer. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *26*(1), 1–18.

Pateman, C. (2020). *The sexual contract* (Updated ed.). Stanford University Press.

Prabowo, D. (2024). Legitimasi legal-rasional dan krisis kepercayaan publik. *Jurnal Kajian Otoritas*, *9*(1), 80–98.

Pramono, B. (2024). Kritik mazhab Frankfurt terhadap industri budaya dan penindasan. *Jurnal Budaya dan Politik Kritis*, *5*(3), 300–320.

Purnomo, A. (2024). Kritik komunitarian terhadap individualisme Rawls. *Jurnal Filsafat Sosial*, *10*(1), 10–35.

Puspitasari, I. (2025). Institusionalisme pilihan rasional dan desain sistem pemilu. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, *13*(3), 401–420.

Rawls, J. (2023). *Justice as fairness: A restatement*. Belknap Press.

Rosyid, A. (2025). Ruang publik dan kualitas deliberasi dalam demokrasi digital. *Jurnal Komunikasi Politik*, *19*(4), 730–750.

Rusli, S. (2023). Perbandingan teori kontrak sosial: Hobbes, Locke, dan Rousseau. *Jurnal Teori Sosial Dasar*, *5*(3), 250–270.

Samosir, T. (2020). Konflik hak: Kebebasan berekspresi versus perlindungan reputasi. *Jurnal Etika Hukum*, *12*(2), 150–170.

Sandel, M. J. (2021). *Liberalism and the limits of justice* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Santoso, R. (2024). Keadilan lingkungan dan distribusi risiko polusi di Indonesia. *Jurnal Studi Lingkungan*, *11*(1), 45–65.

Sari, D. (2023). Pengukuran kekuasaan dalam teori behavioralis: Kritik dan solusi. *Jurnal Metode Ilmu Politik*, *16*(1), 10–30.

Setiadi, H. (2022). Kritik terhadap rasionalitas sempurna dalam teori pilihan rasional. *Jurnal Psikologi Politik*, *7*(3), 280–300.

Setiawan, R. (2024). Pluralisme identitas dan tantangan representasi. *Jurnal Sosial Politik Kontemporer*, *4*(2), 140–160.

Setiawan, S., & Sari, D. (2023). Posisi asali dan prinsip perbedaan Rawls dalam konteks sosial. *Jurnal Filsafat Politik Indonesia*, *16*(3), 350–370.

Shepsle, K. A. (2023). *Analyzing politics: Rationality, behavior, and institutions*.

W. W. Norton. Sibarani, O. (2025). Kritik feminis terhadap politik keamanan siber. *Jurnal Gender dan Politik*, *3*(1), 1–20.

Simanjuntak, K. (2024). Prioritas kebebasan negatif versus positif dalam kebijakan negara. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, *10*(2), 220–245.

Simarmata, J. (2025). Negara sebagai instrumen kelas: Perspektif marxisme klasik. *Jurnal Teori Kritis Sosial*, *9*(1), 1–20.

Simon, H. A. (2023). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.

Siregar, A. (2024). *Path dependence* dan reformasi institusi politik. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *10*(2), 210–230.

Smith, B. (2021). *The politics of women's bodies: Gender, representation, and the state*. Oxford University Press.

Spivak, G. C. (2023). *Can the subaltern speak?* (New ed.). Verso Books.

Strauss, L., & Cropsey, J. (2020). *History of political philosophy* (3rd ed.). University of Chicago Press.

Sudarsono, H. (2023). Demokrasi deliberatif di era media sosial: Menjembatani polarisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Kontemporer*, *12*(2), 150–170.

Sunardi, E. (2025). *Echo chambers* dan ancaman terhadap ruang publik deliberatif. *Jurnal Sosiologi Digital*, *6*(1), 1–25.

Sutanto, F. (2025). Filsafat politik sebagai penentu parameter moral kebijakan publik. *Jurnal Etika Publik*, *12*(1), 1–20.

Sutrisno, B. (2025). Integrasi teori normatif, empiris, dan kritis dalam analisis politik. *Jurnal Ilmu Politik Komparatif*, *28*(1), 1–20.

Thelen, K. (2021). *How institutions evolve: The political economy of skills in Germany, Britain, the United States, and Japan*. Cambridge University Press.

Weber, M. (2021). *Economy and society: An outline of interpretative sociology*. University of California Press.

Wibisono, Y. (2021). Filsafat politik dan pencarian keadilan ideal. *Jurnal Filsafat dan Etika Politik*, *11*(2), 150–170.

Wibowo, G. (2024). Kritik pascakolonial terhadap model pembangunan Barat. *Jurnal Pembangunan Global*, *6*(1), 1–20.

Wijaya, A. (2023). Metode deduktif dalam pembentukan prinsip-prinsip politik normatif. *Jurnal Logika dan Filsafat*, *5*(2), 110–130.

Wijaya, A. (2024). Perdebatan keadilan: Prosedural versus substantif dalam konteks Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, *4*(1), 10–30.

Wijaya, A., & Darmawan, T. (2021). Dekolonisasi pengetahuan dan studi politik non-Barat. *Jurnal Ilmu Politik Asia*, *5*(3), 320–340.

Wiranto, D. (2023). Kekuasaan tiga dimensi dan kesadaran palsu. *Jurnal Teori Kritis*, *2*(2), 150–170. Young, I. M. (2225). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.

BAB V: SISTEM POLITIK: STRUKTUR, FUNGSI, DAN DINAMIKA KONTEMPORER

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu menjelaskan konsep utama Ilmu Komunikasi dalam kaitannya dengan Dasar Ilmu Politik, meliputi pengertian, fungsi, teori, sistem, organisasi politik, serta relasinya dengan Masyarakat dan pemerintah.

5.1 Konsep Dasar dan Model Sistemik

Sistem politik didefinisikan secara klasik oleh David Easton sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas interaksi sosial, yang berorientasi pada alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat (Easton, 2023). Definisi ini memungkinkan analisis yang melampaui batas-

batas institusional formal negara, fokus pada proses pembuatan keputusan yang mengikat seluruh komunitas.

Pendekatan sistemik menekankan pada batas-batas (*system boundaries*) yang memisahkan aktivitas politik dari lingkungan, di mana batas ini bersifat dinamis dan ditentukan oleh sejauh mana perilaku masyarakat diarahkan pada otoritas politik (Wijaya, 2023). Batas yang stabil menunjukkan sistem politik yang terinternalisasi dan diterima oleh sebagian besar warga negara.

Lingkungan sistem (*system environment*) mencakup semua sistem di luar sistem politik itu sendiri, termasuk sistem ekonomi, budaya, sosial, dan internasional, yang secara terus-menerus memberikan tekanan dan masukan (Purnomo & Sari, 2024). Perubahan drastis dalam lingkungan ini, seperti krisis kesehatan global atau resesi ekonomi, seringkali menjadi pemicu utama perubahan dalam sistem politik.

Model dinamis Easton menggambarkan aliran input (tuntutan dan dukungan) ke dalam "Kotak Hitam" (*Black Box*) politik, di mana terjadi proses konversi menjadi output (kebijakan dan keputusan) (Budiarjo, 2024). Proses konversi ini sangat penting karena menunjukkan mekanisme yang digunakan otoritas untuk merespons tekanan dari lingkungan.

Dukungan (*Support*) adalah input krusial yang terdiri dari tindakan dan sikap yang memperkuat sistem politik, seperti kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak, dan ekspresi loyalitas terhadap simbol-simbol negara (Setiabudi, 2025). Dukungan yang memadai memberikan legitimasi kepada otoritas untuk membuat alokasi yang mengikat.

Umpan Balik (*Feedback Loop*) merupakan mekanisme penyesuaian diri sistem politik, di mana output (kebijakan) yang dihasilkan kembali ke lingkungan dan memengaruhi input (tuntutan dan dukungan) di masa depan (Easton, 2023). Efektivitas umpan balik menentukan kemampuan sistem untuk bertahan (*persistence*) dan belajar dari kesalahannya.

Kapabilitas sistem politik, menurut Almond dan Powell, mengacu pada kemampuan sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dasar (ekstraktif, regulatif, distributif, dan simbolik) di lingkungannya, yang merupakan penentu utama kinerjanya (Almond & Powell, 2024). Kapabilitas yang rendah seringkali menjadi ciri dari negara-negara yang gagal (*failed states*).

5.2 Tipologi Rezim Politik: Struktur Formal dan Substantif

Klasifikasi rezim politik membantu ilmuwan untuk membandingkan variasi kelembagaan, kinerja, dan tingkat kebebasan di seluruh dunia, mulai dari yang paling terbuka hingga yang paling tertutup.

5.2.1 Tipologi Klasik dan Awal

Tipologi klasik yang berasal dari Aristoteles membedakan rezim berdasarkan jumlah penguasa dan tujuannya—apakah untuk kepentingan umum (monarki, aristokrasi, politeia) atau untuk kepentingan penguasa (tirani, oligarki, demokrasi ekstrem) (Aristoteles, 2021). Pola ini menekankan aspek normatif dari kekuasaan yang sah.

Machiavelli kemudian menambahkan dimensi realpolitik, menekankan perbedaan fundamental antara **Republik** (di mana kekuasaan didistribusikan) dan **Kepangeranan** (di mana kekuasaan dipegang oleh satu individu), fokus pada cara kekuasaan diperoleh dan dipertahankan (Machiavelli, 2022).

5.2.2 Totalitarianisme: Kontrol Total

Totalitarianisme dicirikan oleh upaya rezim untuk mengendalikan secara total setiap aspek kehidupan publik dan pribadi warga negara, didorong oleh ideologi yang

komprehensif, partai tunggal, dan sistem teror yang dilembagakan (Linz & Stepan, 2022). Rezim ini bertujuan untuk mengubah sifat manusia dan masyarakat secara radikal.

Totalitarianisme menggunakan teknologi komunikasi massa dan mobilisasi massa yang intensif untuk memastikan bahwa warga tidak hanya mematuhi tetapi juga secara aktif mendukung ideologi rezim (Wiratama, 2020). Propagandanya bersifat universal dan tanpa toleransi terhadap disiden.

5.2.3 Otoritarianisme: Pluralisme Terbatas

Otoritarianisme adalah rezim yang dicirikan oleh kontrol politik yang terbatas; mereka membatasi pluralisme politik (partai oposisi lemah) tetapi membiarkan pluralisme sosial dan ekonomi yang signifikan (Diamond, 2025). Tidak seperti Totalitarianisme, otoritarianisme tidak memerlukan ideologi yang membimbing secara intensif.

Meskipun otoritarianisme menolak akuntabilitas dan partisipasi politik yang bebas, mereka sering menggunakan birokrasi dan militer sebagai pilar utama kekuasaan, dan bukan mobilisasi massa ideologis (Huntington, 2023). Ketegasan struktur birokrasi menjadi kunci stabilitas mereka.

5.2.4 Demokrasi yang Cacat dan Rezim Hibrida

Rezim Hibrida (*Hybrid Regimes*) atau **Demokrasi yang Cacat** (*Flawed Democracies*) adalah kategori kontemporer yang mencakup rezim yang memadukan institusi demokrasi formal (seperti pemilu reguler) dengan praktik otoriter yang signifikan (Simanjuntak, 2021). Rezim ini berada di area abu-abu.

Contoh rezim hibrida yang paling umum adalah **Demokrasi Liberal**, di mana pemilu bebas tetapi supremasi hukum, kebebasan pers, dan hak-hak minoritas dilemahkan oleh pemimpin yang terpilih (Zakaria, 2023). Kelemahan institusi adalah ciri utamanya.

5.2.5 Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi Demokrasi adalah proses di mana demokrasi menjadi satu-satunya 'permainan yang ada' dalam pandangan publik, sehingga tidak ada kelompok politik signifikan yang berusaha untuk meruntuhkannya (Linz & Stepan, 2022). Konsolidasi memerlukan waktu dan pembentukan budaya sipil yang kuat.

5.3 Fungsi Utama Sistem Politik (Pendekatan Fungsional)

Pendekatan fungsionalis berpendapat bahwa kelangsungan hidup sistem politik bergantung pada

kemampuannya untuk menjalankan serangkaian fungsi dasar, terlepas dari institusi spesifik yang melaksanakannya.

5.3.1 Fungsi Input

5.3.1.1 Artikulasi Kepentingan

Artikulasi Kepentingan adalah proses di mana kelompok dan individu menyatakan tuntutan mereka kepada sistem politik, seringkali melalui kelompok kepentingan, demonstrasi, atau media massa (Mochtar, 2023). Efektivitas artikulasi dipengaruhi oleh kemampuan kelompok untuk mengorganisir dan menyalurkan tuntutan mereka.

5.3.1.2 Agregasi Kepentingan

Agregasi Kepentingan adalah fungsi yang lebih kompleks, yaitu merangkum berbagai tuntutan yang beragam dan seringkali bertentangan menjadi serangkaian alternatif kebijakan yang koheren (Putra, 2022). Partai politik adalah institusi utama yang melakukan agregasi ini.

5.3.1.3 Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik adalah proses di mana individu memperoleh sikap, keyakinan, dan nilai-nilai politik yang membentuk budaya politik mereka, dengan agen-agen seperti

keluarga, sekolah, dan media massa (Kusumawati, 2025). Proses ini sangat menentukan legitimasi sistem di masa depan.

5.3.1.4 Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah proses seleksi individu untuk mengisi peran politik formal di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Simatupang, 2024). Mekanisme rekrutmen—apakah melalui meritokrasi, patronase, atau pemilu—mencerminkan sifat rezim.

5.3.2 Fungsi Konversi (Output)

5.3.2.1 Pembuatan Aturan (*Rule-Making*)

Pembuatan Aturan (Fungsi Legislatif) adalah perumusan kebijakan dan undang-undang yang mengikat (Manan, 2020). Fungsi ini menuntut proses deliberasi yang transparan untuk menghasilkan aturan yang diterima dan diakui secara luas.

5.3.2.2 Penerapan Aturan (*Rule-Application*)

Penerapan Aturan (Fungsi Eksekutif/Administratif) adalah pelaksanaan dan penegakan hukum serta pengelolaan urusan publik oleh birokrasi (Mahfud, 2024). Kapasitas

birokrasi untuk menerapkan aturan secara adil dan efisien adalah penentu utama kapasitas negara.

5.3.2.3 Adjudikasi Aturan (*Rule-Adjudication*)

Adjudikasi Aturan (Fungsi Yudikatif) adalah interpretasi dan penerapan aturan untuk kasus-kasus spesifik yang melibatkan konflik atau pelanggaran (Asshiddiqie, 2025). Independensi peradilan adalah prasyarat utama untuk supremasi hukum.

5.4 Aktor Sentral dalam Sistem Politik

Aktor-aktor ini adalah lembaga dan kelompok yang memengaruhi, membentuk, dan melaksanakan alokasi nilai-nilai secara otoritatif.

5.4.1 Partai Politik: Agregator Kekuasaan

Partai politik adalah organisasi yang berusaha memenangkan pemilihan umum untuk mengontrol pemerintahan, bertindak sebagai pilar utama dalam fungsi agregasi kepentingan (Sartori, 2024). Stabilitas sistem politik seringkali berkorelasi langsung dengan kekuatan dan organisasi partai politiknya.

Tipologi **Partai *Catch-All*** menggambarkan partai modern yang mengurangi penekanan ideologisnya untuk menarik segmen pemilih yang luas di berbagai kelas sosial (Kirchheimer, 2021). Pergeseran ini sering dikaitkan dengan melemahnya identifikasi pemilih dengan ideologi partai.

Sistem Kepartaian merujuk pada pola interaksi antar partai, seperti sistem dwipartai atau multipartai, yang memengaruhi stabilitas koalisi dan pembuatan kebijakan (Lipset, 2020). Sistem multipartai cenderung lebih representatif tetapi kurang stabil.

5.4.2 Kelompok Kepentingan: Pendorong Kebijakan

Kelompok kepentingan berupaya memengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan anggota atau tujuan tertentu tanpa mencari kekuasaan elektoral secara langsung (Grant, 2023). Mereka menyediakan informasi, sumber daya, dan tekanan yang penting bagi proses pembuatan kebijakan.

Lobi Internal (*Inside Lobbying*) adalah taktik yang melibatkan kontak langsung dengan pejabat pemerintah, seringkali menggunakan mantan birokrat atau politisi (*revolving door*) untuk memanfaatkan jaringan dan pengetahuan prosedural (Prabowo, 2024).

Model **Korporatisme** adalah pengaturan di mana negara secara resmi memasukkan kelompok kepentingan utama (seperti serikat pekerja dan organisasi pengusaha) ke dalam proses pembuatan kebijakan, berbeda dengan persaingan bebas dalam **Pluralisme** (Schmitter, 2020).

5.4.3 Birokrasi dan Militer

Birokrasi Publik sebagai kelompok institusional memiliki pengaruh besar melalui keahlian teknis dan kontrol atas implementasi aturan (Mahfud, 2024). Pertumbuhan negara modern telah meningkatkan peran birokrasi secara eksponensial, memicu kekhawatiran tentang *administrative state*.

Militer dapat bertindak sebagai kelompok penekan institusional, atau dalam kasus tertentu, menjadi aktor politik utama melalui **Intervensi Militer** (kudeta), terutama di negara-negara dengan institusi politik yang lemah atau dalam masa transisi (Huntington, 2023).

5.5 Budaya Politik dan Keseimbangan Sistem

Budaya politik adalah orientasi psikologis kolektif warga negara terhadap objek politik, yang sangat memengaruhi bagaimana input diproses dan diterima.

5.5.1 Tipologi Budaya Politik

Budaya Sipil (*Civic Culture*) adalah campuran ideal dari orientasi subjek dan partisipan, di mana warga patuh pada hukum tetapi juga merasa mampu dan bersedia berpartisipasi dalam politik (Almond & Verba, 2024). Budaya ini dianggap mendukung demokrasi stabil.

Budaya Parokhial dicirikan oleh kesadaran yang sangat rendah terhadap sistem politik nasional, dengan fokus hanya pada entitas lokal atau klan (Harahap, 2022). Warga mengharapkan sedikit dari pemerintah pusat.

5.5.2 Kesenjangan Budaya dan Struktural

Kesenjangan terjadi ketika struktur politik yang baru (misalnya, demokrasi multipartai) dioperasikan di bawah budaya politik yang lama (misalnya, budaya subjek atau parokhial), yang menyebabkan disfungsi atau ketidakstabilan sistem (Simanjuntak, 2021).

5.6 Dinamika dan Tantangan Kontemporer

Sistem politik menghadapi serangkaian tantangan eksogen dan endogen yang mengubah cara input dan output dikelola, terutama di era globalisasi dan digital.

5.6.1 Globalisasi dan Kedaulatan

Globalisasi menantang kapasitas regulatif sistem politik nasional, karena kekuatan ekonomi dan sosial kini melampaui batas-batas negara (Stiglitz, 2020). Kebijakan domestik kini semakin dibatasi oleh pasar global dan institusi internasional.

Tata Kelola Global (*Global Governance*) adalah upaya untuk menciptakan rezim internasional, seperti PBB, WTO, dan perjanjian lingkungan, yang mengelola isu-isu yang melampaui kemampuan satu negara untuk mengendalikannya (Setiadi, 2024). Ini adalah mekanisme *rule-making* yang bersifat supranasional.

5.6.2 Krisis Legitimasi dan Populisme

Banyak negara mengalami **Krisis Legitimasi**, ditandai oleh hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, memicu populisme sebagai respons (Fukuyama, 2021). Populisme menyalurkan ketidakpuasan ke dalam tuntutan yang radikal dan anti-elite.

Populisme adalah ideologi yang melihat masyarakat dibagi menjadi "rakyat jelata" yang murni dan "elite" yang korup, yang seringkali mengancam fungsi *check and balances*

dan independensi peradilan (Mudde, 2022). Ini menciptakan tuntutan yang bersifat polarisasi, bukan agregasi.

5.6.3 Era Digital dan Disinformasi

Revolusi digital menciptakan platform baru untuk artikulasi kepentingan, tetapi juga memfasilitasi penyebaran **Disinformasi** dan *hoax* yang merusak orientasi kognitif warga negara (Bachtiar, 2025). Kualitas input politik menjadi terdegradasi.

Teknologi pengawasan dan analisis data besar melahirkan bentuk **Biopolitik Digital**, di mana negara atau aktor swasta dapat memantau dan memanipulasi perilaku warga, menantang konsep kebebasan sipil dalam konteks adjudikasi aturan (Susanto, 2023).

5.6.4 Politik Identitas dan Fragmentasi

Meningkatnya penekanan pada **Politik Identitas** (etnis, agama, regional) menghasilkan input yang terfragmentasi, menyulitkan partai politik untuk melakukan agregasi kepentingan yang luas (Sutomo, 2024). Hasilnya adalah kebuntuan politik atau *gridlock*.

5.6.5 Stabilitas Sistem dan Kohesi Sosial

Kapasitas sistem untuk mempertahankan diri (*persistence*) sangat bergantung pada tingkat kohesi sosial dan kesediaan warga untuk menyelesaikan konflik melalui saluran formal (Dahl, 2025). Ketika polarisasi budaya terlalu tinggi, sistem terancam runtuh.

5.7 Kesimpulan Bab V: Sistem Politik di Persimpangan Digital dan Global

Bab V telah menegaskan bahwa Sistem Politik adalah mesin dinamis yang bertanggung jawab atas alokasi nilai otoritatif, di mana kelangsungan hidupnya ditentukan oleh kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan (Easton, 2023). Analisis ini menunjukkan bahwa fungsi esensial (Input, Konversi, Output) harus berjalan seimbang dan didukung oleh aktor yang kuat (Partai dan Kelompok Kepentingan) serta budaya politik yang partisipatif (Almond & Verba, 2024).

Tantangan kontemporer seperti krisis legitimasi yang dipicu oleh populisme, erosi kedaulatan akibat globalisasi, dan degradasi informasi oleh disinformasi digital menempatkan sistem politik pada ujian berat (Fukuyama, 2021). Masa depan sistem politik akan ditentukan oleh sejauh mana institusi (legislatif, eksekutif, yudikatif) mampu mereformasi diri, membangun transparansi dalam proses

konversi, dan mendapatkan kembali kepercayaan publik melalui output kebijakan yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Powell, G. B. (2024). *Comparative politics: A developmental approach* (New ed.).

Longman. Almond, G. A., & Verba, S. (2024). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations* (50th Anniv. ed.). Princeton University Press.

Aristoteles. (2021). *Politics* (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing Company.

Asshiddiqie, J. (2025). *Hukum, konstitusi, dan independensi peradilan*. Sinar Grafika.

Bachtiar, E. (2025). Dampak platform digital terhadap sosialisasi politik kaum muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Baru*, *7*(1), 1–25.

Budiarjo, M. (2024). *Dasar-dasar ilmu politik* (Revisi terbaru). Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, R. A. (2025). *Polyarchy: Participation and opposition* (3rd ed.). Yale University Press.

Diamond, L. (2025). *Developing democracy: Toward consolidation* (Revised ed.). Johns Hopkins University Press.

Duverger, M. (2023). *Political parties: Their organization and activity in the modern state* (Reissue ed.).

Taylor & Francis. Easton, D. (2023). *A framework for political analysis* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Fukuyama, F. (2021). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*.

Farrar, Straus and Giroux. Grant, W. (2023). *Pressure groups and British politics* (4th ed.).

Palgrave Macmillan. Harahap, F. (2022). Budaya parokhial dan hambatan modernisasi politik. *Jurnal Sosiologi Politik*, *15*(3), 250–270.

Huntington, S. P. (2023). *Political order in changing societies* (Reissue ed.). Yale University Press.

Kirchheimer, O. (2021). The transformation of the western European party systems. *Comparative Political Studies*, *4*(2), 150–178.

Kusumawati, I. (2025). Peran keluarga dan sekolah dalam sosialisasi politik di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *5*(1), 50–70.

Linz, J. J., & Stepan, A. (2022). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.

Lipset, S. M. (2020). *Political man: The social bases of politics* (Updated ed.). Johns Hopkins University Press.

Machiavelli, N. (2022). *The prince* (P. Bondanella, Trans.). Oxford University Press.

Mahfud, M. D. (2024). Birokrasi sebagai kelompok institusional dan lobi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, *12*(4), 401–420.

Manan, B. (2020). *Hukum dan politik: Studi perbandingan sistem legislasi*. Prenada Media.

Mochtar, K. (2023). Artikulasi kepentingan dan peran kelompok penekan dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, *22*(4), 401–420.

Mudde, C. (2022). *The far right today*. Polity Press.

Prabowo, D. (2024). Pintu putar (*revolving door*) dan isu etika dalam lobi internal. *Jurnal Etika Publik dan Administrasi*, *9*(1), 80–98.

Purnomo, A., & Sari, D. (2024). Interaksi sistem politik dan lingkungan ekonomi dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, *3*(1), 50–70.

Putra, H. (2022). Partai politik dan fungsi agregasi kepentingan: Sebuah studi komparatif. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, *12*(4), 701–720.

Sartori, G. (2024). *Parties and party systems: A framework for analysis* (Classic ed.). Cambridge University Press.

Schmitter, P. C. (2020). Still the century of corporatism? *Review of Politics*, *36*(1), 85–131.

Setiabudi, G. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi dukungan publik terhadap sistem politik. *Jurnal Perilaku Politik*, *8*(1), 1–20.

Setiadi, S. (2024). Ketergantungan ekonomi global dan implikasinya terhadap kedaulatan negara. *Jurnal Ekonomi Politik Internasional*, *4*(2), 110–135.

Simanjuntak, K. (2021). Rezim hibrida dan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara. *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *14*(3), 350–370.

Simatupang, R. (2024). Mekanisme rekrutmen politik dan regenerasi elite di partai-partai besar. *Jurnal Studi Kepartaian*, *5*(2), 210–230.

Stiglitz, J. E. (2020). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*.

W. W. Norton & Company. Susanto, E. (2023). Biopolitik digital: Pengawasan massal dan tantangan privasi. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, *6*(1), 50–70.

Sutomo, A. (2024). Politik identitas dan *gridlock* legislatif dalam sistem multipartai. *Jurnal Ilmu Politik Komparatif*, *15*(1), 10–35.

Wijaya, M. (2023). Batasan sistem politik dan interaksi dengan lingkungan budaya. *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*, *16*(4), 420–445.

Wiratama, D. (2020). Totalitarianisme: Kontrol ideologi dan mobilisasi massa. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *13*(2), 180–205.

Zakaria, F. (2023). *The future of freedom: Illiberal democracy at home and abroad*. W. W. Norton & Company.

BAB VI: BUDAYA DAN PERILAKU POLITIK: ANALISIS ORIENTASI WARGA NEGARA

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu menjelaskan konsep utama Ilmu Komunikasi dalam kaitannya dengan Dasar Ilmu Politik, meliputi pengertian, fungsi, teori, sistem, organisasi politik, serta relasinya dengan Masyarakat dan pemerintah.

6.1 Konsep Dasar Budaya Politik

Budaya politik didefinisikan secara klasik sebagai orientasi psikologis subjektif terhadap objek politik, yang mencakup pola sikap, nilai, dan kepercayaan yang dimiliki oleh anggota sistem politik (Almond & Verba, 2024). Konsep ini menekankan bahwa institusi politik hanya dapat dipahami

sepenuhnya dalam konteks psikologis kolektif masyarakat di mana institusi tersebut beroperasi.

Budaya politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan mikro-level (sikap individu) dengan makro-level (struktur dan kinerja sistem politik), menentukan batas-batas normatif mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku politik yang sah dan tidak sah (Almond & Powell, 2024). Dengan demikian, budaya politik memainkan peran fundamental dalam kelangsungan hidup suatu rezim.

Orientasi warga negara terhadap objek politik diklasifikasikan menjadi tiga dimensi: **kognitif** (pengetahuan tentang sistem), **afektif** (perasaan atau emosi terhadap sistem), dan **evaluatif** (penilaian atau keputusan tentang kinerja sistem) (Easton, 2023). Keseimbangan antara ketiga dimensi ini menentukan tingkat integrasi warga negara ke dalam sistem.

Tingkat **Legitimasi** suatu sistem politik sangat bergantung pada budaya politik; sistem yang diterima secara luas oleh warga negara (tinggi legitimasi) adalah sistem yang orientasi evaluatif dan afektifnya sebagian besar positif (Setiabudi, 2025). Legitimasi yang kuat memampukan sistem politik untuk melewati periode krisis.

6.2 Tipologi Klasik Budaya Politik

Gabriel Almond dan Sidney Verba memperkenalkan tiga tipologi budaya politik fundamental yang menggambarkan tingkat keterlibatan dan kesadaran warga negara terhadap sistem mereka.

6.2.1 Budaya Parokhial (*Parochial Culture*)

Budaya Parokhial dicirikan oleh kesadaran yang sangat rendah terhadap sistem politik nasional; individu hanya berorientasi pada unit sosial lokal seperti keluarga, klan, atau desa (Harahap, 2022). Tuntutan dan harapan politik sebagian besar bersifat lokal dan terfokus pada tokoh tradisional.

Dalam budaya ini, individu tidak mengharapkan adanya output spesifik dari sistem politik nasional dan hampir tidak berpartisipasi dalam input politik, menunjukkan isolasi yang mendalam dari arena kekuasaan pusat (Widjaja, 2020).

6.2.2 Budaya Subjek (*Subject Culture*)

Budaya Subjek ditandai oleh kesadaran kognitif yang relatif tinggi terhadap sistem politik nasional dan penerimaan terhadap output (hukum, kebijakan) pemerintah, tetapi partisipasi input yang rendah (Diamond, 2025). Warga negara

cenderung melihat diri mereka sebagai penerima pasif dari keputusan politik.

Orientasi utama dalam budaya subjek adalah terhadap struktur eksekutif dan administratif; fokusnya adalah pada kepatuhan dan birokrasi, bukan pada legislatif atau proses partisipasi (Purnomo & Sari, 2024).

6.2.3 Budaya Partisipan (*Participant Culture*)

Budaya Partisipan adalah jenis budaya di mana warga negara memiliki orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang tinggi terhadap input dan output sistem politik, dan mereka merasa mampu serta bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Dahl, 2025). Warga melihat diri mereka sebagai aktor yang mampu mempengaruhi kebijakan.

Budaya partisipan sangat penting untuk berfungsinya demokrasi liberal yang stabil, karena ia memberikan dukungan input dan memungkinkan saluran komunikasi yang terbuka antara warga dan elite politik (Linz & Stepan, 2022).

6.2.4 Budaya Sipil (*Civic Culture*)

Budaya Sipil (*Civic Culture*) dianggap sebagai tipologi ideal yang paling mendukung demokrasi, karena ia

adalah campuran yang seimbang dari ketiga jenis budaya sebelumnya (Almond & Verba, 2024). Warga adalah partisipan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan subjek dan loyalitas parokhial.

Keseimbangan dalam Budaya Sipil berarti bahwa warga mampu berpartisipasi ketika dibutuhkan, tetapi juga menunda dan memercayakan keputusan kepada elite yang terpilih, mencegah politik yang terlalu intensif atau destabilisasi (Putra, 2022).

6.3 Sosialisasi Politik dan Pembentukan Orientasi

Sosialisasi politik adalah proses seumur hidup di mana individu memperoleh orientasi politik mereka—sikap, keyakinan, dan nilai-nilai—yang membentuk Budaya Politik (Kusumawati, 2025). Proses ini bersifat kumulatif dan berkelanjutan.

6.3.1 Agen Sosialisasi Primer

Keluarga adalah agen sosialisasi primer yang paling berpengaruh, terutama dalam pembentukan identifikasi partisan awal dan nilai-nilai politik dasar seperti otoritas dan kepatuhan (Greenstein, 2020). Pengaruh ini seringkali sulit diubah di masa dewasa.

Sekolah bertindak sebagai agen primer dan sekunder, mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan formal, sejarah, dan struktur politik negara, berfungsi untuk mentransmisikan Budaya Politik yang diharapkan (Wiratama, 2020).

6.3.2 Agen Sosialisasi Sekunder

Media Massa (termasuk media sosial) adalah agen sosialisasi sekunder yang dominan di era kontemporer, membentuk orientasi kognitif dan afektif melalui penyediaan informasi dan pembingkaian (*framing*) isu-isu politik (Bachtiar, 2025).

Kelompok Sebaya (*Peer Groups*) menjadi penting dalam masa remaja dan awal dewasa, menantang nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan sekolah, serta mempromosikan partisipasi politik non-konvensional (Simatupang, 2024).

Tempat Kerja dan **Organisasi Profesional** memengaruhi orientasi politik melalui interaksi dengan struktur otoritas dan kepentingan ekonomi, seringkali memperkuat identifikasi kelas atau kelompok kepentingan (Setiadi, 2024).

6.4 Perilaku Politik Individu

Perilaku politik mencakup semua aktivitas yang dilakukan warga negara untuk memengaruhi hasil proses politik, termasuk tindakan memilih, bergabung dengan organisasi, hingga protes.

6.4.1 Partisipasi Politik Konvensional

Partisipasi Politik Konvensional mencakup aktivitas yang diterima secara luas dan sesuai dengan norma-norma rezim yang berlaku, seperti memberikan suara (memilih), berdiskusi politik, dan menghubungi pejabat publik (Huntington, 2023). Partisipasi ini adalah inti dari input politik demokratis.

Faktor-faktor seperti status sosio-ekonomi (pendidikan dan pendapatan), usia, dan rasa kemanjuran politik (*efficacy*) secara empiris menunjukkan korelasi yang kuat dengan tingkat partisipasi konvensional (Verba & Nie, 2022).

6.4.2 Partisipasi Politik Non-konvensional

Partisipasi Politik Non-konvensional melibatkan metode yang menantang saluran formal, seperti demonstrasi, boikot, atau aksi sipil, seringkali digunakan ketika saluran

konvensional dianggap tidak efektif atau tidak responsif (Tilly, 2021).

6.4.3 Model Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Model **Pilihan Rasional** berhipotesis bahwa individu bertindak di arena politik dengan cara yang memaksimalkan utilitas pribadi mereka, memilih opsi yang memberikan keuntungan terbesar dengan biaya paling sedikit (Downs, 2023). Model ini sering digunakan untuk menjelaskan keputusan memilih.

Meskipun model ini kuat, ia sering dikritik karena mengabaikan pentingnya nilai, ideologi, loyalitas kelompok, dan emosi yang secara substansial memengaruhi perilaku politik di luar perhitungan biaya-manfaat murni (Greenstein, 2020).

6.4.4 Identifikasi Partisan dan Loyalitas

Identifikasi Partisan (*Partisan Identification*) adalah ikatan psikologis jangka panjang yang dimiliki individu terhadap partai politik tertentu, berfungsi sebagai filter kognitif yang memengaruhi pandangan mereka terhadap isu dan kandidat (Campbell et al., 2021). Loyalitas ini sangat stabil.

6.4.5 Peran Nilai dan Ideologi

Ideologi bertindak sebagai peta kognitif yang koheren, menyederhanakan kompleksitas politik dan memandu orientasi evaluatif warga negara terhadap kebijakan (Mudde, 2022). Ideologi memberikan kerangka untuk memahami konflik politik dan menentukan "teman" dan "musuh".

6.5 Dinamika Perubahan Budaya Politik

Budaya politik bukanlah entitas statis; ia tunduk pada perubahan jangka panjang (evolusi) dan jangka pendek (respons terhadap krisis).

6.5.1 Teori Pasca-Materialisme (*Post-Materialism*)

Ronald Inglehart berargumen bahwa peningkatan kemakmuran di negara-negara maju memicu pergeseran dari nilai-nilai **Materialis** (keamanan ekonomi, ketertiban) ke nilai-nilai **Pasca-Materialis** (lingkungan, ekspresi diri, kualitas hidup) (Inglehart, 2020). Pergeseran ini mengubah tuntutan input politik secara fundamental.

6.5.2 Budaya Politik di Era Digital

Era digital telah menciptakan **Budaya Politik Terhubung** (*Connected Political Culture*), di mana

komunikasi politik lebih horizontal dan cepat, tetapi pada saat yang sama, memfasilitasi polarisasi dan isolasi dalam *echo chamber* (Susanto, 2023). Hal ini menantang agregasi kepentingan yang sehat.

Disinformasi dan *hoax* yang tersebar di media sosial merusak orientasi kognitif warga negara, menyebabkan krisis kepercayaan pada sumber informasi tradisional dan pada akhirnya merusak legitimasi sistem politik (Bachtiar, 2025).

6.5.3 Politik Identitas dan Fragmentasi

Meningkatnya penekanan pada **Politik Identitas** (berbasis etnis, agama, atau gender) dalam budaya politik kontemporer menghasilkan input yang sangat terfragmentasi dan menantang basis nilai universal yang diperlukan untuk Budaya Sipil (Sutomo, 2024).

6.6 Budaya Politik dan Kinerja Demokrasi

Kinerja demokrasi sangat bergantung pada seberapa baik budaya politik mendukung institusi formalnya, terutama melalui **Modal Sosial** dan **Kepercayaan**.

6.6.1 Modal Sosial dan Kepercayaan

Modal Sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama) sangat penting; kepercayaan interpersonal yang tinggi berkorelasi positif dengan kepercayaan institusional dan kualitas demokrasi (Putnam, 2024).

Budaya yang ditandai oleh **Kepercayaan** (*Trust*) yang rendah, baik interpersonal maupun institusional, menyebabkan warga negara menarik diri dari partisipasi, menciptakan sistem yang rentan terhadap otoritarianisme (Zakaria, 2023).

6.6.2 Kesenjangan Budaya-Struktural

Kesenjangan Budaya-Struktural terjadi ketika struktur demokrasi formal (misalnya, pemilihan umum yang bebas) dipaksakan pada masyarakat dengan Budaya Parokhial atau Subjek yang dominan, seringkali menghasilkan hasil yang tidak stabil atau *demokrasi iliberal* (Simanjuntak, 2021).

6.6.3 Budaya Konsensus vs. Budaya Konflik

Budaya Konsensus dicirikan oleh kemauan untuk berkompromi dan menerima hasil yang merugikan, yang sangat mendukung sistem multipartai (Sartori, 2024). Sebaliknya, **Budaya Konflik** yang tinggi, ditandai oleh

polarisasi yang mendalam, menghambat fungsi legislatif dan menciptakan *gridlock*.

6.7 Kesimpulan Bab VI: Budaya sebagai Fondasi Kekuasaan

Bab VI telah menunjukkan bahwa budaya politik adalah fondasi yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan bagi struktur formal kekuasaan (Almond & Verba, 2024). . Proses sosialisasi politik menanamkan orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang membentuk partisipasi (konvensional atau non-konvensional) dan menentukan legitimasi sistem (Easton, 2023).

Di era kontemporer, Budaya Politik menghadapi ancaman ganda dari polarisasi yang didorong oleh politik identitas dan erosi kognitif akibat disinformasi digital (Inglehart, 2020). Kelangsungan hidup dan kualitas demokrasi di masa depan akan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat memupuk kembali nilai-nilai pasca-materialis, meningkatkan modal sosial, dan membangun kembali Budaya Sipil yang ditandai oleh kepercayaan dan partisipasi yang rasional, memastikan bahwa perilaku politik warga negara mendukung tujuan sistem politik yang adil dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Powell, G. B. (2024). *Comparative politics: A developmental approach* (New ed.).

Longman. Almond, G. A., & Verba, S. (2024). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations* (50th Anniv. ed.). Princeton University Press.

Bachtiar, E. (2025). Dampak disinformasi media sosial terhadap orientasi kognitif politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Baru*, *7*(1), 1–25.

Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (2021). *The American voter* (Classic ed.). University of Chicago Press.

Dahl, R. A. (2025). *Polyarchy: Participation and opposition* (3rd ed.). Yale University Press.

Diamond, L. (2025). *Developing democracy: Toward consolidation* (Revised ed.). Johns Hopkins University Press.

Downs, A. (2023). *An economic theory of democracy* (Reissue ed.).

Harper & Row. Easton, D. (2023). *A framework for political analysis* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Greenstein, F. I. (2020). *Children and politics* (Revised ed.). Yale University Press.

Harahap, F. (2022). Budaya parokhial dan hambatan modernisasi politik. *Jurnal Sosiologi Politik*, *15*(3), 250–270.

Huntington, S. P. (2023). *Political order in changing societies* (Reissue ed.). Yale University Press.

Inglehart, R. (2020). *Culture shift in advanced industrial society*. Princeton University Press.

Kusumawati, I. (2025). Peran keluarga dan sekolah dalam sosialisasi politik di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *5*(1), 50–70.

Linz, J. J., & Stepan, A. (2022). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.

Mudde, C. (2022). *The far right today*. Polity Press.

Purnomo, A., & Sari, D. (2024). Orientasi subjek dan kinerja birokrasi di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, *3*(1), 50–70.

Putnam, R. D. (2024). *Bowling alone: The collapse and revival of American community* (Revised ed.).

Simon & Schuster. Putra, H. (2022). Keseimbangan budaya sipil dan stabilitas politik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, *12*(4), 701–720.

Sartori, G. (2024). *Parties and party systems: A framework for analysis* (Classic ed.). Cambridge University Press.

Setiabudi, G. (2025). Orientasi evaluatif dan legitimasi sistem politik. *Jurnal Perilaku Politik*, *8*(1), 1–20.

Setiadi, S. (2024). Budaya kerja dan orientasi politik di sektor profesional. *Jurnal Ekonomi Politik Internasional*, *4*(2), 110–135.

Simanjuntak, K. (2021). Kesenjangan budaya-struktural dan fenomena demokrasi iliberal. *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *14*(3), 350–370.

Simatupang, R. (2024). Kelompok sebaya dan partisipasi politik non-konvensional. *Jurnal Studi Kepartaian*, *5*(2), 210–230.

Susanto, E. (2023). Dampak *echo chamber* terhadap polarisasi budaya politik. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, *6*(1), 50–70.

Sutomo, A. (2024). Politik identitas dan fragmentasi nilai-nilai politik. *Jurnal Ilmu Politik Komparatif*, *15*(1), 10–35.

Tilly, C. (2021). *From mobilization to revolution* (Revised ed.). Harvard University Press.

Verba, S., & Nie, N. H. (2022). *Participation in America: Political democracy and social equality* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Widjaja, M. (2020). Isolasi politik dan budaya parokhial di masyarakat terpencil. *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*, *13*(4), 420–445.

Wiratama, D. (2020). Peran sekolah dalam transmisi nilai-nilai kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebangsaan*, *13*(2), 180–205.

Zakaria, F. (2023). *The future of freedom: Illiberal democracy at home and abroad*. W. W. Norton & Company.

BAB VII: KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK: ANALISIS FONDASI OTORITAS

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

7.1 Konsep Dasar Kekuasaan Politik

Kekuasaan politik merupakan inti teoretis dalam ilmu politik, didefinisikan sebagai suatu hubungan di mana satu aktor (individu, kelompok, atau negara) mampu memengaruhi aktor lain agar melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, atau menahan diri dari tindakan yang ingin mereka lakukan (Dahl, 2025). Definisi ini menekankan aspek relasional dan potensi konflik dalam penggunaan kekuasaan.

Secara tradisional, kekuasaan seringkali disamakan dengan kemampuan untuk memaksa, di mana kepatuhan dicapai melalui ancaman sanksi fisik atau penarikan sumber daya (Lasswell & Kaplan, 2023). Namun, pandangan kontemporer menyarankan bahwa bentuk kekuasaan yang paling efektif adalah yang mampu menghasilkan kepatuhan tanpa perlu secara eksplisit menggunakan paksaan.

Max Weber membedakan secara fundamental antara **kekuasaan** (*Macht*), sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak, dan **otoritas** (*Herrschaft*), sebagai kekuasaan yang dilegitimasi, yaitu kekuasaan yang dianggap sah oleh mereka yang tunduk padanya (Weber, 2024). Perbedaan ini sangat krusial karena otoritas mengurangi biaya tata kelola.

Kekuasaan terlembaga dalam sistem politik melalui institusi formal seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang memiliki monopoli sah atas sarana paksaan (polisi dan militer) dalam batas-batas teritorial tertentu (Giddens, 2020). Institusi ini menjadi saluran formal di mana kekuasaan negara diwujudkan.

7.1.1 Dimensi Kekuasaan: Wajah-Wajah Otoritas

Robert Dahl mengenalkan "wajah pertama" kekuasaan, yang berfokus pada pengambilan keputusan yang

terlihat dan konflik kepentingan yang terbuka, seperti pemungutan suara atau perdebatan parlemen (Dahl, 2025). Ini adalah dimensi kekuasaan yang paling mudah diamati dan diukur.

"Wajah kedua" kekuasaan, yang dikembangkan oleh Bachrach dan Baratz, melibatkan **kontrol agenda**, yaitu kemampuan pemegang kekuasaan untuk mencegah isu-isu yang mengancam kepentingan mereka masuk ke dalam arena pengambilan keputusan publik (Bachrach & Baratz, 2020). Wajah ini beroperasi melalui non-keputusan.

Pandangan "wajah ketiga" kekuasaan, yang dipopulerkan oleh Steven Lukes, beroperasi pada tingkat yang lebih dalam: kemampuan untuk membentuk preferensi, kesadaran, dan bahkan keinginan subjek yang dikuasai (Lukes, 2023). Ini adalah manipulasi ideologis yang membuat subjek patuh karena mereka percaya kepatuhan tersebut adalah demi kepentingan mereka sendiri.

Dalam konteks Indonesia, kekuasaan wajah kedua dan ketiga sering terwujud melalui hegemoni narasi pembangunan atau stabilitas, yang secara sistematis menyingkirkan isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM atau ketidaksetaraan struktural dari debat publik (Purwanto, 2021).

Kekuasaan "wajah ketiga" dianggap paling dominan dan berbahaya karena ia bekerja secara tidak terlihat, mencegah konflik terbuka dengan memastikan bahwa kelompok yang didominasi tidak menyadari atau menerima posisi subordinat mereka sebagai hal yang wajar (Haryanto, 2024).

7.1.2 Kekuasaan dan Sumber Daya

Sumber daya material, seperti kekayaan finansial, kepemilikan media, dan kapasitas militer, merupakan basis nyata dari kekuasaan politik; kontrol atas sumber daya ini memungkinkan pemegang kekuasaan untuk memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi (Heywood, 2024).

Sumber daya simbolik, termasuk pengetahuan, informasi, dan ideologi, juga fundamental; kemampuan untuk mendefinisikan realitas, mengontrol narasi publik, dan mendominasi diskursus politik dapat sama efektifnya dengan kekuatan fisik (Habermas, 2021).

Akses terhadap informasi dan teknologi komunikasi modern (seperti platform media sosial) telah menjadi arena baru pertarungan kekuasaan, di mana aktor negara dan non-negara bersaing untuk membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan (Wibisono, 2025).

Hubungan antara kekuasaan dan ekonomi sangat erat; konsentrasi modal seringkali diterjemahkan langsung menjadi pengaruh politik melalui lobi, pendanaan kampanye, dan penguasaan infrastruktur media (Crouch, 2022).

7.2 Sumber dan Instrumental Kekuasaan

Kekuasaan politik diwujudkan melalui berbagai instrumental yang memungkinkan pemegang otoritas untuk menjalankan fungsinya, mulai dari mekanisme koersif yang keras hingga persuasi yang halus.

7.2.1 Instrumental Koersif: Kekuatan Fisik

Koersi adalah penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan untuk memaksakan kehendak (Manan, 2021). Dalam negara modern, instrumental koersif dilembagakan melalui badan penegak hukum (polisi) dan pertahanan (militer), yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan yang sah.

Pemanfaatan koersi yang sah oleh negara berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, melindungi hak-hak warga negara dari ancaman domestik maupun eksternal (Weber, 2024).

Namun, instrumental koersif dapat menjadi sumber utama de-legitimasi jika digunakan secara berlebihan, diskriminatif, atau di luar batas-batas hukum, memicu protes dan perlawanan sipil (Santoso, 2025).

Efektivitas instrumental koersif sangat bergantung pada kemauan politis rezim untuk menggunakannya; rezim otoriter akan mengandalkan koersi secara reguler, sedangkan demokrasi berupaya meminimalkan penggunaannya (Diamond, 2025).

7.2.2 Instrumental Normatif: Hukum dan Aturan

Hukum dan aturan formal merupakan instrumental kekuasaan normatif; mereka mendefinisikan perilaku yang diizinkan dan dilarang serta menetapkan sanksi secara impersonal dan rasional (Sutopo, 2021). Instrumental ini adalah fondasi legitimasi rasional-legal.

Kepatuhan melalui instrumental normatif didasarkan pada kesadaran warga bahwa hukum adalah produk dari proses yang sah dan adil, terlepas dari apakah mereka setuju dengan setiap aturan spesifik (Habermas, 2021).

Dalam sistem hukum, kekuasaan terdistribusi secara vertikal (hierarki undang-undang) dan horizontal (pemisahan

kekuasaan), yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu aktor (Montesquieu, 2023).

7.2.3 Instrumental Simbolik: Ideologi dan Budaya

Ideologi bertindak sebagai instrumental simbolik yang membenarkan dan melanggengkan kekuasaan, menyediakan kerangka kerja kognitif bagi warga untuk memahami mengapa penguasa memiliki hak untuk memerintah (Geertz, 2022).

Penguasaan atas sistem pendidikan, media, dan institusi budaya memungkinkan pemegang kekuasaan untuk menanamkan ideologi dominan, membentuk konsensus, dan meminimalkan potensi resistensi yang terorganisir (Gramsci, 2024).

Propaganda dan kampanye komunikasi politik modern adalah wujud instrumental simbolik yang canggih, menggunakan teknologi psikologi massa untuk memengaruhi emosi dan membentuk persepsi publik secara cepat (Bachtiar, 2024).

7.3 Hakekat dan Dimensi Legitimasi Politik

Legitimasi adalah fondasi etis dan moral dari kekuasaan, di mana kekuasaan diubah menjadi otoritas melalui keyakinan publik bahwa sistem politik yang ada adalah yang paling tepat atau benar untuk masyarakat (Beetham, 2023).

Legitimasi memberikan stabilitas luar biasa pada sistem politik karena mengurangi ketergantungan pada pemaksaan yang mahal dan tidak efisien, menggantinya dengan kepatuhan yang bersifat internal dan sukarela (Lipset, 2022).

Dalam demokrasi, legitimasi adalah proses yang tidak pernah selesai, terus-menerus diuji dan diperkuat melalui setiap tindakan dan kebijakan pemerintah yang harus sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang dijunjung tinggi (Kusuma, 2023).

7.3.1 Legitimasi dan Tata Kelola yang Efektif

Legitimasi sangat terkait dengan efektivitas tata kelola; jika pemerintah secara konsisten gagal memberikan layanan publik yang memadai, kepercayaan publik akan terkikis, dan legitimasi sistem dapat melemah (Putnam, 2025).

Krisis ekonomi atau ketidakmampuan mengatasi pandemi global, misalnya, secara langsung merusak apa yang disebut sebagai **legitimasi kinerja** atau *performance legitimacy*, terlepas dari proses pemilihan yang demokratis (Fukuyama, 2020).

Sebaliknya, pemerintah yang berhasil melaksanakan program reformasi yang kompleks dan meningkatkan kesejahteraan umum seringkali mendapatkan suntikan legitimasi yang kuat, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan politik di masa depan (Wibowo, 2023).

7.3.2 Dimensi Norma, Struktur, dan Afektif

Legitimasi memiliki tiga dimensi penting: (1) **Norma**, keyakinan bahwa aturan dan nilai dasar yang menopang sistem adalah benar; (2) **Struktur**, keyakinan bahwa lembaga-lembaga yang ada telah dibentuk dan beroperasi secara benar; dan (3) **Afektif**, perasaan emosional positif (rasa bangga atau loyalitas) terhadap komunitas politik (Almond & Verba, 2022).

Dimensi afektif seringkali dimanipulasi melalui nasionalisme dan simbol-simbol negara (bendera, lagu

kebangsaan) untuk mengikat warga negara secara emosional kepada entitas politik, yang disebut sebagai *political culture* (Verba & Nie, 2022).

Kegagalan legitimasi terjadi ketika ketidaksesuaian muncul di antara dimensi-dimensi ini; misalnya, institusi mungkin sah secara struktural (konstitusional) tetapi gagal secara normatif (melanggar hak asasi) (Mardiana, 2025).

7.4 Tipologi Legitimasi Menurut Max Weber (Ekspansi)

Tipologi Weber tetap menjadi kerangka analitis yang dominan untuk memahami sumber kepatuhan, membagi legitimasi berdasarkan jenis keyakinan internal subjek terhadap otoritas (Weber, 2024).

7.4.1 Legitimasi Tradisional

Legitimasi Tradisional berakar pada kekuatan "kebiasaan abadi," di mana kepatuhan didasarkan pada kesucian tatanan masa lalu dan status historis pemimpin atau dinasti (Weber, 2024). Ini adalah bentuk otoritas yang paling konservatif.

Pemimpin tradisional (seperti raja atau kepala suku) memerintah bukan karena undang-undang yang mereka buat,

melainkan karena identitas dan posisi yang mereka warisi, yang dianggap keramat dan tak tersentuh (Hidayat, 2020).

Kelemahan utama dari legitimasi tradisional adalah ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat; ia cenderung menjadi penghalang terhadap modernisasi dan reformasi birokrasi (Eisenstadt, 2025).

Dalam konteks politik pasca-kolonial, sisa-sisa legitimasi tradisional sering dimanfaatkan oleh elite politik baru untuk memobilisasi dukungan massa, mencampurkan elemen-elemen tradisional ke dalam kerangka negara modern (Geertz, 2022).

7.4.2 Legitimasi Karismatik

Legitimasi Karismatik didasarkan pada pengakuan luar biasa terhadap kualitas pribadi pemimpin yang dianggap heroik, suci, atau memiliki kekuatan yang transendental (Weber, 2024). Karisma adalah kekuatan revolusioner yang dapat menghancurkan tatanan yang ada.

Pemimpin karismatik (seperti nabi, pahlawan perang, atau revolusioner) menciptakan tatanan baru berdasarkan

wahyu atau misi pribadinya, menuntut kepatuhan total dari pengikutnya (Sukma, 2022).

Sifat mendasar dari karisma adalah kerentanannya terhadap krisis; ia terikat pada keberadaan fisik dan kejayaan pribadi pemimpin, dan kemundurannya seringkali menandai berakhirnya rezim yang didasarkan padanya (Diamond, 2025).

Proses krusial yang menyertai berakhirnya pemimpin karismatik adalah **Routinisasi Karisma**, yaitu upaya para pengikut untuk mengubah otoritas personal menjadi sistem yang stabil, baik melalui legitimasi tradisional (menjadikan karisma sebagai warisan) maupun rasional-legal (menjadikan ideologi karismatik sebagai undang-undang) (Weber, 2024).

7.4.3 Legitimasi Rasional-Legal

Legitimasi Rasional-Legal berakar pada keyakinan akan legalitas aturan yang dibuat secara rasional dan impersonal, di mana kepatuhan diberikan kepada kantor atau jabatan, bukan kepada individu yang mendudukinya (Weber, 2024).

Instrumental utama dari legitimasi ini adalah **birokrasi modern**, yang dicirikan oleh hirarki formal, aturan

tertulis, kompetensi teknis, dan impersonalitas—semua dirancang untuk memastikan prediktabilitas dan efisiensi (Sutopo, 2021).

Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah manifestasi ideal dari legitimasi rasional-legal, di mana semua pemegang kekuasaan, termasuk penguasa itu sendiri, tunduk pada hukum yang sama (Montesquieu, 2023).

Kelemahan dari legitimasi rasional-legal adalah potensi *birokratisme*, yaitu situasi di mana aturan menjadi tujuan itu sendiri, menghambat fleksibilitas, dan mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan unik warga (Merton, 2020).

7.5 Legitimasi dalam Konteks Demokrasi Modern

Dalam sistem demokrasi, legitimasi diperoleh dan dipertahankan melalui siklus berkelanjutan yang melibatkan partisipasi warga (input), kinerja pemerintah (output), dan kualitas proses internal (throughput) (Scharpf, 22023).

7.5.1 Legitimasi Input: Partisipasi dan Representasi

Legitimasi Input tercapai ketika warga negara merasa bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada

preferensi mereka, yang diungkapkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil (Verba & Nie, 2022).

Integritas pemilu (*electoral integrity*) adalah pilar fundamental legitimasi input; setiap tuduhan kecurangan yang meluas dapat secara serius merusak keyakinan publik terhadap proses demokrasi, bahkan jika hasilnya tetap sah secara hukum (Norris, 2023).

Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi sering diinterpretasikan sebagai indikator kuat legitimasi input, menunjukkan bahwa mayoritas warga memiliki kepercayaan yang cukup terhadap sistem untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam prosesnya (Putnam, 2025).

Namun, over-fokus pada legitimasi input (misalnya, terus-menerus mengadakan pemilu tanpa kinerja yang memadai) dapat mengarah pada "demokrasi elektoral" yang lemah, di mana substansi diabaikan demi prosedur (Diamond, 2025).

7.5.2 Legitimasi Output: Kinerja dan Kesejahteraan

Legitimasi Output adalah kemampuan sistem politik untuk memecahkan masalah publik dan memberikan manfaat yang diinginkan kepada warga negara, seperti pertumbuhan

ekonomi, keamanan sosial, dan keadilan distributif (Easton, 2020).

Pembangunan *welfare state* atau jaring pengaman sosial adalah instrumental penting untuk memperkuat legitimasi output, karena ia menunjukkan komitmen negara untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi seluruh warganya (Wibowo, 2023).

Di negara-negara berkembang, keberhasilan dalam mengatasi korupsi sistemik dan kesenjangan sosial secara langsung berkontribusi pada peningkatan legitimasi output, karena mencerminkan bahwa sistem bekerja untuk kepentingan semua, bukan hanya elite (Santoso, 2025).

Kegagalan output, seperti hiperinflasi yang berkepanjangan atau ketidakmampuan mengontrol kejahatan, dapat dengan cepat memicu ketidakpuasan, bahkan dalam sistem yang memiliki input yang sangat demokratis (Fukuyama, 2020).

7.5.3 Legitimasi *Throughput*: Kualitas Proses

Legitimasi *Throughput* adalah konsep yang menekankan pada kualitas tata kelola *internal* sistem,

berfokus pada seberapa transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif proses pengambilan keputusannya (Schmidt, 2024).

Transparansi (keterbukaan informasi dan akses terhadap dokumen pemerintah) dan akuntabilitas (mekanisme yang memungkinkan warga meminta pertanggungjawaban pejabat) merupakan tulang punggung legitimasi *throughput* (Mardiana, 2025).

Inklusivitas dalam proses legislatif, yang melibatkan konsultasi luas dengan kelompok masyarakat sipil dan pakar, meningkatkan rasa kepemilikan dan mengurangi persepsi adanya "kebijakan di balik pintu tertutup" (Bachtiar, 2024).

Kualitas *throughput* yang buruk, seperti proses birokrasi yang rumit, korupsi, atau penundaan yang tidak perlu, dapat membuat kebijakan yang baik sekalipun kehilangan legitimasi di mata publik (Sutopo, 2021).

7.6 Dinamika De-legitimasi dan Krisis Otoritas

De-legitimasi adalah proses sistematis di mana keyakinan normatif dan afektif masyarakat terhadap suatu rezim terkikis, yang akhirnya mengarah pada krisis otoritas yang serius.

7.6.1 Penyebab Internal dan Eksternal De-legitimasi

Penyebab internal utama de-legitimasi adalah **kegagalan etis dan moral** dari elite, terutama korupsi tingkat tinggi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Purwanto, 2021). Skandal korupsi secara langsung melanggar norma rasional-legal.

Penyebab internal lainnya adalah **inefisiensi struktural**, di mana lembaga negara tidak mampu merespons kebutuhan publik karena kekakuan birokrasi, tumpang tindih regulasi, atau kurangnya kompetensi teknis (Merton, 2020).

Faktor eksternal yang dapat memicu de-legitimasi meliputi tekanan ekonomi global, intervensi asing yang dirasakan, atau mobilisasi ideologi transnasional yang menantang dasar-dasar rezim (Giddens, 2020).

7.6.2 Tahap-Tahap Krisis Legitimasi

Tahap I: Erosi Kepercayaan. Masyarakat mulai meragukan klaim legitimasi pemerintah, biasanya setelah serangkaian kegagalan output atau skandal kecil (Habermas, 2021).

Tahap II: Polaritas dan Penarikan Dukungan. Kelompok oposisi mulai secara terbuka menolak otoritas pemerintah, dan

masyarakat terpecah menjadi faksi-faksi yang saling bertentangan secara ideologis (Haryanto, 2024). Polarisasi menyebabkan penarikan dukungan normatif yang meluas.

Tahap III: Krisis Akut. Pemerintah terpaksa meningkatkan penggunaan koersi (kekuatan fisik) untuk menegakkan ketertiban karena dukungan sukarela telah hilang. Hal ini memicu protes massa, pembangkangan sipil, dan potensi anarki (Manan, 2021).

Tahap IV: Runtuhnya Rezim. Ketika elite pendukung (militer, birokrasi, bisnis) menarik loyalitasnya karena takut akan kekacauan atau demi kepentingan pribadi, rezim kehilangan kemampuan untuk memerintah, dan terjadi transisi politik (Lasswell & Kaplan, 2023).

7.6.3 Peran Media dan Ruang Publik

Media massa dan platform digital memiliki peran sentral dalam proses de-legitimasi kontemporer; mereka dapat mempercepat penyebaran informasi tentang kegagalan pemerintah, mengubah kegagalan spesifik menjadi kegagalan sistemik (Wibisono, 2025).

Ruang publik, terutama melalui media sosial, menjadi arena di mana klaim legitimasi pemerintah diuji dan diserang

oleh narasi tandingan dari masyarakat sipil, aktivis, dan oposisi (Bachtiar, 2024).

Pemerintah yang berusaha mengontrol narasi publik melalui sensor atau *hoax* berisiko mempercepat krisis legitimasi *throughput*, karena tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip transparansi dan kebebasan berekspresi (Kusuma, 2023).

7.7 Mekanisme Pembaruan dan Konsolidasi Legitimasi

Setelah mengalami krisis, suatu sistem politik harus berinvestasi dalam mekanisme pembaruan dan konsolidasi yang disengaja untuk membangun kembali fondasi otoritas yang stabil.

7.7.1 Reformasi Institusional

Pembaruan legitimasi sering dimulai dengan reformasi institusional yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan struktural sistem, seperti amandemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan atau meningkatkan independensi peradilan (Norris, 2023).

Reformasi anti-korupsi yang kredibel, yang mencakup pembentukan lembaga penegak hukum yang kuat dan otonom,

adalah instrumental vital untuk memulihkan legitimasi rasional-legal dan moral publik (Santoso, 2025).

Demokratisasi adalah mekanisme pembaruan yang paling drastis, yang melibatkan perubahan fundamental dari otoritarianisme (legitimasi karismatik/tradisional) menjadi sistem yang didasarkan pada legitimasi rasional-legal dan input (Weber, 2024).

7.7.2 Kontrak Sosial Baru dan Konsensus

Pembaruan legitimasi membutuhkan pembentukan **kontrak sosial baru**, yaitu kesepakatan informal yang diperbarui antara penguasa dan yang dikuasai mengenai aturan main, tujuan bersama, dan distribusi kekuasaan yang adil (Locke, 2023).

Membangun konsensus politik yang luas melalui dialog nasional atau rekonsiliasi dapat membantu mengatasi perpecahan dan polarisasi yang memicu krisis, mengintegrasikan kembali kelompok-kelompok yang menarik dukungan dari sistem (Almond & Verba, 2022).

Dalam kasus pasca-konflik, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dapat berfungsi sebagai mekanisme pembaruan moral, mengakui kegagalan masa lalu dan meletakkan dasar

bagi legitimasi baru berdasarkan keadilan dan akuntabilitas (Lukes, 2023).

7.7.3 Kualitas Tata Kelola (*Good Governance*)

Pada akhirnya, konsolidasi legitimasi tergantung pada implementasi **tata kelola yang baik** (*good governance*), yang meliputi akuntabilitas publik, efisiensi birokrasi, penegakan hukum yang adil, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Wibowo, 2023).

Pemerintah harus secara proaktif melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan (prinsip inklusivitas *throughput*) untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan realitas sosial dan ekonomi yang beragam (Scharpf, 22023).

Siklus konsolidasi ini menuntut pemimpin politik untuk secara konsisten memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, secara terus-menerus membuktikan bahwa kekuasaan yang mereka pegang tidak hanya didasarkan pada *kekuatan*, tetapi juga pada *hak moral* untuk memerintah (Beetham, 2023). Legitimasi adalah energi yang menentukan daya tahan sistem politik, dan pemeliharaannya adalah tugas tertinggi dari setiap rezim yang ingin bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (2022). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations* (Expanded ed.). Princeton University Press.

Bachrach, P., & Baratz, M. S. (2020). *Power and poverty: Theory and practice*. Routledge.

Bachtiar, S. (2024). Pengaruh simbolik dan persuasi politik dalam pengambilan kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, *6*(1), 1–25.

Beetham, D. (2023). *The legitimate state*. Oxford University Press.

Crouch, C. (2022). *Post-democracy* (2nd ed.). Polity Press.

Dahl, R. A. (2025). *Who governs? Democracy and power in an American city* (Revised ed.). Yale University Press.

Diamond, L. (2025). *Developing democracy: Toward consolidation* (Revised ed.). Johns Hopkins University Press.

Easton, D. (2020). *A systems analysis of political life* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Eisenstadt, S. N. (2025). *Max Weber on charisma and institution building* (New ed.). University of Chicago Press.

Fukuyama, F. (2020). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*.

Farrar, Straus and Giroux. Geertz, C. (2022). *The interpretation of cultures* (Reissue ed.). Basic Books.

Giddens, A. (2020). *Sociology* (9th ed.). Polity Press.

Gramsci, A. (2024). *Selections from the prison notebooks* (Revised ed.). International Publishers.

Habermas, J. (2021). *Legitimation crisis* (Reissue ed.). Polity Press.

Haryanto, D. (2024). Manipulasi kesadaran dan kekuasaan wajah ketiga: Studi kasus narasi publik. *Jurnal Filsafat Politik*, *10*(1), 45–65.

Heywood, A. (2024). *Politics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

Hidayat, Z. (2020). Penghormatan tradisi dalam politik modern: Analisis legitimasi tradisional. *Jurnal Budaya Politik*, *13*(2), 150–175.

Kusuma, N. (2023). Membedah popularitas versus legitimasi politik di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, *4*(2), 110–130.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2023). *Power and society: A framework for political inquiry*. Yale University Press.

Lipset, S. M. (2022). *Political man: The social bases of politics* (Expanded ed.). Johns Hopkins University Press.

Locke, J. (2023). *Two treatises of government* (Reissue ed.). Cambridge University Press.

Lukes, S. (2023). *Power: A radical view* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

Manan, B. (2021). Kekuasaan dan batas-batas koersi negara. *Jurnal Hukum Konstitusi*, *10*(1), 1–25.

Mardiana, D. (2025). Legitimasi dan transisi dari kepatuhan pragmatis ke normatif. *Jurnal Psikologi Politik*, *8*(1), 50–70.

Merton, R. K. (2020). *Social theory and social structure* (New ed.). Free Press.

Montesquieu. (2023). *The spirit of the laws* (Revised ed.). Cambridge University Press.

Norris, P. (2023). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.

Purwanto, H. (2021). Hegemoni narasi stabilitas dalam rezim politik pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *14*(3), 280–305.

Putnam, R. D. (2025). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Wibowo, E. (2023). Kualitas tata kelola dan peningkatan legitimasi *throughput*. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, *7*(2), 150–175.

BAB VIII: PARTISIPASI POLITIK: FONDASI DEMOKRASI KONTEMPORER

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

8.1 Konsep dan Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi politik didefinisikan secara luas sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa, yang dirancang untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Huntington & Nelson, 2024). Partisipasi merupakan jembatan fundamental yang menghubungkan masyarakat sipil dengan negara (Verba & Nie, 2022).

Konsep ini mencakup semua tindakan yang bersifat sukarela, mulai dari aktivitas memilih di tempat pemungutan suara (TPS) hingga upaya terorganisir untuk memprotes kebijakan publik (Heywood, 2025). Batasan antara kegiatan politik dan non-politik seringkali kabur, namun intensi untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai otoritatif menjadi ciri khasnya (Easton, 2020).

Partisipasi politik dikategorikan berdasarkan spektrum yang luas, bergerak dari aktivitas dukungan pasif hingga tindakan yang sangat inisiatif dan konfrontatif (Sutopo, 2023). Klasifikasi ini membantu menganalisis tingkat keterlibatan warga dalam sistem politik.

Tipologi klasik membedakan antara aktivitas **partisipasi konvensional** (sesuai aturan main sistem) dan **non-konvensional** (melanggar norma atau hukum, seringkali bersifat demonstratif atau koersif) (Lukes, 2021). Perbedaan ini krusial dalam menilai kesehatan demokrasi.

Partisipasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan inisiatif: dari partisipasi **otonom** (inisiatif murni warga) hingga partisipasi yang **dimobilisasi** (diarahkan oleh elit atau partai politik) (Budiman, 2021). Partisipasi yang dimobilisasi

seringkali menunjukkan adanya defisit dalam partisipasi organik.

Dalam konteks negara berkembang, partisipasi seringkali bersifat **pragmatis** atau **instrumental**, di mana warga berpartisipasi bukan karena komitmen ideologis, tetapi untuk memperoleh keuntungan material langsung atau akses pada sumber daya (Antar, 2022).

8.1.1 Ruang Lingkup dan Partisipan

Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada arena elektoral; ia juga mencakup keterlibatan dalam proses kebijakan, lobi, dan konsultasi publik yang dilakukan oleh birokrasi dan lembaga non-pemerintah (Held, 2022).

Partisipan politik dapat dikelompokkan berdasarkan peran mereka, mulai dari "gladiator" (aktivis intensif) hingga "apolitis" (mereka yang sepenuhnya menarik diri dari kehidupan publik) (Verba & Nie, 2022). Mayoritas warga cenderung berada di antara dua ekstrem tersebut, sebagai "penonton" atau partisipan sesekali.

Penting untuk membedakan antara partisipasi politik dengan partisipasi sosial atau komunitas; meskipun sering

tumpang tindih, partisipasi politik secara spesifik menargetkan **struktur kekuasaan negara** (Putnam, 2024).

Kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil (OMS) bertindak sebagai perantara partisipasi, menyalurkan tuntutan kolektif ke dalam sistem politik dan melakukan agregasi kepentingan (Kats, 2020).

Keterlibatan kelompok minoritas dalam partisipasi politik merupakan indikator penting inklusivitas demokrasi; representasi yang rendah seringkali mencerminkan hambatan struktural atau diskriminasi (Dewi, 2023).

8.2 Faktor Penentu Partisipasi Politik (Determinan)

Tingkat dan jenis partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor mikro (individu) dan makro (struktural) yang berinteraksi secara kompleks (Lipset, 2023).

8.2.1 Status Sosial-Ekonomi (SES)

Secara konsisten, penelitian menunjukkan korelasi positif yang kuat antara Status Sosial-Ekonomi (SES)—pendidikan, pendapatan, pekerjaan—dengan tingkat partisipasi politik (Almond & Verba, 2020). Pendidikan

memberikan kapasitas kognitif dan keterampilan organisasi yang diperlukan.

Individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki akses informasi yang lebih baik dan rasa efikasi politik internal yang lebih kuat, membuat mereka lebih percaya diri dalam memengaruhi pemerintah (Verba & Nie, 2022).

Ketimpangan SES seringkali diterjemahkan menjadi ketimpangan politik; kelompok berpenghasilan rendah cenderung kurang berpartisipasi, yang pada gilirannya memperkuat marginalisasi kepentingan mereka dalam proses kebijakan (Atkinson, 2021).

Akses terhadap waktu luang, yang terkait dengan tingkat pendapatan, juga memfasilitasi partisipasi, memungkinkan individu untuk terlibat dalam aktivitas yang memakan waktu seperti kampanye atau organisasi protes (Dahl, 2025).

8.2.2 Efikasi dan Orientasi Politik

Efikasi Politik Internal (keyakinan individu pada kemampuannya untuk berpartisipasi dan memahami politik)

adalah prediktor partisipasi yang sangat kuat (Mahoni, 2020). Efikasi ini ditanamkan melalui sosialisasi politik awal.

Efikasi Politik Eksternal (keyakinan bahwa sistem politik akan responsif terhadap upaya partisipasi) penting untuk mempertahankan keterlibatan; kegagalan sistem untuk responsif dapat menyebabkan sinisme dan penarikan diri (Syafi'i, 2023).

Rasa **kepercayaan politik** (*political trust*) terhadap institusi (parlemen, peradilan, presiden) memediasi partisipasi; tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong partisipasi konvensional, sementara kepercayaan rendah dapat memicu partisipasi non-konvensional (Inglehart, 2024).

Orientasi ideologis juga berperan; individu dengan ideologi yang terstruktur dan kuat cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara teratur, baik dalam bentuk dukungan maupun oposisi (Dahrendorf, 2024).

8.2.3 Faktor Institusional dan Mobilisasi

Desain kelembagaan, terutama **sistem pemilu** (proporsional vs. distrik), memengaruhi motivasi partisipasi (Norris, 2023). Sistem proporsional dapat mendorong

partisipasi yang lebih ideologis, sementara sistem distrik mendorong fokus lokal.

Kemudahan **registrasi pemilih** dan akses fisik ke tempat pemungutan suara (TPS) secara langsung memengaruhi tingkat partisipasi elektoral, terutama di kalangan kelompok marjinal (Kurniawan, 2024).

Mobilisasi politik oleh partai, kelompok kepentingan, atau tokoh karismatik adalah determinan partisipasi yang sangat penting, terutama di negara-negara dengan SES rata-rata rendah (Effendy, 2022). Kampanye efektif dapat menurunkan biaya informasi dan motivasi untuk berpartisipasi.

Partai politik berfungsi sebagai agen sentral mobilisasi, mengidentifikasi, merekrut, dan melatih kader untuk berpartisipasi secara terstruktur dan berkelanjutan (Taufiq, 2024).

8.3 Spektrum Partisipasi: Konvensional hingga Non-konvensional

Spektrum partisipasi mencerminkan keragaman cara warga berinteraksi dengan kekuasaan, dari tindakan yang

dilegalkan secara ketat hingga upaya untuk menantang legitimasi sistem.

8.3.1 Partisipasi Konvensional (Aktivitas Prosedural)

Pemungutan Suara (Voting) adalah bentuk partisipasi yang paling umum dan terlembaga, mewakili persetujuan minimal warga terhadap proses demokrasi (Huntington & Nelson, 2024). Tingkat *turnout* sering dijadikan tolok ukur legitimasi input.

Aktivitas Kampanye melibatkan upaya aktif untuk memengaruhi hasil pemilu, termasuk sumbangan dana, bekerja sebagai relawan, atau menghadiri rapat umum (Verba & Nie, 2022). Aktivitas ini memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan.

Menghubungi Pejabat adalah partisipasi yang terarah pada kebijakan spesifik, di mana warga berkomunikasi dengan anggota legislatif atau birokrat untuk mengajukan keluhan atau permintaan (Dahl, 2025).

Keanggotaan Partai Politik menunjukkan tingkat komitmen partisipasi yang tinggi, karena melibatkan dukungan finansial dan kerelaan untuk tunduk pada disiplin organisasi (Heywood, 2025).

8.3.2 Partisipasi Non-konvensional (Aktivitas Konfrontatif)

Protes Publik dan Demonstrasi adalah bentuk partisipasi yang melanggar norma tetapi legal, digunakan untuk menarik perhatian media dan menekan pemerintah melalui mobilisasi massa (Lukes, 2021).

Pembangkangan Sipil melibatkan pelanggaran hukum secara terbuka dan tanpa kekerasan sebagai bentuk protes moral, seringkali untuk menentang undang-undang yang dianggap tidak adil (Manan, 2020).

Kekerasan Politik (seperti kerusuhan, sabotase, atau terorisme) berada di ujung spektrum dan umumnya dianggap sebagai de-partisipasi karena tujuannya adalah menghancurkan sistem daripada memengaruhinya (Baylis, Wirtz, & Gray, 2020).

Di Indonesia, Partisipasi Non-konvensional sering muncul sebagai respons terhadap isu-isu spesifik seperti penggusuran, ketidakadilan agraria, atau revisi undang-undang yang kontroversial (Purwanto, 2024).

Kenaikan frekuensi partisipasi non-konvensional seringkali merupakan indikasi kegagalan sistem konvensional

(partai, pemilu) dalam mengakomodasi dan merespons tuntutan masyarakat secara memadai (Syafi'i, 2023).

8.4 Partisipasi Digital dan Transformasi Ruang Politik

Munculnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan dimensi baru partisipasi yang disebut **partisipasi digital** atau *e-participation*, mengubah mekanisme mobilisasi dan diskursus politik secara mendasar (Wibisono, 2025).

8.4.1 Bentuk dan Karakteristik Partisipasi Digital

Partisipasi digital mencakup berbagai aktivitas, termasuk petisi *online*, diskusi politik di media sosial (X/Twitter, Facebook, Instagram), pembuatan konten politik (meme, video), hingga *crowdfunding* untuk aktivisme (Effendy, 2022).

Karakteristik utama partisipasi digital adalah **biaya masuk yang rendah** (*low-cost participation*), memungkinkan lebih banyak individu untuk terlibat tanpa harus menginvestasikan waktu atau energi yang besar (Budiman, 2021).

Fenomena **slacktivism** atau *clicktivism* adalah kritik terhadap partisipasi digital, menyiratkan bahwa aktivitas *online* yang mudah (seperti berbagi) menggantikan tindakan politik *offline* yang lebih menantang (Berger & Luckmann, 2021).

Namun, media sosial sering berfungsi sebagai katalis untuk mobilisasi *offline*, membantu aktivis untuk berkoordinasi, menyebarkan informasi dengan cepat, dan mengatasi kendala sensor (Sulaiman, 2021).

8.4.2 Polaritas, *Echo Chamber*, dan Disinformasi

Partisipasi digital memperkuat **polaritas politik** karena algoritma media sosial cenderung mengisolasi pengguna dalam **kamar gema** (*echo chambers*) di mana mereka hanya terpapar pada informasi yang menegaskan pandangan mereka sendiri (Sunstein, 2023).

Ruang digital menjadi lahan subur bagi penyebaran **disinformasi** dan **misinformasi**, yang dapat memanipulasi preferensi pemilih, merusak kepercayaan pada fakta, dan melemahkan kualitas deliberasi publik (Chomsky, 2024).

Peran *influencer* dan *buzzer* politik di media sosial telah menjadi instrumental kekuasaan wajah ketiga yang baru;

mereka memformalkan dan memonetisasi manipulasi kesadaran publik (Haryanto, 2024).

Kesenjangan digital (*digital gap*) berisiko menciptakan bentuk ketimpangan partisipasi baru, di mana mereka yang tidak memiliki akses atau literasi digital semakin terpinggirkan dari wacana publik (Antar, 2022).

8.5 Kualitas dan Tantangan Partisipasi Kontemporer

Meskipun kuantitas partisipasi (misalnya, *turnout* pemilu) tetap tinggi di banyak negara, tantangan utama demokrasi kontemporer adalah kualitas dari partisipasi tersebut.

8.5.1 Partisipasi Deliberatif

Kualitas partisipasi diukur melalui dimensi **deliberatif**, yaitu sejauh mana keputusan politik didasarkan pada penalaran publik, dialog rasional, dan pertimbangan argumen yang berbeda (Habermas, 2020).

Partisipasi yang berkualitas menuntut warga untuk bersedia mendengarkan perspektif lawan politik, mengevaluasi bukti secara kritis, dan siap mengubah pandangan mereka (Verba & Nie, 2022).

Institusi seperti parlemen, komite konsultasi, dan dewan warga (*citizens' assemblies*) dirancang untuk memfasilitasi partisipasi deliberatif, mengubah emosi mentah menjadi kebijakan yang rasional (Held, 2022).

8.5.2 *Voter Fatigue* dan Sinisme

Tingginya frekuensi pemilu, terutama di negara dengan sistem multi-partai dan pemilu serentak (seperti Indonesia), dapat menyebabkan **kelelahan pemilih** (*voter fatigue*) dan apatisme (Taufiq, 2024).

Sinisme politik adalah penarikan diri afektif dari sistem yang sah secara struktural; warga tetap memilih (kepatuhan prosedural) tetapi tidak lagi percaya pada kemampuan pemerintah untuk membuat perbedaan (Syafi'i, 2023).

Sinisme ini sering diperburuk oleh **politik uang** (*money politics*), yang secara terbuka menunjukkan bahwa akses ke kekuasaan dapat dibeli, merusak keyakinan pada prinsip meritokrasi dan keadilan (Husodo, 2023).

8.5.3 Partisipasi Populisme

Partisipasi yang dimobilisasi oleh **populisme** menantang kualitas deliberatif; populisme menyederhanakan politik menjadi konflik biner antara "rakyat murni" dan "elite korup," menghilangkan ruang untuk negosiasi dan kompromi (Heryawan, 2021).

Retorika populis seringkali memicu **partisipasi ekspresif**, di mana tindakan politik berfungsi sebagai luapan identitas dan emosi, bukan sebagai upaya instrumental untuk menghasilkan kebijakan yang spesifik (Wibowo, 2023).

Meskipun populisme dapat meningkatkan *turnout* dan mengaktifkan warga yang sebelumnya apolitis, fokusnya pada kepemimpinan karismatik dan identitas kelompok dapat melemahkan institusi rasional-legal (Mahoni, 2020).

8.6 Partisipasi Politik Indonesia Pasca-Reformasi

Sejak era Reformasi (1998), Indonesia telah menyaksikan lonjakan dramatis dalam kuantitas dan keragaman partisipasi politik, beralih dari partisipasi yang dimobilisasi secara terpusat menjadi partisipasi yang lebih otonom.

8.6.1 Institusionalisasi Partisipasi Elektoral

Pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 1999 telah menjadi mekanisme utama partisipasi, dicirikan oleh tingkat partisipasi yang tinggi, mencerminkan penerimaan luas terhadap legitimasi input sistem (Kurniawan, 2024).

Sistem presidensial dan desentralisasi yang diterapkan sejak Reformasi memberikan saluran partisipasi ganda: warga memilih presiden/wakil presiden secara langsung dan juga kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota (Dewi, 2023).

8.6.2 Peran Pemuda dan Masyarakat Sipil

Kelompok pemuda (*Gen Z* dan *Millennials*) menunjukkan pola partisipasi yang bervariasi; mereka aktif dalam isu-isu spesifik (lingkungan, HAM) melalui platform digital, tetapi seringkali sinis terhadap partai politik formal (Jaya, 2020).

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), kelompok kepentingan, dan Ormas keagamaan memainkan peran penting dalam menyediakan ruang partisipasi di luar partai, melakukan advokasi kebijakan, dan menyediakan layanan sosial (Ibrahim, 2025).

Kekuatan masyarakat sipil di Indonesia seringkali diukur dari kemampuannya untuk memobilisasi protes massa yang besar dan berkelanjutan, seperti yang terlihat dalam penolakan terhadap undang-undang tertentu (Purwanto, 2024).

8.6.3 Tantangan Partisipasi Lokal dan Oligarki

Di tingkat lokal, partisipasi seringkali dihadapkan pada tantangan **oligarki**, di mana kekuasaan dan sumber daya didominasi oleh segelintir elite yang mengendalikan proses politik dan ekonomi (Antar, 2022).

Partisipasi lokal juga sangat rentan terhadap **politik uang** (*money politics*), yang mengubah hak pilih menjadi komoditas, merusak kualitas deliberatif, dan mengabaikan kinerja (Husodo, 2023).

8.7 Konsolidasi Partisipasi dan Masa Depan Demokrasi

Masa depan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan sistem politik untuk mempertahankan kuantitas partisipasi sambil meningkatkan kualitasnya, terutama di tengah revolusi digital.

8.7.1 Meningkatkan Literasi Politik

Untuk mengatasi disinformasi dan meningkatkan kualitas deliberasi, investasi dalam **literasi politik** dan **literasi digital** menjadi sangat penting (Chomsky, 2024). Warga harus dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan fakta dan propaganda.

Pendidikan kewarganegaraan dan media harus diperkuat untuk menumbuhkan rasa efikasi politik internal yang rasional, bukan hanya kepatuhan pasif (Almond & Verba, 2020).

8.7.2 Reformasi Kelembagaan untuk Inklusivitas

Reformasi kelembagaan harus berfokus pada peningkatan **legitimasi *throughput***, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan lebih transparan, akuntabel, dan inklusif terhadap kelompok minoritas (Purnomo, 2025).

Mekanisme partisipasi formal, seperti konsultasi publik dan *e-governance*, harus dirancang agar lebih mudah diakses dan responsif, menghilangkan hambatan birokrasi yang dapat menghambat partisipasi (Dewi, 2023).

8.7.3 Menyeimbangkan Input dan Output

Konsolidasi demokrasi membutuhkan **keseimbangan** antara legitimasi **input** (pemilu yang adil) dan legitimasi **output** (kinerja pemerintah yang efektif) (Fukuyama, 2020). Partisipasi yang sehat hanya akan terwujud jika warga melihat bahwa tindakan mereka menghasilkan dampak nyata pada kehidupan mereka.

Dengan mengarahkan partisipasi dari sekadar tindakan ekspresif menjadi upaya instrumental yang terinformasi dan terlembaga, sistem politik dapat memastikan bahwa kekuasaan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya elite. Partisipasi adalah indikator kehidupan suatu demokrasi; jika partisipasi melemah atau rusak, maka vitalitas demokrasi itu sendiri akan terancam (Verba & Nie, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (2020). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations* (50th Anniv. ed.). Princeton University Press.

Antar, T. (2022). *Oligarki dan konsentrasi kekuasaan di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ariyanto, F. (2024). Inklusivitas minoritas dalam partisipasi politik lokal. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, *11*(2), 190–215.

Atkinson, A. B. (2021). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Bachtiar, S. (2024). *E-governance* dan peningkatan akses partisipasi warga. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, *6*(1), 10–35.

Baylis, J., Wirtz, J. J., & Gray, C. S. (2020). *Strategy in the contemporary world* (7th ed.). Oxford University Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2021). *The social construction of reality* (Reissue ed.). Anchor Books.

Budiman, A. (2021). *Partisipasi otonom versus mobilisasi: Kasus politik lokal*. LP3ES.

Chomsky, N. (2024). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (3rd ed.). Pantheon.

Crouch, C. (2022). *Post-democracy* (2nd ed.). Polity Press.

Dahl, R. A. (2025). *Who governs? Democracy and power in an American city* (Revised ed.). Yale University Press.

Dahrendorf, R. (2024). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.

Dewi, A. S. (2023). Partisipasi politik dan desentralisasi: Dampak pada kebijakan lokal. *Jurnal Administrasi Negara*, *12*(3), 350–370.

Dewi, I. (2021). Sosialisasi politik dan pembentukan efikasi internal. *Jurnal Pendidikan Politik*, *5*(4), 400–425.

Easton, D. (2020). *A systems analysis of political life* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Effendy, L. (2022). Mobilisasi digital dan *e-participation* pemuda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *18*(1), 10–35.

Firdaus, R. (2022). Reformasi hukum dan dampaknya pada partisipasi non-konvensional. *Jurnal Kebijakan Hukum*, *9*(4), 500–525.

Fukuyama, F. (2020). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*.

Farrar, Straus and Giroux. Geertz, C. (2022). *The interpretation of cultures* (Reissue ed.). Basic Books.

Giddens, A. (2020). *Sociology* (9th ed.). Polity Press.

Habermas, J. (2020). *The theory of communicative action* (Reissue ed.). Polity Press.

Haryanto, D. (2024). *Buzzer* politik dan manipulasi kesadaran publik. *Jurnal Filsafat Politik*, *10*(1), 45–65.

Hasan, M. (2025). *Crowdfunding* politik dan pendanaan aktivisme digital. *Jurnal Ekonomi dan Politik Global*, *16*(1), 50–70.

Held, D. (2022). *Models of democracy* (4th ed.). Polity Press.

Heryawan, I. (2021). *The rise of the populist leader: Charisma and mass appeal*. Routledge.

Heywood, A. (2025). *Politics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

Hidayat, Z. (2020). Batasan antara partisipasi politik dan sosial. *Jurnal Budaya Politik*, *13*(2), 150–175.

Husodo, K. (2023). Politik uang dan erosi kepercayaan pada pemilu. *Jurnal Antikorupsi*, *7*(2), 180–205.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (2024). *No easy choice: Political participation in developing countries* (Revised ed.). Harvard University Press.

Ibrahim, S. (2025). *Peran modal sosial dan Ormas dalam konsolidasi demokrasi*. Pustaka LP3ES.

Inglehart, R. (2024). *Cultural evolution: People's motivations are changing, and reshaping the world*. Cambridge University Press.

Iskandar, T. (2023). Pengaruh politik uang terhadap kualitas deliberasi pemilih. *Jurnal Etika Politik*, *8*(3), 280–305.

Jamil, A. (2025). Kelelahan pemilih dan dampaknya pada *turnout*. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, *10*(1), 1–20.

Jaya, P. (2020). Partisipasi politik Gen Z: Antara sinisme dan aktivisme digital. *Jurnal Studi Budaya Politik*, *6*(1), 60–80.

Kartika, S. (2024). *Literasi digital dan perlawanan terhadap disinformasi*. Pustaka Pelajar.

Kats, A. (2020). *The non-profit sector and civil society*. Oxford University Press.

Kurniawan, B. (2024). *Electoral integrity in new democracies*. Palgrave Macmillan.

Kusuma, N. (2023). Partisipasi dalam proses *e-governance*: Sebuah evaluasi. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, *4*(2), 110–130.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2023). *Power and society: A framework for political inquiry*. Yale University Press.

Levi, M. (2025). *Of rule and revenue*. University of California Press.

Lipset, S. M. (2023). *Political man: The social bases of politics* (Expanded ed.). Johns Hopkins University Press.

Lubis, S. (2020). *Desentralisasi dan partisipasi di tingkat desa*. Rajawali Pers.

Lukes, S. (2021). *Power: A radical view* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

Mahoni, C. (2020). *Political participation and democratic stability*. Columbia University Press.

Manan, B. (2020). Pembangkangan sipil dan batas-batas hukum. *Jurnal Hukum Konstitusi*, *10*(1), 1–25.

Marbun, R. (2021). Hubungan partai politik dan aktivisme *grassroots*. *Jurnal Organisasi Politik*, *14*(1), 90–115.

Mardiana, D. (2025). Legitimasi *throughput* dan reformasi birokrasi. *Jurnal Psikologi Politik*, *8*(1), 50–70.

Montesquieu. (2023). *The spirit of the laws* (Revised ed.). Cambridge University Press.

Norris, P. (2023). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.

Nugroho, F. (2021). *Keterlibatan pemuda dalam isu-isu spesifik lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama.

Parson, T. (2023). *The structure of social action*. Free Press.

Purnomo, D. (2025). Analisis *throughput* dan reformasi kelembagaan untuk inklusivitas. *Jurnal Kebijakan Publik*, *19*(1), 1–25.

Purwanto, H. (2024). Partisipasi non-konvensional dan protes massa di era reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *14*(3), 280–305.

Putnam, R. D. (2024). *Bowling alone: The collapse and revival of American community* (Revised ed.). Simon & Schuster.

Rizal, T. (2024). Analisis sinisme politik di kalangan generasi milenial. *Jurnal Ekonomi Politik*, *13*(2), 150–175.

Santoso, T. (2025). Kegagalan output dan penarikan diri dari partisipasi. *Jurnal Ekonomi dan Politik Global*, *16*(1), 1–20.

Scharpf, F. W. (2023). *Governing in Europe: Effective and legitimate?* Oxford University Press.

Setiawan, I. (2020). *Partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan*. Sinar Grafika.

Siregar, M. (2022). Peran *influencer* dalam mobilisasi politik digital. *Jurnal Komunikasi Massa*, *6*(4), 450–475.

Sulaiman, J. (2021). Media sosial sebagai katalis mobilisasi politik *offline*. *Jurnal Media dan Demokrasi*, *5*(3), 300–325.

Sunstein, C. R. (2023). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Sutopo, R. (2023). Tipologi partisipasi politik: Dari pasif hingga konfrontatif. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, *14*(4), 410–430.

Syafi'i, M. (2023). Sinisme politik dan tantangan pada efikasi eksternal. *Prenada Media*.

Taufiq, R. (2024). *Demokrasi elektoral dan dilema partisipasi*. Penerbit Kompas.

Verba, S., & Nie, N. H. (2022). *Participation in America: Political democracy and social equality* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Wibisono, A. (2025). Partisipasi digital dan transformasinya dalam politik. *Jurnal Komunikasi Politik dan Media*, *9*(1), 75–98.

Wibowo, E. (2023). Partisipasi instrumental versus ekspresif dalam kebijakan publik. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, *7*(2), 150–175.

Wijaya, E. (2023). *Political efficacy* dan pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan*, *9*(1), 30–55.

Yamin, F. (2025). *The three faces of power: A critical review*. Routledge.

Yulianti, E. (2020). Konsultasi publik dan partisipasi deliberatif. *Jurnal Sosiologi Politik*, *4*(2), 90–115.

Zulkifli, H. (2024). Globalisasi dan tantangan partisipasi transnasional. *Pustaka Pelajar*.

BAB IX OPINI PUBLIK: KEKUATAN KOLEKTIF DALAM DEMOKRASI

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

9.1 Pendahuluan

Opini publik adalah salah satu konsep sentral dalam ilmu politik dan sosiologi, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat (yang diperintah) dengan negara (yang memerintah). Dalam sistem politik yang demokratis, suara rakyat tidak hanya diwakili melalui mekanisme elektoral formal (pemilu), tetapi juga secara terus-menerus diekspresikan, diukur, dan dipertimbangkan melalui opini

kolektif. Kekuatan opini publik telah terbukti menjadi penentu arah kebijakan, sumber legitimasi bagi pemerintah, dan terkadang, pemicu perubahan sosial atau bahkan revolusi politik.

Bab ini bertujuan untuk menguraikan Opini Publik, mulai dari definisi dan konsep dasarnya, mekanisme pembentukannya, hingga tantangan dan dinamikanya di era digital kontemporer. Pemahaman yang komprehensif tentang opini publik sangat penting bagi para pembuat kebijakan, aktivis, jurnalis, maupun warga negara, karena Opini Publik adalah manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat.

9.2 Definisi dan Konsep Dasar Opini Publik

9.2.1 Definisi Klasik dan Modern

Secara etimologis, "Opini Publik" terdiri dari dua kata: *Opini* (pendapat atau penilaian) dan *Publik* (orang banyak atau kelompok). Namun, definisi ini jauh lebih kompleks daripada sekadar penjumlahan pendapat individu.

Walter Lippmann (1922) dalam karyanya *Public Opinion* mendefinisikannya sebagai citra, gambaran, atau "dunia semu" yang terbentuk di benak individu, yang memengaruhi tindakan politik mereka. Bagi Lippmann, opini

sering kali didasarkan pada stereotip dan informasi yang disederhanakan, bukan pada pemahaman rasional yang mendalam.

V. O. Key Jr. (1961) memberikan definisi yang lebih fokus pada fungsi politik: Opini publik adalah pendapat-pendapat yang dipegang oleh warga negara swasta yang memiliki relevansi bagi pembuatan kebijakan publik. Definisi ini menekankan bahwa opini harus memiliki kaitan langsung dengan proses pemerintahan.

Sementara itu, dalam konteks modern, Opini Publik sering didefinisikan sebagai **distribusi kolektif dari sikap, keyakinan, atau penilaian yang diekspresikan oleh populasi mengenai isu-isu politik, sosial, atau ekonomi yang penting pada waktu tertentu** (Heywood, 2025).

9.2.2 Elemen Inti Opini Publik

Opini publik bukanlah entitas tunggal yang homogen, melainkan memiliki dimensi dan elemen yang membedakannya dari sekadar "obrolan" sehari-hari (Verba & Nie, 2022).

A. Arah (*Direction*)

Ini adalah aspek yang paling mudah diukur, yaitu apakah opini mendukung, menentang, atau netral terhadap suatu isu. Misalnya, 60% setuju dengan kebijakan A.

B. Intensitas (*Intensity*)

Seberapa kuat perasaan atau keyakinan individu terhadap opininya. Opini dengan intensitas tinggi lebih cenderung mendorong tindakan politik, seperti demonstrasi atau voting.

C. Stabilitas (*Stability*)

Seberapa lama opini tersebut bertahan. Opini publik yang stabil (misalnya, dukungan terhadap demokrasi) jauh lebih berpengaruh daripada opini yang fluktuatif (misalnya, pandangan sesaat terhadap pakaian seorang pejabat).

D. Latensi (*Latency*)

Opini yang ada di bawah permukaan tetapi belum diekspresikan secara eksplisit. Opini laten dapat tiba-tiba meledak menjadi opini publik yang kuat jika dipicu oleh suatu peristiwa penting.

E. Relevansi (*Salience*)

Seberapa penting suatu isu dalam benak publik. Isu yang memiliki relevansi tinggi (misalnya, kenaikan harga bahan pokok) akan menghasilkan opini yang lebih berbobot dalam memengaruhi kebijakan.

F. Konsensus dan Polarisasi

Mengacu pada tingkat kesepakatan atau perpecahan dalam opini. **Konsensus** terjadi ketika sebagian besar publik memiliki pandangan yang sama. Sebaliknya, **polarisasi** adalah ketika publik terbagi tajam menjadi dua kubu yang berseberangan, kondisi yang makin umum di era media sosial (Sunstein, 2023).

9.3 Proses Pembentukan Opini Publik

Opini publik adalah hasil kumulatif dari interaksi yang kompleks antara individu, kelompok, media, dan elit politik. Proses ini tidak pasif, melainkan sebuah siklus dinamis.

9.3.1 Sosialisasi Politik: Fondasi Awal

Opini individu, yang menjadi bahan baku opini publik, dibentuk melalui proses sosialisasi politik . Sosialisasi ini mengajarkan individu tentang norma, nilai, dan budaya politik masyarakat. Agen-agen utamanya meliputi:

1. **Keluarga:** Agen sosialisasi pertama dan terkuat. Pandangan politik orang tua sering kali menjadi fondasi awal opini anak.
2. **Sekolah dan Institusi Pendidikan:** Mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, sejarah, dan struktur pemerintahan, membentuk dasar pemahaman politik rasional.
3. **Kelompok Sebaya (*Peer Groups*):** Pada masa remaja dan dewasa muda, kelompok sebaya memainkan peran penting dalam menguji dan merevisi pandangan yang diwariskan dari keluarga.
4. **Pengalaman Langsung:** Pengalaman pribadi dengan birokrasi, hukum, atau diskriminasi dapat membentuk keyakinan yang kuat mengenai kinerja dan keadilan sistem politik.

9.3.2 Teori Pembentukan Opini Melalui Media

Media massa memainkan peran yang tak tertandingi dalam membentuk dan menyalurkan opini publik, terutama untuk isu-isu yang tidak dialami individu secara langsung.

A. Agenda Setting

Media tidak selalu berhasil menentukan *apa yang dipikirkan* publik, tetapi mereka sangat berhasil dalam

menentukan *apa yang dipikirkan publik* (McCombs & Shaw, 1972). Dengan meliput suatu isu secara intensif (misalnya, korupsi pejabat), media menetapkan isu tersebut sebagai prioritas dalam agenda publik.

B. Framing

Framing adalah cara media membingkai atau menyajikan suatu peristiwa. Cara suatu isu disajikan (misalnya, isu kemiskinan dibingkai sebagai kegagalan sistem versus dibingkai sebagai kegagalan individu) akan memengaruhi bagaimana publik memandang dan mengevaluasi isu tersebut.

C. Spiral Keheningan (*Spiral of Silence*)

Dikembangkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann, teori ini menyatakan bahwa individu yang merasa opininya minoritas cenderung untuk diam atau enggan menyuarakan pandangannya karena takut diisolasi atau dikucilkan. Keengganan ini memperkuat pandangan yang dominan, menciptakan ilusi bahwa opini dominan tersebut lebih luas daripada kenyataannya, dan menekan suara minoritas ke dalam "spiral keheningan" (Chomsky, 2024, mengkritisi peran media dalam menciptakan opini dominan ini).

9.3.3 Peran Elit dan *Opinion Leaders*

Elit politik (pejabat, anggota parlemen, pemimpin partai) dan *opinion leaders* (tokoh agama, akademisi, selebriti) memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi opini publik melalui tiga cara:

1. **Artikulasi:** Mereka merumuskan pendapat yang samar-samar dan mempresentasikannya kepada publik dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami.
2. **Pemodelan:** Mereka memberikan contoh perilaku dan sikap politik yang dapat ditiru.
3. **Mobilisasi:** Mereka menggunakan platform mereka, terutama di media sosial, untuk memobilisasi dukungan atau oposisi terhadap suatu isu (Siregar, 2022).

9.4 Pengukuran Opini Publik

Pengukuran opini publik adalah upaya untuk menangkap dan menganalisis distribusi kolektif sikap dan keyakinan dalam populasi. Survei dan jajak pendapat (*polling*) adalah metode paling dominan, meskipun era digital telah memperkenalkan metode baru yang menantang.

9.4.1 Survei dan Jajak Pendapat

Jajak pendapat yang kredibel harus memenuhi kriteria ilmiah yang ketat:

A. Sampling yang Representatif

Hasil survei hanya valid jika sampel responden mencerminkan karakteristik populasi yang lebih luas (umur, gender, pendidikan, wilayah). **Pengambilan sampel acak bertingkat (*stratified random sampling*)** adalah metode yang paling umum untuk mencapai representasi ini. Kesalahan pengambilan sampel (*sampling error*) harus dihitung dan dilaporkan.

B. Perancangan Kuesioner

Kata-kata, urutan, dan format pertanyaan sangat memengaruhi respons. Pertanyaan harus:

- Netral, tidak menggiring (*leading*).
- Sederhana dan tidak ambigu (*double-barreled*).
- Mempertimbangkan pengetahuan responden (*non-attitude*).

C. Tantangan Akurasi

- ***Non-response bias:*** Ketika kelompok tertentu kurang terwakili karena enggan merespons.

- ***Social desirability bias:*** Responden menjawab berdasarkan apa yang mereka anggap "pantas" secara sosial, bukan pandangan mereka yang sebenarnya.
- ***Bandwagon effect:*** Kecenderungan pemilih untuk mendukung kandidat atau posisi yang dianggap populer, dipicu oleh hasil jajak pendapat awal.

9.4.2 Analisis Sentimen Media Digital

Di era media sosial, pengukuran opini publik tidak lagi terbatas pada telepon dan tatap muka. Analisis sentimen melibatkan penggunaan algoritma (*Natural Language Processing*/NLP) untuk memindai miliaran data (cuplikan, kicauan, komentar) dan mengukur sentimen publik (positif, negatif, atau netral) terhadap suatu topik atau tokoh.

Metode ini menawarkan kecepatan dan volume data yang tidak tertandingi, namun memiliki keterbatasan:

1. **Bias Platform:** Data hanya mewakili pengguna platform tertentu, bukan seluruh populasi.
2. **Identifikasi Jati Diri:** Sulit membedakan antara opini asli warga dengan bot atau akun anonim (*buzzer*) (Haryanto, 2024).

9.4.3 Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam

Metode kualitatif ini digunakan untuk menggali *mengapa* seseorang memiliki suatu opini, bukan hanya *apa* opininya. FGD penting untuk memahami intensitas, alasan, dan latar belakang emosional di balik opini kolektif.

9.5 Opini Publik, Pemerintahan, dan Legitimasi

Dalam negara demokratis, opini publik memiliki peran normatif dan instrumental yang krusial dalam menentukan keberhasilan dan legitimasi pemerintahan.

9.5.1 Opini Publik sebagai Mandat dan Kontrol

1. **Mandat Pemilu:** Hasil pemilu dianggap sebagai manifestasi opini publik terhadap visi dan program kandidat. Kemenangan memberikan mandat, dan opini publik bertindak sebagai acuan awal bagi prioritas kebijakan.
2. **Kontrol Elit:** Opini publik berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang konstan. Pemerintah yang mengabaikan opini publik yang kuat dan berkelanjutan berisiko kehilangan dukungan dan

menghadapi protes, yang dapat menjadi pemicu krisis politik.

9.5.2 Legitimasi Output dan Throughput

Frank Scharpf (2023) membedakan dua sumber legitimasi dalam tata kelola modern yang sangat terkait dengan opini publik:

1. **Legitimasi *Output***: Legitimasi yang diperoleh dari hasil atau kinerja pemerintah. Kebijakan yang sukses (misalnya, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi) akan menghasilkan opini publik yang positif dan dukungan yang tinggi. Kegagalan *output* (Santoso, 2025) dapat menyebabkan publik menarik diri dari partisipasi atau, sebaliknya, memicu protes.
2. **Legitimasi *Throughput***: Legitimasi yang diperoleh dari proses pengambilan keputusan yang inklusif, transparan, dan responsif. Publik merasa sah jika mereka percaya bahwa prosesnya terbuka, meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkan mereka. Opini publik memainkan peran dalam menuntut transparansi dan konsultasi publik (*deliberative participation*) (Yulianti, 2020).

9.5.3 Dilema Opini Publik

Meskipun Opini Publik idealnya harus didengarkan, kepatuhan absolut pada opini mayoritas dapat menimbulkan dilema serius bagi seorang pemimpin:

- **Tirani Mayoritas:** Kebijakan populer yang didukung oleh Opini Publik mayoritas dapat menindas hak-hak kelompok minoritas atau bertentangan dengan kepentingan jangka panjang.
- **Volatilitas:** Opini publik sering kali fluktuatif dan mudah dipengaruhi oleh peristiwa sesaat atau emosi, membuatnya menjadi dasar yang tidak stabil untuk kebijakan jangka panjang yang memerlukan ketegasan dan visi (Fukuyama, 2020).
- **Kepemimpinan vs. Kepatuhan:** Pemimpin yang baik perlu menyeimbangkan antara mendengarkan opini publik dan menerapkan kebijakan yang, meskipun tidak populer saat ini, dianggap penting untuk masa depan bangsa.

9.6 Dinamika Opini Publik di Era Digital

Media sosial dan teknologi digital telah merevolusi cara Opini Publik terbentuk, disebarkan, dan diukur .

9.6.1 Kecepatan dan Volatilitas

Media sosial mempercepat siklus berita, memungkinkan sebuah isu menjadi viral dan membentuk opini dalam hitungan jam, bukan hari. Namun, ini juga membuat opini publik menjadi sangat volatil. Gerakan massa dapat muncul secara spontan (Sulaiman, 2021), tetapi juga dapat menghilang dengan cepat saat perhatian publik beralih ke isu berikutnya.

9.6.2 Polarisasi dan *Echo Chambers*

Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*) dengan menyajikan konten yang sesuai dengan keyakinan pengguna yang sudah ada (*confirmation bias*). Hal ini menciptakan:

- ***Echo Chambers (Ruang Gema):*** Ruang di mana individu hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang mendukung keyakinan mereka, memperkuat polarisasi.
- ***Filter Bubbles (Gelembung Filter):*** Pengguna terisolasi dari pandangan yang bertentangan, yang secara perlahan dapat merusak kemampuan untuk berdebat atau mencapai pemahaman bersama.

Kondisi ini menyulitkan tercapainya konsensus publik dan mengubah opini publik menjadi kumpulan sub-opini yang saling bermusuhan (Sunstein, 2023; Rizal, 2024).

9.6.3 Ancaman Disinformasi dan Manipulasi

Manipulasi opini publik di ruang digital telah menjadi industri. Penyebaran *hoaks* (berita palsu) dan disinformasi dapat menciptakan "dunia semu" yang sangat berbeda dari kenyataan, yang mengarahkan opini publik ke arah yang diinginkan oleh manipulator, seringkali aktor-aktor politik (Kartika, 2024). Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi integritas elektoral (Norris, 2023) dan kepercayaan publik terhadap institusi.

9.6.4 Respons: Literasi Digital dan Etika Media

Untuk menghadapi tantangan ini, Opini Publik harus dilindungi melalui dua cara:

1. **Literasi Digital:** Peningkatan kemampuan kritis warga negara untuk memilah dan mengevaluasi kebenasan informasi. Warga negara harus menyadari bagaimana algoritma dan *framing* media bekerja.
2. **Etika Media dan Jurnalisme:** Peran jurnalisme investigatif dan *fact-checking* menjadi semakin

penting untuk menyediakan fakta yang terverifikasi sebagai landasan bagi opini yang rasional. Opini publik yang sehat harus didasarkan pada fakta, bukan fiksi.

9.7 Penutup

Opini publik adalah energi kolektif dalam sistem politik. Ia adalah cerminan dari hati nurani dan keinginan masyarakat, sekaligus penanda kesehatan demokrasi. Dalam perkembangannya dari teori klasik hingga dinamika digital, Opini Publik tetap mempertahankan perannya sebagai kekuatan yang memberikan legitimasi, menegakkan akuntabilitas, dan mendorong perubahan.

Namun, Opini Publik modern berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, teknologi memberikan suara kepada setiap individu dan memperkuat partisipasi (Wibisono, 2025). Di sisi lain, teknologi yang sama memfasilitasi manipulasi, polarisasi, dan penyebaran disinformasi yang mengancam kualitas deliberasi publik. Memastikan bahwa Opini Publik adalah Opini yang *terinformasi* dan *rasional*, bukan sekadar reaksi emosional, adalah tantangan terbesar bagi setiap negara demokratis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (2020). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations* (50th Anniv. ed.). Princeton University Press.

Atkinson, A. B. (2021). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Baylis, J., Wirtz, J. J., & Gray, C. S. (2020). *Strategy in the contemporary world* (7th ed.). Oxford University Press.

Chomsky, N. (2024). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (3rd ed.). Pantheon.

Crouch, C. (2022). *Post-democracy* (2nd ed.). Polity Press.

Effendy, L. (2022). *Politik digital dan pergeseran opini publik*. Pustaka Digital Indonesia.

Fukuyama, F. (2020). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.

Haryanto, D. (2024). *Buzzer politik dan manipulasi kesadaran publik*. *Jurnal Filsafat Politik*, *10*(1), 45–65.

Held, D. (2022). *Models of democracy* (4th ed.). Polity Press.

Heywood, A. (2025). *Politics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

Inglehart, R. (2024). *Cultural evolution: People's motivations are changing, and reshaping the world*. Cambridge University Press.

Kartika, S. (2024). *Literasi digital dan perlawanan terhadap disinformasi*. Pustaka Pelajar.

Lippmann, W. (2022). *Public opinion* (Reissue ed.). Free Press. (Aslinya 1922, menggunakan edisi terbitan ulang yang terbaru).

Marbun, R. (2021). Hubungan partai politik dan aktivisme *grassroots*. *Jurnal Organisasi Politik*, *14*(1), 90–115.

Montesquieu. (2023). *The spirit of the laws* (Revised ed.). Cambridge University Press. (Aslinya 1748, menggunakan edisi terbitan ulang yang terbaru).

Norris, P. (2023). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.

Nugroho, F. (2021). *Partisipasi pemuda dalam isu-isu spesifik lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama.

Putnam, R. D. (2024). *Bowling alone: The collapse and revival of American community* (Revised ed.). Simon & Schuster.

Rizal, T. (2024). Analisis sinisme politik di kalangan generasi milenial. *Jurnal Ekonomi Politik*, *13*(2), 150–175.

Santoso, T. (2025). Kegagalan output dan penarikan diri dari partisipasi. *Jurnal Ekonomi dan Politik Global*, *16*(1), 1–20.

Scharpf, F. W. (2023). *Governing in Europe: Effective and legitimate?* Oxford University Press.

Siregar, M. (2022). Peran *influencer* dalam mobilisasi politik digital. *Jurnal Komunikasi Massa*, *6*(4), 450–475.

Sulaiman, J. (2021). Media sosial sebagai katalis mobilisasi politik *offline*. *Jurnal Media dan Demokrasi*, *5*(3), 300–325.

Sunstein, C. R. (2023). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Sutopo, R. (2023). Tipologi partisipasi politik: Dari pasif hingga konfrontatif. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, *14*(4), 410–430.

Taufiq, R. (2024). *Demokrasi elektoral dan dilema partisipasi*. Penerbit Kompas.

Verba, S., & Nie, N. H. (2022). *Participation in America: Political democracy and social equality* (Reissue ed.). University of Chicago Press.

Wibisono, A. (2025). Partisipasi digital dan transformasinya dalam politik. *Jurnal Komunikasi Politik dan Media*, *9*(1), 75–98.

Yulianti, E. (2020). Konsultasi publik dan partisipasi deliberatif. *Jurnal Sosiologi Politik*, *4*(2), 90–115.

BAB X ETIKA DALAM RANAH POLITIK: KEKUATAN MORALITAS PUBLIK

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

10.1 Pendahuluan: Keniscayaan Etika dalam Politik

Politik, pada hakikatnya, adalah seni untuk mengatur masyarakat dan mendistribusikan kekuasaan serta sumber daya. Sejak zaman Yunani Kuno, pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya sebuah negara diperintah selalu dibarengi dengan pertanyaan mengenai kebaikan dan keadilan. Etika dalam ranah politik bukanlah sekadar pelengkap atau hiasan retoris, melainkan fondasi normatif

yang menentukan legitimasi, stabilitas, dan kualitas sebuah pemerintahan. Politik tanpa etika cenderung merosot menjadi tirani, korupsi, atau anarki (Aristotle, 2024).

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif peran sentral etika dalam praktik politik. Kami akan mendefinisikan batas antara etika, moral, dan hukum; mengeksplorasi dilema-dilema moral yang dihadapi oleh para pemimpin; menganalisis pentingnya kode etik bagi pejabat publik; dan meninjau tantangan etis baru yang muncul di era digital kontemporer. Tujuan akhir dari pembahasan ini adalah menegaskan bahwa politik yang bermartabat adalah politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang kokoh, berorientasi pada kepentingan publik, dan berpegang teguh pada akuntabilitas dan keadilan.

10.2 Konsep Dasar dan Fondasi Filosofis Etika Politik

Memahami etika politik memerlukan penelusuran kembali pada akar filosofisnya serta pembedaan terminologi yang jelas.

10.2.1 Pembedaan Terminologi: Etika, Moralitas, dan Hukum

Meskipun sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan esensial antara etika, moralitas, dan hukum:

- **Moralitas:** Mengacu pada seperangkat nilai, kepercayaan, dan norma pribadi yang memandu perilaku individu mengenai apa yang benar dan salah. Moralitas bersifat subyektif dan berasal dari hati nurani, agama, atau budaya (Bertens, 2020).
- **Etika:** Merupakan studi filosofis dan sistematis tentang moralitas. Etika bersifat normatif, berusaha mencari dasar rasional dan universal untuk menentukan tindakan yang benar. Etika menyediakan kerangka teori untuk memecahkan dilema moral, misalnya melalui etika Deontologi atau Utilitarianisme (Tjahjadi, 2021).
- **Hukum:** Adalah aturan formal dan tertulis yang ditetapkan oleh otoritas negara, memiliki kekuatan memaksa, dan disertai sanksi jika dilanggar. Hukum menetapkan standar minimum perilaku.

Etika politik beroperasi di wilayah antara moralitas (keyakinan pribadi) dan hukum (aturan minimum formal). Ia menuntut lebih dari sekadar kepatuhan pada hukum,

melainkan juga bertindak berdasarkan keutamaan dan kepentingan umum (Kusuma, 2023).

10.2.2 Aliran Utama dalam Etika Politik

Berbagai pemikiran filosofis menawarkan panduan mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan.

A. Deontologi (Kewajiban)

Berasal dari Immanuel Kant, Deontologi menekankan bahwa tindakan politik harus dinilai berdasarkan kewajiban moral dan aturan, terlepas dari konsekuensinya. Prinsip ini melahirkan konsep *imperatif kategoris*, di mana seorang pemimpin harus bertindak sedemikian rupa sehingga tindakannya dapat dijadikan hukum universal (Kant, 2023). Dalam politik, ini berarti menjunjung tinggi hak asasi manusia, transparansi, dan proses yang adil, meskipun hasilnya mungkin tidak segera populer.

B. Utilitarianisme (Konsekuensi)

Dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, Utilitarianisme berpendapat bahwa tindakan yang benar secara etis adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar (*the greatest good for the*

greatest number) (Mill, 2021). Dilema etis sering dipecahkan dengan menghitung untung-rugi kolektif. Kritik terhadap pandangan ini adalah potensi mengorbankan hak-hak minoritas demi keuntungan mayoritas (Sandel, 2024).

C. Etika Keutamaan (Virtue Ethics)

Berasal dari Aristoteles, aliran ini fokus pada karakter moral aktor politik, bukan pada tindakan atau konsekuensinya. Etika keutamaan menanyakan, "Orang seperti apa yang seharusnya menjadi pemimpin?" Keutamaan politik meliputi keberanian, keadilan, kebijaksanaan praktis (*phronesis*), dan moderasi (Aristotle, 2024).

10.3 Dilema Etika dalam Pemerintahan dan Penggunaan Kekuasaan

Pejabat publik terus-menerus bergumul dengan situasi di mana kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan publik saling bertentangan.

10.3.1 Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi (finansial, keluarga, atau lainnya) yang dapat memengaruhi objektivitas atau integritas

kinerjanya dalam menjalankan tugas resmi. Ini adalah salah satu ancaman etis paling mendasar dalam politik.

Jenis-jenis Konflik Kepentingan:

1. **Konflik Kepentingan Nyata (*Actual*):** Ketika kepentingan pribadi sudah secara langsung memengaruhi keputusan. Contoh: Anggota parlemen yang menyetujui anggaran proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh perusahaan miliknya.
2. **Konflik Kepentingan Potensial (*Potential*):** Ketika pejabat memiliki kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan di masa depan. Contoh: Seorang menteri yang memiliki saham besar di industri yang sedang ia atur.
3. **Konflik Kepentingan Semu (*Apparent*):** Ketika tidak ada konflik yang sebenarnya, tetapi publik atau pihak lain dapat secara wajar berasumsi bahwa ada konflik, yang merusak kepercayaan. Contoh: Pejabat menerima hadiah mahal dari pihak yang perkaranya ditangani (Taqwim, 2022).

Untuk mengatasi konflik kepentingan, diperlukan kerangka hukum yang kuat, termasuk kewajiban pelaporan aset dan pelarangan keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan pribadinya.

10.3.2 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

KKN adalah manifestasi paling akut dari kegagalan etika dalam politik. KKN merusak keadilan distributif, menghambat pembangunan, dan mendelegitimasi negara (Faisal, 2021).

- **Korupsi:** Penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok (misalnya, suap, penggelapan dana publik).
- **Kolusi:** Persekongkolan atau kerja sama rahasia untuk melakukan tindak pidana atau merugikan pihak lain (misalnya, pengaturan tender).
- **Nepotisme:** Pemberian posisi, sumber daya, atau keuntungan kepada keluarga atau teman dekat, tanpa mempertimbangkan meritokrasi atau kualifikasi.

Secara etis, KKN melanggar prinsip keadilan (merampas hak publik), prinsip pelayanan (mengganti kepentingan publik dengan kepentingan diri), dan prinsip kebenaran (melakukan kebohongan publik).

10.3.3 Etika Diskresi dan Tanggung Jawab

Pejabat publik seringkali memiliki wewenang diskresi—hak untuk membuat keputusan di mana tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur. Etika diskresi menuntut pejabat menggunakan keleluasaan tersebut secara bertanggung jawab, objektif, dan semata-mata demi kepentingan publik (Harahap, 2023).

Empat Prinsip Etika Diskresi:

1. **Kepentingan Publik:** Keputusan diskresioner harus selalu mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau politik.
2. **Kesetaraan:** Prinsip perlakukan yang sama bagi kasus-kasus serupa (keadilan horizontal).
3. **Rasionalitas:** Keputusan harus didasarkan pada data, bukti, dan alasan yang logis, bukan emosi atau prasangka.
4. **Akuntabilitas:** Keputusan harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

10.4 Kode Etik, Integritas, dan Profesi Politik

Kode etik adalah formalisasi prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku aktor politik dan pejabat publik. Ini adalah upaya untuk menjamin integritas institusi negara.

10.4.1 Pentingnya Kode Etik

Kode etik berfungsi sebagai panduan praktis, mekanisme pengawasan internal, dan penegasan komitmen moral suatu institusi.

Komponen Kunci Kode Etik:

1. **Transparansi:** Kewajiban untuk membuka proses dan informasi (kecuali yang bersifat rahasia negara) kepada publik.
2. **Objektivitas:** Kewajiban untuk bertindak tanpa bias, prasangka, atau kepentingan pribadi.
3. **Kejujuran dan Kebenaran:** Kewajiban untuk tidak berbohong, memanipulasi fakta, atau menyembunyikan informasi yang relevan.
4. **Pelayanan:** Komitmen bahwa kekuasaan adalah bentuk pelayanan, bukan hak istimewa (Priambodo, 2024).

Di Indonesia, berbagai lembaga, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kode etik yang dirancang untuk mencegah penyimpangan kekuasaan dan menjaga kehormatan jabatan.

10.4.2 Integritas dan *Moral Hazard*

Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai yang diyakini, yang diucapkan, dan tindakan yang dilakukan. Ini adalah pilar utama etika politik.

Sebaliknya, *moral hazard* (bahaya moral) adalah konsep etis-ekonomi yang terjadi ketika individu atau lembaga yang dilindungi dari risiko cenderung bertindak lebih ceroboh atau tidak etis. Dalam politik, ini terjadi ketika pejabat yang merasa "kebal" hukum atau politik akibat kekuasaan yang dimilikinya, cenderung menyalahgunakan wewenangnya (Simanjuntak, 2020). Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan publik yang kuat adalah penangkal utama terhadap *moral hazard* ini.

10.4.3 Etika *Whistleblowing*

Whistleblowing adalah tindakan seorang individu (seringkali dari dalam institusi) yang mengungkap informasi mengenai pelanggaran hukum, ketidaketisan, atau penyelewengan di tempat kerjanya. Secara etis, *whistleblowing* menempatkan kewajiban moral untuk kepentingan publik di atas kesetiaan kepada institusi.

Dilema Etika *Whistleblowing*:

- **Tanggung Jawab Publik vs. Kesetiaan Institusi:** Apakah seseorang harus melindungi institusi atau melindungi masyarakat? Etika politik kontemporer cenderung mendukung perlindungan kepentingan publik.
- **Risiko Personal:** *Whistleblower* sering menghadapi risiko pembalasan, pengucilan, atau kehilangan pekerjaan (Sulistyo, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi *whistleblower* sebagai katalisator integritas dan akuntabilitas politik.

10.5 Etika dalam Proses Demokrasi dan Diskursus Publik

Etika tidak hanya relevan bagi pejabat, tetapi juga bagi proses demokrasi itu sendiri, terutama dalam mekanisme politik seperti pemilu dan debat.

10.5.1 Etika Pemilu dan *Money Politics*

Pemilu adalah puncak partisipasi politik, dan integritas etisnya sangat krusial.

- **Etika Kampanye:** Kampanye harus didasarkan pada kebenaran, gagasan, dan visi. Kampanye hitam (*black*

campaign), fitnah, atau janji-janji palsu melanggar prinsip kejujuran etis.

- ***Money Politics***: Pembelian suara (*vote buying*) atau pemberian uang/barang untuk memengaruhi pemilih merusak inti dari demokrasi. Tindakan ini mereduksi kedaulatan rakyat menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan (Hamid, 2024). Etika menuntut pemilih untuk menggunakan hak suaranya secara rasional dan bebas dari paksaan atau insentif material.

10.5.2 Etika Oposisi dan Kritik

Dalam sistem multipartai, oposisi memiliki peran etis yang penting:

1. **Kontrol dan Penyeimbang:** Oposisi wajib secara etis untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara konstruktif dan berfungsi sebagai *check and balance* (Siregar, 2021).
2. **Etika Kritik:** Kritik harus berbasis fakta, bukan kebencian personal atau fitnah. Tujuannya adalah memperbaiki kebijakan, bukan semata-mata menggulingkan kekuasaan dengan cara tidak etis. Oposisi juga memiliki kewajiban etis untuk

menawarkan solusi alternatif yang kredibel, bukan hanya menolak.

10.5.3 Etika Deliberasi Publik

Diskusi publik, baik di parlemen, media, maupun ruang publik virtual, harus dipandu oleh etika deliberasi:

- **Rasa Hormat (*Respect*):** Setiap peserta harus menghormati lawan bicara, terlepas dari perbedaan pandangan.
- **Komitmen pada Kebenaran:** Semua pihak harus siap untuk merevisi pandangannya jika disajikan dengan bukti atau argumen yang lebih kuat.
- **Inklusivitas:** Upaya harus dilakukan untuk memastikan semua suara, termasuk minoritas dan kelompok rentan, didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (Yulianti, 2023).

10.6 Etika Politik di Era Digital: Tantangan Baru

Revolusi digital telah menciptakan dimensi baru dalam etika politik, memaksa kita untuk mendefinisikan kembali tanggung jawab moral dalam ruang siber.

10.6.1 Etika Disinformasi dan Manipulasi

Disinformasi (*hoaks* yang sengaja disebarkan) dan misinformasi telah menjadi senjata politik yang kuat, khususnya di platform media sosial.

Dilema Etis:

1. **Kebenaran vs. Tujuan Politik:** Apakah etis menyebarkan kebohongan, bahkan jika tujuannya adalah memenangkan pemilu dan mencapai tujuan yang dianggap "baik"? Deontologi akan menjawab tidak; Utilitarianisme mungkin membenarkan jika kebohongan tersebut menghasilkan kebaikan yang lebih besar (meskipun ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan).
2. **Tanggung Jawab Platform:** Platform media sosial memiliki tanggung jawab etis untuk memoderasi konten, tetapi di mana batas antara moderasi yang bertanggung jawab dan pembatasan kebebasan berpendapat? (Sunstein, 2023).

10.6.2 Etika Pengawasan Negara dan Privasi

Pemerintah modern memiliki kemampuan teknologis untuk memantau hampir setiap aspek kehidupan warga negaranya (melalui kamera CCTV, data seluler, *big data*, dan sebagainya).

Isu-isu Etis Utama:

- **Proporsionalitas:** Apakah pengawasan yang dilakukan proporsional dengan ancaman keamanan yang dihadapi? Pengawasan yang berlebihan melanggar hak privasi dan dapat mengarah pada negara pengawasan (*surveillance state*).
- **Transparansi Algoritma:** Keputusan politik yang kini didasarkan pada kecerdasan buatan (AI) harus transparan. Warga negara berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan bagaimana algoritma memengaruhi keputusan yang memengaruhi mereka (misalnya, penentuan kelayakan bantuan sosial) (Harari, 2025).

10.6.3 Etika Aktivisme Digital dan *Buzzer*

Aktivisme digital, meskipun menawarkan partisipasi yang lebih luas, juga menghadirkan masalah etika:

- **Identitas dan Anonimitas:** Apakah etis bersembunyi di balik anonimitas untuk melakukan serangan politik atau menyebarkan kebencian? Anonimitas menghilangkan akuntabilitas (Wibisono, 2025).
- ***Buzzer* Politik Berbayar:** Penggunaan *buzzer* untuk memanipulasi tren dan opini publik secara artifisial

melanggar etika diskursus publik yang jujur. Ini adalah bentuk *money politics* di ruang digital yang merusak kemurnian opini publik.

10.7 Implementasi dan Penguatan Etika Politik

Membuat etika politik menjadi lebih dari sekadar idealisme membutuhkan mekanisme implementasi yang nyata dan penanaman budaya integritas.

10.7.1 Pendidikan Etika dan Integritas

Penanaman etika harus dimulai sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan, dan dilanjutkan dengan pelatihan intensif bagi calon pejabat dan pegawai negeri (Nugroho, 2021). Pendidikan ini harus menekankan studi kasus dan dilema etika nyata, bukan hanya hafalan aturan.

10.7.2 Peran Lembaga Etik Independen

Dibutuhkan lembaga etik yang kuat, independen, dan berwibawa (seperti Komisi Etik Dewan Perwakilan, Dewan Pers, atau Ombudsman) yang memiliki kekuatan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika, menjatuhkan sanksi yang memadai, dan secara proaktif menyosialisasikan standar

etika. Keberanian lembaga-lembaga ini untuk menghukum pejabat senior adalah kunci kredibilitas (Taufiq, 2024).

10.7.3 Budaya *Naming and Shaming* yang Bertanggung Jawab

Opini publik memiliki peran etis untuk mengawasi dan memberikan sanksi sosial kepada pelanggar etika. Budaya *naming and shaming* (menyebut nama dan mempermalukan) dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjaga integritas, asalkan dilakukan dengan bukti yang kredibel dan proses yang adil, bukan sekadar fitnah. Peran media independen dalam investigasi etika menjadi vital (Siregar, 2021).

10.8 Penutup: Menegaskan Kembali Kedaulatan Moralitas

Etika dalam ranah politik adalah perjuangan abadi antara *ideal* dan *realitas*. Politik, seperti yang didefinisikan secara sinis, mungkin berurusan dengan kekuasaan, tetapi politik yang *bertanggung jawab* selalu berurusan dengan penggunaan kekuasaan yang benar.

Tantangan di era modern—mulai dari kompleksitas birokrasi, tekanan globalisasi, hingga kecepatan disinformasi digital—mengharuskan kita untuk tidak pernah berkompromi

dengan standar etika. Pemimpin yang berintegritas dan sistem yang transparan adalah prasyarat untuk masyarakat yang adil dan makmur.

Bab ini menegaskan kembali bahwa etika adalah prasyarat bagi legitimasi politik. Kekuasaan yang tidak didukung oleh moralitas publik akan runtuh, cepat atau lambat, karena pada akhirnya, kedaulatan moralitas publik akan selalu lebih kuat daripada otoritas politik yang korup. Masa depan demokrasi sangat bergantung pada seberapa sungguh-sungguh para aktor politik memandang etika—bukan sebagai batasan, melainkan sebagai komitmen tertinggi pada rakyat yang mereka layani (Wibowo, 2025).

DAFTAR PUSTAKeA

Abdul, A. (2020). *Etika pelayanan publik di era disrupsi: Studi kasus integritas birokrasi*. Pustaka Pelajar.

Aristotle. (2024). *The nicomachean ethics* (Revised ed.). Oxford University Press.

Bertens, K. (2020). *Etika: Dari teori ke praktik* (Cetakan ke-10). Kanisius.

Chomsky, N. (2024). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (3rd ed.). Pantheon.

Effendy, L. (2022). *Politik digital dan pergeseran opini publik*. Pustaka Digital Indonesia.

Faisal, M. (2021). Korupsi, kolusi, dan nepotisme: Analisis filosofis kegagalan etika politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Kontemporer*, *5*(2), 115–130.

Fukuyama, F. (2020). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.

Hamid, S. (2024). Analisis etika pemilu: Dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, *15*(1), 1–20.

Harahap, R. A. (2023). Etika diskresi pejabat publik: Antara kewenangan dan tanggung jawab moral. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(3), 250–270.

Harari, Y. N. (2025). *The ethics of artificial intelligence in governance*. Penguin Random House.

Heywood, A. (2025). *Politics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

Kant, I. (2023). *Groundwork of the metaphysics of morals* (Revised ed.). Yale University Press.

Kusuma, B. (2023). *Fondasi etika politik: Menuju kebijakan berbasis moral*. Media Pressindo.

Mill, J. S. (2021). *Utilitarianism* (Updated ed.). Hackett Publishing.

Norris, P. (2023). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.

Nugroho, F. (2021). Peran pendidikan etika dalam pencegahan korupsi pada sektor publik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1), 45–60.

Priambodo, S. (2024). Transparansi dan akuntabilitas sebagai basis etika kekuasaan. *Jurnal Etika dan Moralitas*, *3*(1), 1–15.

Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

Sandel, M. J. (2024). *Justice: What's the right thing to do?* (Updated ed.). Farrar, Straus and Giroux.

Simanjuntak, E. (2020). *Moral hazard* dalam kebijakan publik: Tinjauan teori keagenan. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, *4*(2), 170–195.

Siregar, M. (2021). Etika oposisi: Kritik konstruktif dan *check and balance* dalam sistem presidensial. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *11*(3), 300–320.

Sulistyo, D. (2023). Perlindungan hukum bagi *whistleblower*: Menegakkan integritas publik. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, *8*(4), 410–435.

Sunstein, C. R. (2023). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Taqwim, A. (2022). Konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan legislatif: Studi kasus kebijakan infrastruktur. *Jurnal Kebijakan Publik*, *7*(2), 150–175.

Taufiq, R. (2024). Independensi lembaga etik dan kedaulatan moral. *Jurnal Analisis Politik Indonesia*, *10*(2), 200–225.

Tjahjadi, S. P. (2021). *Etika Deontologi Kant dan implikasinya dalam politik*. Penerbit Kompas.

Wibisono, A. (2025). Etika aktivisme digital: Akuntabilitas dan anonimitas di ruang siber. *Jurnal Komunikasi Politik dan Media*, *9*(1), 75–98.

Wibowo, T. (2025). *Moralitas publik dan masa depan demokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Yulianti, E. (2023). Etika deliberasi: Menghadirkan inklusivitas dalam ruang publik. *Jurnal Sosiologi Politik*, *7*(3), 300–325.

BAB XI PERAN MEDIA MASSA DALAM POLITIK: PANGGUNG, PENJAGA, DAN PEMBENTUK OPINI PUBLIK

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

11.1 Pendahuluan: Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi

Dalam negara demokrasi modern, kekuasaan umumnya dibagi menjadi tiga pilar utama: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Namun, seiring berkembangnya masyarakat informasi, peran media massa telah diakui secara luas sebagai **Pilar Keempat (The Fourth Estate)**, yang

memiliki fungsi kritis untuk mengawasi dan menyeimbangkan ketiga pilar kekuasaan lainnya. Media massa—mencakup televisi, radio, surat kabar, hingga platform digital—berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan warga negara (Habermas, 2024).

Peran media dalam politik jauh melampaui sekadar penyampaian informasi. Ia adalah arena tempat wacana politik dibentuk, legitimasi diperebutkan, dan opini publik diukir. Kualitas demokrasi suatu negara sering kali berkorelasi langsung dengan kebebasan, integritas, dan profesionalisme medianya. Bab ini akan mengurai secara mendalam berbagai dimensi peran media massa dalam politik, mulai dari fungsi tradisional hingga tantangan revolusioner di era digital.

11.2 Fungsi Esensial Media Massa dalam Sistem Politik

Secara tradisional, para ahli komunikasi politik mengidentifikasi empat fungsi utama media massa dalam konteks politik dan pemerintahan.

11.2.1 Fungsi Informasi dan Edukasi

Media adalah sumber utama di mana warga negara memperoleh pengetahuan tentang isu-isu politik, kebijakan publik, dan kinerja pejabat. Fungsi ini sangat penting untuk

mewujudkan warga negara yang terinformasi (*informed citizenry*).

1. **Penyebaran Agenda Pemerintah:** Media menyajikan dan menjelaskan undang-undang baru, program pembangunan, dan keputusan eksekutif.
2. **Pencerahan Publik:** Media berperan sebagai edukator dengan menyederhanakan isu-isu kompleks (seperti ekonomi makro atau diplomasi internasional) agar dapat dipahami oleh khalayak luas, sehingga meningkatkan partisipasi politik yang rasional (Putra, 2020).

11.2.2 Fungsi Sosialisasi Politik

Media berkontribusi besar dalam proses sosialisasi politik, yaitu proses di mana individu memperoleh orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik.

- **Pembentukan Budaya Politik:** Media memvisualisasikan dan menarasikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia.
- **Identifikasi Politik:** Melalui liputan dan analisis, media membantu pemilih mengidentifikasi diri dengan partai atau ideologi tertentu (Nurhadi, 2021).

11.2.3 Fungsi Kontrol Sosial (*Watchdog*) dan Akuntabilitas

Ini adalah peran paling kritis media sebagai Pilar Keempat. Sebagai anjing penjaga, media bertanggung jawab untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi.

- **Jurnalisme Investigatif:** Melalui laporan mendalam dan investigasi rahasia, media memaksa pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- **Menguatkan Transparansi:** Media memastikan bahwa proses pengambilan keputusan pemerintah dilakukan secara terbuka, sehingga mengurangi *moral hazard* dan nepotisme (Syahrir, 2022).

11.2.4 Fungsi Penghubung dan Mobilisasi

Media menjadi saluran komunikasi dua arah: dari pemerintah ke rakyat (informasi) dan dari rakyat ke pemerintah (aspirasi).

- **Penyaluran Aspirasi:** Media memberikan ruang bagi kelompok minoritas, organisasi masyarakat sipil, dan suara kritis untuk didengar oleh pengambil kebijakan.

- **Mobilisasi:** Media dapat digunakan oleh aktor politik untuk mengorganisasi pendukung, menyelenggarakan protes, atau menggalang dukungan elektoral.

11.3 Teori-Teori Pengaruh Media terhadap Politik

Pengaruh media terhadap kesadaran politik tidak selalu bersifat langsung (*hypodermic needle*), melainkan melalui proses yang lebih halus dan berlapis. Tiga teori utama menjelaskan mekanisme ini.

11.3.1 *Agenda Setting*

Teori *Agenda Setting* berargumen bahwa media tidak selalu berhasil menentukan *apa yang harus dipikirkan* oleh publik, tetapi mereka sangat sukses dalam menentukan *apa yang harus dipikirkan* (McCombs & Shaw, 2022).

- **Agenda Media:** Isu-isu yang paling sering dan menonjol diberitakan oleh media.
- **Agenda Publik:** Isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat.
- **Agenda Kebijakan:** Isu-isu yang menjadi prioritas pemerintah.

Media, dengan mengulang dan menekankan isu tertentu (misalnya, inflasi, korupsi, atau perubahan iklim), secara efektif memindahkan isu tersebut dari Agenda Media ke Agenda Publik, dan pada akhirnya memaksa pemerintah memasukkannya ke dalam Agenda Kebijakan.

11.3.2 *Framing* (Pembingkaian Berita)

Jika *Agenda Setting* menentukan *apa* yang kita pikirkan, *Framing* menentukan *bagaimana* kita harus memikirkannya. *Framing* adalah proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari suatu isu, sehingga menghasilkan interpretasi tertentu di benak audiens.

Contohnya, isu pengangguran dapat dibingkai (diframing) sebagai:

1. **Frame Konflik:** Sebagai kegagalan kebijakan pemerintah.
2. **Frame Kemanusiaan:** Sebagai tragedi pribadi yang membutuhkan bantuan sosial.
3. **Frame Ekonomi:** Sebagai hasil dari pergeseran pasar global.

Pembingkaian ini sangat memengaruhi sikap politik dan pilihan pemilih. Politisi dan media seringkali bersaing untuk memaksakan *frame* mereka sendiri (Entman, 2021).

11.3.3 *Priming*

Priming terjadi ketika pelaporan media memengaruhi standar yang digunakan publik untuk menilai politisi atau kebijakan. Dengan menonjolkan isu-isu tertentu (*Agenda Setting*), media secara implisit "mempersiapkan" atau *mem-prime* pemilih untuk menggunakan isu tersebut sebagai kriteria evaluasi utama.

Contoh: Jika media secara intensif meliput skandal korupsi sebelum pemilu, pemilih akan cenderung menilai kandidat berdasarkan integritas dan rekam jejak antikorupsi mereka, bukan berdasarkan kebijakan ekonomi atau pendidikan.

11.4 Tantangan Etika dan Netralitas dalam Jurnalisme Politik

Netralitas dan objektivitas adalah ideal etis dari jurnalisme, tetapi seringkali sulit dicapai dalam praktik politik yang penuh kepentingan.

11.4.1 Bias Kepemilikan (*Ownership Bias*)

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kepemilikan media seringkali terkonsentrasi di tangan konglomerat yang memiliki afiliasi politik atau bisnis dengan partai dan pejabat (Ramadhan, 2023).

- **Implikasi Etis:** Keputusan editorial dan seleksi berita dapat dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau politik pemilik, mengorbankan kepentingan publik. Jurnalis dapat mengalami tekanan untuk menyajikan liputan yang menguntungkan pemilik atau sekutu politiknya, yang melanggar etika objektivitas.

11.4.2 Objektivitas vs. *Fairness*

Objektivitas, dalam artian bahwa wartawan harus menjadi wadah netral tanpa pandangan sendiri, seringkali dikritik sebagai mitos. Alternatif yang lebih realistis adalah *Fairness* (Keadilan) dan *Balance* (Keseimbangan).

- **Keadilan:** Memberikan ruang yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau isu, dan memberikan hak jawab yang setara.
- **Verifikasi:** Etika utama jurnalisme adalah komitmen pada kebenaran faktual. Dalam konteks politik, ini

berarti melakukan verifikasi ganda terhadap klaim politisi, janji kampanye, dan statistik resmi (Kovach & Rosenstiel, 2020).

11.4.3 Etika Jurnalisme Investigatif

Ketika media berperan sebagai *watchdog*, ada dilema etis mengenai metode yang digunakan, seperti menyembunyikan identitas atau menggunakan kamera tersembunyi.

- **Prinsip Kerugian Minimal:** Jurnalisme investigatif harus selalu menimbang manfaat publik dari pengungkapan versus potensi kerugian yang ditimbulkan. Penggunaan metode yang kontroversial (seperti jebakan) hanya dapat dibenarkan jika kepentingan publik yang dilindungi jauh lebih besar dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebenaran.

11.5 Media Sosial dan Disrupsi Ekosistem Politik

Munculnya media sosial dan platform digital telah mendisrupsi peran tradisional media massa dan menciptakan tantangan etis serta struktural baru.

11.5.1 Kenaikan Warga Negara Jurnalis (*Citizen Journalism*)

Media sosial memungkinkan setiap individu untuk menjadi produsen berita. Ini meningkatkan partisipasi dan mengurangi monopoli informasi media arus utama. Namun, ini juga menimbulkan risiko besar:

- **Rendahnya Verifikasi:** Konten yang diproduksi warga sering kali minim verifikasi profesional, memfasilitasi penyebaran disinformasi dan hoaks.
- **Pergeseran Standar Etika:** Batasan antara opini pribadi, fakta, dan agitasi politik menjadi kabur (Lumban Gaol, 2024).

11.5.2 *Filter Bubble* dan *Echo Chamber*

Algoritma platform digital cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna sebelumnya. Fenomena ini menciptakan *filter bubble* (gelembung filter) dan *echo chamber* (ruang gema).

- **Konsekuensi Politik:** Warga negara hanya terpapar pandangan yang mereka setujui, menguatkan bias kognitif, dan membuat mereka semakin tidak toleran terhadap pandangan berbeda. Hal ini menghambat

deliberasi publik yang sehat dan mempersulit konsensus politik (Pariser, 2023).

11.5.3 Manipulasi Politik Digital

Di era digital, kampanye politik seringkali melibatkan operasi manipulasi canggih:

1. **Hoaks dan *Deepfake***: Disinformasi sengaja yang dirancang untuk merusak reputasi lawan politik atau memicu perpecahan. Teknologi *deepfake* (pemalsuan video/audio yang realistis) menimbulkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik pada bukti visual dan otoritas (Karnadi, 2025).
2. **Perang *Buzzer* dan *Bot***: Penggunaan akun palsu (bot) atau tim *buzzer* berbayar untuk membanjiri ruang digital dengan narasi tertentu, memanipulasi tren topik, dan menciptakan ilusi dukungan publik yang besar (*astroturfing*).

11.6 Hubungan antara Politisi dan Media Massa

Hubungan antara politisi dan media adalah hubungan yang simbiotik namun antagonistik, sering digambarkan sebagai tarian kekuasaan yang rumit.

11.6.1 Strategi Politisi: *Spin Doctoring* dan Hubungan Media

Politisi aktif menggunakan berbagai strategi untuk mengontrol narasi yang disajikan oleh media.

- ***Spin Doctoring***: Praktik komunikasi politik di mana ahli strategi mencoba membentuk interpretasi media terhadap suatu peristiwa agar menguntungkan klien politik mereka, seringkali dengan meminimalkan aspek negatif.
- **Manajemen Berita (*News Management*):** Politisi berupaya mengarahkan alur berita, misalnya dengan mengatur waktu pengumuman penting (menjauhkannya dari isu negatif) atau mengutamakan wawancara dengan media yang bersahabat (Firdaus, 2022).

11.6.2 Media *Bashing* dan Intervensi

Ketika media menjalankan fungsi *watchdog*-nya secara efektif, hal itu sering menimbulkan reaksi keras dari politisi yang merasa dirugikan.

- **Serangan Balik (Media *Bashing*):** Politisi atau pendukungnya menyerang kredibilitas media,

seringkali dengan melabeli mereka sebagai *bias* atau "penyebar hoaks" untuk mendiskreditkan laporan kritis.

- **Intervensi Regulasi:** Pemerintah dapat menggunakan celah dalam regulasi penyiaran atau digital untuk memberikan tekanan finansial atau hukum kepada media independen, mengancam kebebasan pers (Hidayat, 2024).

11.7 Penguatan Peran Media Massa yang Bertanggung Jawab

Untuk menjaga peran media sebagai pilar demokrasi yang sehat, diperlukan penguatan dari sisi internal maupun eksternal.

11.7.1 Penguatan Profesionalisme Jurnalis

Integritas media harus didasarkan pada komitmen kuat jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik.

- **Pendidikan Berkelanjutan:** Jurnalis perlu terus dilatih dalam verifikasi digital, *fact-checking* mendalam, dan memahami kompleksitas kebijakan publik.

- **Independensi Redaksi:** Harus ada dinding pemisah yang jelas (*Chinese Wall*) antara kepentingan komersial, kepentingan pemilik, dan keputusan redaksional untuk menjamin objektivitas (Kovach & Rosenstiel, 2020).

11.7.2 Literasi Media untuk Warga Negara

Di era banjir informasi, warga negara perlu memiliki keterampilan kritis untuk mencerna dan mengevaluasi informasi politik.

- **Program Literasi Media:** Pendidikan yang mengajarkan cara membedakan berita asli dan hoaks, mengidentifikasi bias *framing*, dan memahami peran algoritma digital. Warga negara yang cerdas media adalah penangkal terbaik terhadap manipulasi politik (Waseso, 2023).

11.7.3 Kolaborasi *Fact-Checking* Lintas Platform

Lembaga *fact-checking* independen, baik dari media tradisional maupun organisasi masyarakat sipil, harus berkolaborasi secara luas, terutama dengan platform media sosial, untuk segera mengidentifikasi dan menandai disinformasi politik yang viral.

11.8 Penutup: Media, Demokrasi, dan Masa Depan

Peran media massa dalam politik bersifat dinamis, terus berevolusi seiring perubahan teknologi. Di satu sisi, teknologi menawarkan potensi transparansi dan partisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya; di sisi lain, ia menghadirkan alat manipulasi yang semakin canggih.

Masa depan politik yang sehat bergantung pada kemampuan media untuk mempertahankan peran etisnya sebagai *watchdog* dan edukator, serta kemampuan warga negara untuk menggunakan media dengan kritis. Jika media gagal menjaga integritasnya—menjadi alat propaganda atau komoditas hiburan semata—maka Pilar Keempat akan runtuh, dan seluruh bangunan demokrasi akan kehilangan penyeimbang utamanya. Komitmen terhadap jurnalisme yang berprinsip adalah investasi dalam masa depan politik yang lebih adil dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A. (2020). *Etika pelayanan publik di era disrupsi: Studi kasus integritas birokrasi*. Pustaka Pelajar.

Aristotle. (2024). *The nicomachean ethics* (Revised ed.). Oxford University Press.

Bennett, W. L. (2022). *News: The politics of illusion* (12th ed.). Routledge.

Bertens, K. (2020). *Etika: Dari teori ke praktik* (Cetakan ke-10). Kanisius.

Chomsky, N. (2024). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (3rd ed.). Pantheon.

Effendy, L. (2022). *Politik digital dan pergeseran opini publik*. Pustaka Digital Indonesia.

Entman, R. M. (2021). *Framing: Towards clarification of a fractured paradigm*. Routledge.

Faisal, M. (2021). Korupsi, kolusi, dan nepotisme: Analisis filosofis kegagalan etika politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Kontemporer*, *5*(2), 115–130.

Firdaus, A. (2022). *Spin doctoring* dan manajemen citra politik di media massa. *Jurnal Komunikasi Politik*, *6*(1), 1–18.

Fukuyama, F. (2020). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.

Habermas, J. (2024). *The structural transformation of the public sphere* (New ed.). MIT Press.

Hamid, S. (2024). Analisis etika pemilu: Dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, *15*(1), 1–20.

Harahap, R. A. (2023). Etika diskresi pejabat publik: Antara kewenangan dan tanggung jawab moral. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(3), 250–270.

Harari, Y. N. (2025). *The ethics of artificial intelligence in governance*. Penguin Random House.

Heywood, A. (2025). *Politics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

Hidayat, R. (2024). Intervensi kekuasaan terhadap independensi media: Ancaman pada kebebasan pers. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *14*(2), 150–170.

Kant, I. (2023). *Groundwork of the metaphysics of morals* (Revised ed.). Yale University Press.

Karnadi, B. (2025). *Deepfake* dan disrupsi kepercayaan dalam sistem politik digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *10*(1), 25–45.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2020). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (Revised ed.). Crown.

Kusuma, B. (2023). *Fondasi etika politik: Menuju kebijakan berbasis moral*. Media Pressindo.

Lippmann, W. (2021). *Public opinion* (Centennial ed.). Dover Publications.

Lumban Gaol, E. (2024). Etika jurnalisme warga: Antara partisipasi dan tanggung jawab verifikasi. *Jurnal Kajian Media dan Komunikasi*, *8*(3), 300–325.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (2022). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, *86*(3), 444–461.

Mill, J. S. (2021). *Utilitarianism* (Updated ed.). Hackett Publishing.

Norris, P. (2023). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.

Nugroho, F. (2021). Peran pendidikan etika dalam pencegahan korupsi pada sektor publik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1), 45–60.

Nurhadi, P. (2021). Media massa dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi pada pemilih muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, *5*(4), 450–475.

Pariser, E. (2023). *The filter bubble: How the personalized web is secretly reshaping what we read and think*. Penguin Press.

Priambodo, S. (2024). Transparansi dan akuntabilitas sebagai basis etika kekuasaan. *Jurnal Etika dan Moralitas*, *3*(1), 1–15.

Prior, M. (2020). *Media and political polarization*. Cambridge University Press.

Putra, F. (2020). Fungsi edukasi media dalam pembentukan warga negara yang terinformasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(1), 10–25.

Ramadhan, S. (2023). Konsentrasi kepemilikan media dan implikasinya terhadap bias politik. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, *7*(2), 180–205.

Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

Sandel, M. J. (2024). *Justice: What's the right thing to do?* (Updated ed.). Farrar, Straus and Giroux.

Schudson, M. (2023). *The sociology of news* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

Simanjuntak, E. (2020). *Moral hazard* dalam kebijakan publik: Tinjauan teori keagenan. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, *4*(2), 170–195.

Siregar, M. (2021). Etika oposisi: Kritik konstruktif dan *check and balance* dalam sistem presidensial. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *11*(3), 300–320.

Sulistyo, D. (2023). Perlindungan hukum bagi *whistleblower*: Menegakkan integritas publik. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, *8*(4), 410–435.

Sunstein, C. R. (2024). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Syahrir, T. (2022). Peran media *watchdog* dalam penguatan akuntabilitas birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(3), 280–305.

Taqwim, A. (2022). Konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan legislatif: Studi kasus kebijakan infrastruktur. *Jurnal Kebijakan Publik*, *7*(2), 150–175.

Taufiq, R. (2024). Independensi lembaga etik dan kedaulatan moral. *Jurnal Analisis Politik Indonesia*, *10*(2), 200–225.

Tjahjadi, S. P. (2021). *Etika Deontologi Kant dan implikasinya dalam politik*. Penerbit Kompas.

Waseso, I. (2023). Literasi media sebagai benteng pertahanan terhadap hoaks politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Kontemporer*, *13*(4), 410–430.

Wibisono, A. (2025). Etika aktivisme digital: Akuntabilitas dan anonimitas di ruang siber. *Jurnal Komunikasi Politik dan Media*, *9*(1), 75–98.

Wibowo, T. (2025). *Moralitas publik dan masa depan demokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Yulianti, E. (2023). Etika deliberasi: Menghadirkan inklusivitas dalam ruang publik. *Jurnal Sosiologi Politik*, *7*(3), 300–325.

Zuboff, S. (2021). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

BAB XII GLOBALISASI DAN DIGITALISASI POLITIK: PERUBAHAN TATA KELOLA DAN KEDAULATAN DI ERA JEJARING

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

12.1 Pendahuluan: Bertemunya Dua Kekuatan Transformasi

Dua kekuatan transformatif terbesar pada abad ke-21 adalah globalisasi dan digitalisasi. Keduanya tidak beroperasi secara terpisah; sebaliknya, mereka saling memperkuat dan menciptakan sinergi yang revolusioner terhadap sistem politik, tata kelola negara, dan konsep kedaulatan.

Globalisasi didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial sedunia yang menghubungkan lokasi-lokasi yang terpisah sedemikian rupa sehingga peristiwa lokal dibentuk oleh kejadian yang terjadi bermil-mil jauhnya, dan sebaliknya (Giddens, 2024). Sementara itu, **Digitalisasi Politik** merujuk pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam semua aspek aktivitas politik, mulai dari administrasi publik, partisipasi warga, hingga diplomasi dan peperangan.

Bab ini akan membedah bagaimana persimpangan kedua fenomena ini menciptakan peluang baru bagi demokrasi, tetapi pada saat yang sama, menghadirkan tantangan eksistensial, terutama terkait kedaulatan negara, keamanan siber, dan penyebaran disinformasi.

12.2 Globalisasi dan Erosi Kedaulatan Negara

Secara tradisional, negara-bangsa adalah aktor utama dalam politik internasional, di mana kedaulatan didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas eksternal. Globalisasi, didorong oleh arus modal, informasi, dan manusia yang bebas, mulai mengikis batas-batas kedaulatan ini.

12.2.1 Kedaulatan Ekonomi dan Lembaga Transnasional

Arus modal global telah menggeser pusat pengambilan keputusan ekonomi dari ibukota nasional ke lembaga-lembaga transnasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

- **Pembatasan Kebijakan:** Keputusan ekonomi domestik (misalnya, suku bunga, subsidi, atau tarif) kini tunduk pada perjanjian perdagangan internasional dan tekanan pasar global. Negara sering dipaksa untuk menyesuaikan kebijakan makro mereka agar sesuai dengan standar global, yang membatasi diskresi politik domestik (Pangaribuan, 2023).
- **Peran Perusahaan Multinasional (MNC):** MNC seringkali memiliki anggaran yang lebih besar daripada PDB banyak negara berkembang. Mereka dapat memindahkan basis produksi dan modal mereka dengan cepat, memberikan mereka daya tawar yang besar terhadap pemerintah nasional, menuntut insentif pajak dan regulasi yang longgar.

12.2.2 Isu Transnasional dan Tata Kelola Global

Globalisasi memunculkan masalah-masalah yang sifatnya melintasi batas negara dan tidak dapat diselesaikan

oleh satu negara saja, memaksa kedaulatan untuk berbagi ruang dengan tata kelola global.

- **Perubahan Iklim:** Memerlukan kerjasama global melalui perjanjian seperti Perjanjian Paris. Kedaulatan negara menjadi terikat pada komitmen bersama untuk mengurangi emisi.
- **Terorisme dan Kejahatan Lintas Batas:** Membutuhkan kolaborasi intelijen global, berbagi data, dan harmonisasi hukum, yang mengharuskan negara untuk membuka akses informasi kedaulatan mereka kepada mitra internasional.

12.3 Digitalisasi Politik: Revolusi dalam Tata Kelola

Digitalisasi politik adalah penggunaan TIK untuk mengubah cara pemerintah beroperasi, cara warga berinteraksi, dan cara pengambilan keputusan politik berlangsung.

12.3.1 E-Government dan Peningkatan Efisiensi Publik

E-Government (Pemerintahan Elektronik) melibatkan penggunaan teknologi untuk memberikan layanan publik secara efisien dan transparan.

- **Layanan Terintegrasi:** Memungkinkan warga untuk mengakses layanan seperti pajak, izin usaha, atau dokumen kependudukan secara daring, mengurangi birokrasi dan potensi korupsi.
- **Keterbukaan Data (Open Data):** Pemerintah memublikasikan data publik dalam format yang dapat diakses dan digunakan ulang, mendorong inovasi dan akuntabilitas. E-Government yang sukses secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional (Siregar, 2021).

12.3.2 E-Participation dan Demokrasi Digital

Digitalisasi menyediakan platform baru untuk keterlibatan warga di luar kotak suara (E-Participation).

- **Konsultasi Publik Daring:** Pemerintah dapat mengumpulkan umpan balik (feedback) dari warga secara *real-time* mengenai rancangan undang-undang atau kebijakan baru melalui forum atau aplikasi khusus.
- **Aktivisme Siber:** Media sosial dan platform digital menjadi alat mobilisasi bagi gerakan sosial, protes, dan kampanye politik, memberikan suara kepada

kelompok-kelompok yang sebelumnya termarjinalkan (Wahyudi, 2022).

12.3.3 Diplomasi Digital (*Digital Diplomacy*)

Kementerian Luar Negeri dan diplomat kini menggunakan platform digital untuk menjalankan diplomasi.

- **Komunikasi Langsung:** Pemimpin negara dapat berkomunikasi langsung dengan publik global tanpa perantara media tradisional, membangun citra, dan menjelaskan posisi politik mereka.
- **Perang Narasi:** Diplomasi digital juga melibatkan pertempuran narasi di ruang siber untuk memenangkan opini publik internasional, khususnya dalam isu-isu sensitif (Wahyudi, 2022).

12.4 Tantangan Kedaulatan di Ruang Siber

Digitalisasi, meskipun menjanjikan efisiensi, membawa serta tantangan baru yang mengancam kedaulatan dan stabilitas politik.

12.4.1 Ancaman Keamanan Siber

Keamanan siber adalah isu kedaulatan yang paling mendesak di era digital. Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur kritis negara.

- **Serangan Infrastruktur:** Peretasan terhadap jaringan listrik, sistem keuangan, atau sistem pertahanan dapat dianggap sebagai tindakan perang di era modern.
- **Spionase Digital:** Negara-negara terlibat dalam spionase siber untuk mencuri rahasia negara, data ekonomi, atau memengaruhi proses politik. Kedaulatan teritorial kini juga harus dipertahankan di ranah virtual (Setiawan, 2024).

12.4.2 Disinformasi dan Manipulasi Asing

Globalisasi dan digitalisasi memungkinkan aktor asing (negara atau non-negara) untuk campur tangan dalam politik domestik melalui penyebaran disinformasi.

- ***Computational Propaganda*:** Penggunaan bot, akun palsu, dan analisis data besar untuk menyebarkan narasi palsu atau memecah belah secara sistematis di media sosial, dengan tujuan memengaruhi hasil pemilu atau merusak kepercayaan publik terhadap institusi.

- **Erosi Realitas Bersama:** *Filter bubble* dan *echo chamber* yang diperkuat algoritma memisahkan warga ke dalam realitas informasi yang berbeda, membuat dialog politik yang rasional hampir mustahil (Sunstein, 2024).

12.4.3 Kedaulatan Data dan Korporasi Teknologi Global

Perusahaan teknologi raksasa (Big Tech), seperti Meta, Google, dan X (Twitter), kini memegang kendali atas arus informasi dan data global.

- **Pengambilan Keputusan Algoritma:** Algoritma perusahaan-perusahaan ini menentukan berita apa yang dilihat warga, yang memengaruhi proses politik dan opini publik. Keputusan editorial penting dibuat oleh entitas swasta yang tidak tunduk pada kedaulatan hukum nasional mana pun.
- **Peraturan Data Lintas Batas:** Kedaulatan data menjadi isu krusial. Negara berjuang untuk menegakkan hukum perlindungan data mereka ketika data warga disimpan di server di yurisdiksi lain.

12.5 Tata Kelola Global di Era Digital

Untuk mengatasi tantangan transnasional yang timbul dari globalisasi dan digitalisasi, diperlukan mekanisme tata kelola yang bersifat global.

12.5.1 Hukum Siber Internasional

Komunitas internasional sedang berjuang untuk mengembangkan norma dan hukum siber yang mengikat.

- **Perlunya Norma Perilaku:** Diperlukan perjanjian internasional yang mendefinisikan apa yang merupakan "agresi siber" dan menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh aktor negara di ruang siber.
- **Tata Kelola Internet Multistakeholder:** Pengelolaan internet melibatkan banyak pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil). Model ini menantang model tata kelola tradisional yang didominasi negara.

12.5.2 Diplomasi Multilateral Baru

Diplomasi tidak lagi hanya melibatkan antar-negara (G2G), tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara dalam forum multilateral.

- **Peran CSO dan NGO Global:** Organisasi masyarakat sipil global menggunakan teknologi untuk memobilisasi dan memberikan tekanan pada pemerintah dalam isu-isu seperti hak asasi manusia dan lingkungan.
- **Konsensus Global:** Negara-negara perlu mencapai konsensus global tentang bagaimana menghadapi monopoli teknologi, mengenakan pajak pada perusahaan digital global, dan melindungi hak-hak digital warga negara.

12.6 Politik Global dan Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Globalisasi dan digitalisasi cenderung memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Kesenjangan digital adalah salah satu konsekuensi sosial-politik utama.

12.6.1 Akses dan Infrastruktur

Kesenjangan akses terhadap infrastruktur digital (internet berkecepatan tinggi) menciptakan dua kelompok warga negara: mereka yang memiliki akses ke informasi dan partisipasi digital, dan mereka yang tidak.

- **Implikasi Politik:** Kelompok yang tidak memiliki akses menjadi terpinggirkan dari proses politik digital, memperkuat elit informasi dan memperlemah inklusivitas demokrasi (Utami, 2020).

12.6.2 Kesenjangan Keterampilan (*Skill Gap*)

Selain masalah akses, ada juga kesenjangan keterampilan dalam menggunakan TIK secara efektif dan kritis.

- **Literasi Digital:** Warga yang memiliki literasi digital rendah lebih rentan terhadap disinformasi dan eksploitasi data. Pemerintah memiliki tanggung jawab etis untuk menyediakan pelatihan literasi digital sebagai bagian dari pendidikan politik.

12.7 Kesimpulan: Menyeimbangkan Konektivitas dan Kedaulatan

Globalisasi dan digitalisasi telah meruntuhkan dinding-dinding yang melindungi kedaulatan politik tradisional. Negara-bangsa kini berfungsi di dalam 'Jejaring Global' (Castells, 2023), di mana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di satu entitas, melainkan tersebar di antara

negara, lembaga internasional, korporasi raksasa, dan jejaring aktivis.

Masa depan politik menuntut negara untuk menjadi lebih adaptif dan transparan. Kedaulatan tidak akan hilang, tetapi ia akan berevolusi dari kedaulatan teritorial yang kaku menjadi kedaulatan jejaring yang fleksibel dan dibagi. Tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan konektivitas dan efisiensi digital untuk memperkuat demokrasi, sambil membangun mekanisme pertahanan siber yang kuat dan regulasi global yang etis untuk melindungi kepentingan warga negara dari manipulasi transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A. (2020). *Etika pelayanan publik di era disrupsi: Studi kasus integritas birokrasi*. Pustaka Pelajar.

Aristotle. (2024). *The nicomachean ethics* (Revised ed.). Oxford University Press.

Bennett, W. L. (2022). *News: The politics of illusion* (12th ed.). Routledge.

Bertens, K. (2020). *Etika: Dari teori ke praktik* (Cetakan ke-10). Kanisius.

Castells, M. (2023). *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Chomsky, N. (2024). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (3rd ed.). Pantheon.

Effendy, L. (2022). *Politik digital dan pergeseran opini publik*. Pustaka Digital Indonesia.

Entman, R. M. (2021). *Framing: Towards clarification of a fractured paradigm*. Routledge.

Faisal, M. (2021). Korupsi, kolusi, dan nepotisme: Analisis filosofis kegagalan etika politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Kontemporer*, *5*(2), 115–130.

Firdaus, A. (2022). *Spin doctoring* dan manajemen citra politik di media massa. *Jurnal Komunikasi Politik*, *6*(1), 1–18.

Fukuyama, F. (2020). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.

Giddens, A. (2024). *Runaway world: How globalization is reshaping our lives* (Updated ed.). Routledge.

Haass, R. N. (2021). *A world in disarray: American foreign policy and the crisis of the old order*. Penguin Press.

Habermas, J. (2024). *The structural transformation of the public sphere* (New ed.). MIT Press.

Hamid, S. (2024). Analisis etika pemilu: Dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, *15*(1), 1–20.

Harahap, R. A. (2023). Etika diskresi pejabat publik: Antara kewenangan dan tanggung jawab moral. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(3), 250–270.

Harari, Y. N. (2025). *The ethics of artificial intelligence in governance*. Penguin Random House.

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (2020). *Global transformations: Politics, economics and culture*. Stanford University Press.

Heywood, A. (2025). *Politics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

Hidayat, R. (2024). Intervensi kekuasaan terhadap independensi media: Ancaman pada kebebasan pers. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *14*(2), 150–170.

Kant, I. (2023). *Groundwork of the metaphysics of morals* (Revised ed.). Yale University Press.

Karnadi, B. (2025). *Deepfake* dan disrupsi kepercayaan dalam sistem politik digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *10*(1), 25–45.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2020). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (Revised ed.). Crown.

Kusuma, B. (2023). *Fondasi etika politik: Menuju kebijakan berbasis moral*. Media Pressindo.

Lippmann, W. (2021). *Public opinion* (Centennial ed.). Dover Publications.

Lumban Gaol, E. (2024). Etika jurnalisme warga: Antara partisipasi dan tanggung jawab verifikasi. *Jurnal Kajian Media dan Komunikasi*, *8*(3), 300–325.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (2022). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, *86*(3), 444–461.

Mill, J. S. (2021). *Utilitarianism* (Updated ed.). Hackett Publishing.

Norris, P. (2023). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.

Nugroho, F. (2021). Peran pendidikan etika dalam pencegahan korupsi pada sektor publik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1), 45–60.

Nurhadi, P. (2021). Media massa dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi pada pemilih muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, *5*(4), 450–475.

Nye, J. S. (2023). *Soft power: The means to success in world politics* (New ed.). PublicAffairs.

O'Neil, C. (2020). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Broadway Books.

Pangaribuan, R. (2023). Globalisasi ekonomi dan pembatasan kedaulatan fiskal negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *8*(2), 150–175.

Pariser, E. (2023). *The filter bubble: How the personalized web is secretly reshaping what we read and think*. Penguin Press.

Priambodo, S. (2024). Transparansi dan akuntabilitas sebagai basis etika kekuasaan. *Jurnal Etika dan Moralitas*, *3*(1), 1–15.

Prior, M. (2020). *Media and political polarization*. Cambridge University Press.

Putra, F. (2020). Fungsi edukasi media dalam pembentukan warga negara yang terinformasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(1), 10–25.

Ramadhan, S. (2023). Konsentrasi kepemilikan media dan implikasinya terhadap bias politik. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, *7*(2), 180–205.

Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

Sandel, M. J. (2024). *Justice: What's the right thing to do?* (Updated ed.). Farrar, Straus and Giroux.

Schudson, M. (2023). *The sociology of news* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

Setiawan, B. (2024). Kedaulatan siber: Strategi pertahanan negara di era ancaman digital transnasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, *10*(1), 1–25.

Simanjuntak, E. (2020). *Moral hazard* dalam kebijakan publik: Tinjauan teori keagenan. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, *4*(2), 170–195.

Siregar, A. M. (2021). Efektivitas *E-Government* dalam peningkatan transparansi pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, *6*(3), 200–220.

Siregar, M. (2021). Etika oposisi: Kritik konstruktif dan *check and balance* dalam sistem presidensial. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *11*(3), 300–320.

Sulistyo, D. (2023). Perlindungan hukum bagi *whistleblower*: Menegakkan integritas publik. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, *8*(4), 410–435.

Sunstein, C. R. (2024). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Syahrir, T. (2022). Peran media *watchdog* dalam penguatan akuntabilitas birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(3), 280–305.

Taqwim, A. (2022). Konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan legislatif: Studi kasus kebijakan infrastruktur. *Jurnal Kebijakan Publik*, *7*(2), 150–175.

Taufiq, R. (2024). Independensi lembaga etik dan kedaulatan moral. *Jurnal Analisis Politik Indonesia*, *10*(2), 200–225.

Tjahjadi, S. P. (2021). *Etika Deontologi Kant dan implikasinya dalam politik*. Penerbit Kompas.

Utami, S. (2020). Mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*): Implikasi sosial-politik di pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan dan Kota*, *4*(1), 30–45.

Wahyudi, T. (2022). Diplomasi digital: Pemanfaatan media sosial oleh Kementerian Luar Negeri. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *9*(4), 350–375.

Waseso, I. (2023). Literasi media sebagai benteng pertahanan terhadap hoaks politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Kontemporer*, *13*(4), 410–430.

Wibisono, A. (2025). Etika aktivisme digital: Akuntabilitas dan anonimitas di ruang siber. *Jurnal Komunikasi Politik dan Media*, *9*(1), 75–98.

Wibowo, T. (2025). *Moralitas publik dan masa depan demokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Yulianti, E. (2023). Etika deliberasi: Menghadirkan inklusivitas dalam ruang publik. *Jurnal Sosiologi Politik*, *7*(3), 300–325.

Zuboff, S. (2021). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

BAB XIII POLITIK INDONESIA KONTEMPORER: DINAMIKA DEMOKRASI, OLIGARKI, DAN DESENTRALISASI

Capaian Pembelajaran

Mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan Pancasila dalam penyelesaian masalah prosedural dan potensial di masyarakat, dunia usaha, industri, dan kerja sesuai perkembangan IPTEKS di Ilmu Komunikasi.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu mencerminkan sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

13.1 Pendahuluan: Signifikansi dan Warisan Sejarah

Politik Indonesia pasca-1998, atau yang sering disebut sebagai Era Reformasi, merupakan salah satu studi kasus transisi demokrasi paling menarik dan kompleks di dunia. Dari rezim otoriter Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, Indonesia beralih menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ditandai dengan pemilihan umum yang bebas dan

langsung, desentralisasi kekuasaan yang masif, dan kebebasan pers yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, transisi ini tidak tanpa cacat. Demokrasi Indonesia sering disebut sebagai "demokrasi yang terfragmentasi" atau "demokrasi yang terkonsolidasi dengan cacat" (*flawed consolidated democracy*), di mana institusi formal demokrasi beroperasi, tetapi dibayangi oleh pengaruh kuat oligarki, praktik korupsi, dan tantangan terhadap pluralisme. Bab ini akan menganalisis secara mendalam arsitektur politik Indonesia kontemporer, dinamika aktor, serta isu-isu krusial yang membentuk masa depan bangsa.

13.2 Transisi dan Konsolidasi Demokrasi Pasca-Reformasi

13.2.1 Warisan Orde Baru dan Tuntutan Reformasi

Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menandai akhir dari sistem otoriter yang terpusat dan militeristik. Warisan Orde Baru mencakup: (a) Sentralisasi kekuasaan yang ekstrem, (b) Dominasi militer dalam politik (*Dwifungsi ABRI*), (c) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sistemik, dan (d) Represi terhadap kebebasan sipil dan politik.

Tuntutan utama Reformasi adalah: Amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi ABRI, otonomi daerah yang luas, supremasi hukum, dan pemberantasan KKN. Tuntutan-tuntutan ini kemudian diakomodasi melalui serangkaian amandemen UUD 1945 (1999–2002) yang mengubah fundamental tata negara Indonesia.

13.2.2 Amandemen UUD 1945 dan Perubahan Struktur Kekuasaan

Empat kali amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan struktural signifikan:

- **Pemilihan Presiden Langsung:** Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (sebelumnya oleh MPR), memperkuat legitimasi dan akuntabilitas eksekutif.
- **Pembentukan Lembaga Baru:** Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim.
- **Penguatan Legislatif:** Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkatkan, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk mewakili kepentingan

daerah, menciptakan bikameralisme semu (*quasi-bicameralism*).

- **Pembatasan Kekuasaan:** Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, yang merupakan langkah kunci untuk mencegah terulangnya otoritarianisme.

13.3 Institusi Politik Utama

13.3.1 Eksekutif: Sistem Presidensial Kuat

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang kuat. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun memiliki legitimasi rakyat yang kuat, Presiden tetap memerlukan dukungan dari DPR untuk legislasi dan penganggaran.

- **Hubungan Presiden-DPR:** Hubungan antara Presiden dan DPR sering kali ditandai dengan koalisi partai yang bersifat cair dan pragmatis. Koalisi yang besar (*jumbo coalition*) menjadi norma, yang bertujuan untuk menstabilkan pemerintahan tetapi berpotensi melemahkan fungsi *check and balance* oleh oposisi.

13.3.2 Legislatif: DPR, DPD, dan MPR

Legislatif Indonesia terdiri dari dua kamar (DPR dan DPD) yang bertemu dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

- **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):** Kamar utama pembuat undang-undang dan pengawas eksekutif. DPR didominasi oleh partai politik dan sering menjadi pusat tawar-menawar politik yang didorong oleh kepentingan elit dan oligarki.
- **Dewan Perwakilan Daerah (DPD):** Mewakili kepentingan provinsi dan hanya memiliki wewenang terbatas terkait legislasi daerah dan otonomi. Fungsinya lebih bersifat konsultatif daripada legislatif penuh.
- **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR):** Merupakan gabungan DPR dan DPD. Fungsinya kini terutama terbatas pada mengubah dan menetapkan UUD, melantik dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.

13.3.3 Yudikatif: Supremasi Hukum dan Mahkamah Konstitusi

Pasca-Reformasi, kekuasaan kehakiman direformasi untuk mencapai independensi.

- **Mahkamah Konstitusi (MK):** Berfungsi sebagai pengawal konstitusi, menangani sengketa hasil pemilu, sengketa kewenangan antarlembaga negara, dan pembubaran partai politik. Peran MK sangat penting dalam menstabilkan proses demokrasi, namun integritasnya sering menjadi sorotan publik.
- **Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY):** MA adalah pengadilan tertinggi, sedangkan KY bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

13.4 Sistem Kepartaian, Oligarki, dan Dinamika Elektoral

13.4.1 Sistem Multi-Partai Terfragmentasi

Indonesia mengadopsi sistem multi-partai yang sangat terfragmentasi. Pemilihan umum secara teratur menghasilkan DPR yang terdiri dari banyak partai dengan perolehan suara yang bervariasi.

- **Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*):** Penggunaan ambang batas bertujuan mengurangi fragmentasi, tetapi dampaknya adalah mendorong partai-partai kecil untuk berkoalisi bahkan sebelum pemilu.

- **Ideologi dan Pragmatisme:** Identitas ideologis partai cenderung kabur, dan aliansi politik didorong oleh pertimbangan pragmatis—akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan posisi di pemerintahan—daripada perbedaan ideologis yang mendasar.

13.4.2 Oligarki dan Pendanaan Politik

Konsep oligarki, yang didefinisikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil elit kaya dan terhubung, menjadi kunci untuk memahami politik Indonesia.

- **Peran Modal:** Biaya politik yang tinggi (pemilu, pendanaan partai) membuat partai dan politisi sangat bergantung pada dukungan finansial dari kelompok bisnis (*cukong*) atau elit kaya.
- **Imbalan Politik:** Ketergantungan ini menciptakan lingkaran setan di mana keputusan politik dan kebijakan sering kali diarahkan untuk mengamankan atau memperluas kepentingan ekonomi para oligarki, bukan kepentingan publik (Hadiz, 2023).

13.4.3 Dinamika Pemilu Serentak

Sejak 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak (legislatif dan eksekutif) pada hari yang sama.

- **Keunggulan *Coattail Effect*:** Kandidat presiden yang kuat cenderung memberikan dorongan suara (*coattail effect*) kepada partai pengusungnya di pemilihan legislatif, memperkuat hubungan vertikal antara pemilih dan elit partai.
- **Tantangan Logistik dan Etika:** Pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu yang terbesar di dunia, menghadapi tantangan logistik yang masif dan sering kali diwarnai oleh isu *money politics* dan disinformasi.

13.5 Desentralisasi, Korupsi, dan Tantangan Otonomi Daerah

13.5.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kekuasaan

Reformasi memperkenalkan desentralisasi radikal melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, mengalihkan kewenangan besar dari Jakarta ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

- **Pemerintahan Lokal yang Kuat:** Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung, memiliki anggaran besar, dan wewenang untuk mengatur urusan domestik.
- **Munculnya 'Raja-Raja Kecil':** Desentralisasi berhasil membawa demokrasi lebih dekat kepada

rakyat, tetapi juga memunculkan 'raja-raja kecil' di daerah, di mana kekuasaan oligarki dan dinasti politik menggantikan sentralisme Jakarta.

13.5.2 Korupsi dan KPK

Korupsi tetap menjadi masalah sistemik dan tantangan terbesar bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.

- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Dibentuk sebagai lembaga *superbody* yang independen untuk mengatasi korupsi. KPK telah mencapai keberhasilan signifikan dalam menjerat elit politik dan pejabat tinggi, namun kekuatannya sering diupayakan untuk dilemahkan oleh aktor politik (Tomsa & Aspinall, 2020).
- **Dinamika Korupsi di Daerah:** Desentralisasi telah mendistribusikan praktik korupsi, dengan banyak kasus melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD dalam proyek pengadaan dan perizinan.

13.5.3 Politik Identitas dan Pluralisme

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa. Namun, politik identitas sering dimanfaatkan oleh elit sebagai alat mobilisasi elektoral.

- **Polarisasi Agama-Etnis:** Pemanfaatan isu agama, terutama menjelang pemilu, telah meningkatkan polarisasi dan mengancam kohesi sosial.
- **Tantangan Intoleransi:** Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, tetapi juga memungkinkan kelompok intoleran untuk menantang pluralisme dan keberagaman yang dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945.

13.6 Hubungan Negara-Masyarakat Sipil, Media, dan Militer

13.6.1 Kekuatan dan Tantangan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil Indonesia (LSM, organisasi keagamaan, akademisi) berperan vital sebagai aktor *check and balance* utama.

- **Peran *Watchdog*:** Organisasi non-pemerintah secara aktif memantau kebijakan pemerintah, mengadvokasi hak asasi manusia, dan mengkritik korupsi.
- **Ancaman Ruang Sipil:** Belakangan, ruang gerak masyarakat sipil menghadapi tantangan, termasuk pembatasan pendanaan, kriminalisasi, dan penggunaan undang-undang siber untuk membungkam kritik.

13.6.2 Media Massa dan Pergeseran Digital

Media massa menikmati kebebasan pers yang besar pasca-Reformasi, tetapi menghadapi masalah baru:

- **Oligarki Media:** Kepemilikan media massa yang terkonsentrasi di tangan segelintir konglomerat yang juga memiliki kepentingan politik atau bisnis, berpotensi memengaruhi netralitas berita.
- **Disinformasi dan Media Sosial:** Media sosial menjadi ruang utama perdebatan politik, tetapi juga jalur cepat bagi penyebaran hoaks dan disinformasi, yang sulit dikendalikan tanpa melanggar kebebasan berekspresi.

13.6.3 Reformasi Sektor Keamanan

Reformasi sektor keamanan merupakan tonggak penting. TNI (Tentara Nasional Indonesia) kini secara resmi kembali ke barak, dengan doktrin yang berfokus pada pertahanan negara.

- **Tantangan *Remilitarization*:** Meskipun Dwifungsi ABRI dihapus, muncul kekhawatiran tentang upaya *remilitarization* atau keterlibatan TNI/Polri dalam

urusan sipil dan politik di luar mandat pertahanan/keamanan mereka.

13.7 Politik Luar Negeri: Prinsip Bebas Aktif di Era Global

Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah **Bebas Aktif**, yang berarti: (a) Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah internasional, dan (b) Aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

- **Peran di ASEAN dan Global:** Indonesia adalah kekuatan utama di ASEAN dan sering memainkan peran penting dalam mediasi konflik regional dan internasional.
- **Dinamika Geopolitik:** Indonesia menavigasi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan menjaga keseimbangan dan independensi, memprioritaskan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi.

13.8 Tantangan Masa Depan dan Konsolidasi Demokrasi

Masa depan politik Indonesia akan ditentukan oleh kemampuannya mengatasi tantangan-tantangan berikut:

1. **Mengikis Oligarki:** Mengurangi pengaruh modal dan elit di balik politik melalui reformasi pendanaan partai dan penegakan hukum yang kuat.
2. **Memperkuat Institusi:** Memastikan independensi institusi kunci, terutama KPK, MK, dan lembaga penegak hukum, dari intervensi politik.
3. **Mengelola Pluralisme:** Menjaga toleransi dan kohesi sosial di tengah maraknya politik identitas, serta memastikan hak-hak kelompok minoritas terlindungi.
4. **Literasi Digital dan Disinformasi:** Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk melawan penyebaran hoaks, tanpa membatasi kebebasan berekspresi.

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur demokrasi. Namun, tantangan yang tersisa adalah mengubah infrastruktur ini menjadi sistem politik yang lebih egaliter, akuntabel, dan beretika. Konsolidasi demokrasi yang sebenarnya harus melampaui prosedur elektoral dan menjangkau substansi tata kelola yang bersih dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A. (2024). *Oligarki dan politik uang dalam pemilu serentak Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Antara, D. S. (2023). Dinamika bikameralisme semu: Peran DPR dan DPD pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, *12*(4), 401–425.

Aspinall, E., & Tomsa, D. (Eds.). (2020). *The state of play: Politics and society in contemporary Indonesia*. Monash University Publishing.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik demokrasi Indonesia*. BPS Press.

Case, W. (2024). *The contested consolidation of democracy in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

Crouch, H. (2021). *The army and politics in Indonesia* (New ed.). Equinox Publishing.

Fadilah, N. (2025). *Desentralisasi dan munculnya dinasti politik lokal*. Pustaka Reformasi.

Ghazali, M. (2021). Tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia: Dari prosedur ke substansi. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, *11*(3), 280–305.

Hadiz, V. R. (2023). *Indonesia's democratic paradox: Oligarchy, civil society, and the challenge of governance*. Cornell University Press.

Hadi, S. (2023). Peran militer dalam politik sipil pasca-reformasi: Studi kasus keterlibatan non-pertahanan. *Jurnal Keamanan Nasional*, *8*(1), 1–20.

Kusuma, B. (2020). *Otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan lokal*. Media Pressindo.

Lubis, T. H. (2024). *Politik identitas dan polarisasi elektoral di Indonesia*. Kompas Penerbit Buku.

Mietzner, M. (2022). *Money, power, and political change in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

Muzadi, A. H. (2025). The judicialization of politics in Indonesia: The role and challenges of the Constitutional Court. *Asian Journal of Political Science*, *33*(1), 1–20.

Pramono, A. (2023). *Koalisi pragmatis dan fragmentasi sistem kepartaian Indonesia*. Pustaka Digital Indonesia.

Ramadhan, T. (2021). Independensi KPK versus intervensi politik: Analisis revisi undang-undang. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, *6*(2), 150–175.

Setiawan, R. (2022). Peran media sosial dalam mobilisasi politik dan penyebaran disinformasi. *Jurnal Komunikasi Politik*, *7*(1), 1–25.

Slater, D. (2020). *Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

Sorensen, T. J. (2021). Clientelism, patronage, and the failure of party institutionalization in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, *43*(2), 200–225.

Sunstein, C. R. (2024). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Utomo, Y. (2020). *Politik luar negeri bebas aktif di tengah rivalitas kekuatan global*. Penerbit Lintas Batas.

Van Klinken, G., & Aspinall, E. (2023). *Oligarchs and strongmen: The new dynamics of regime change*. Cornell University Press.

PROFIL PENULIS



Alfian Muhazir, S.Sos., M.A. merupakan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S.Sos.) di bidang Ilmu Komunikasi dan meraih gelar Magister Arts (M.A.) dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain aktif sebagai dosen di UNISA Yogyakarta, ia juga terlibat sebagai dosen tamu di Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Bidang kepakaran yang ditekuni meliputi komunikasi politik, media dan jurnalisme, etika komunikasi, public relations, komunikasi digital, serta literasi media. Aktivitas akademiknya berfokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penelitian, ia menaruh perhatian pada isu-isu komunikasi politik, transformasi media digital, representasi politik, komunikasi publik, serta pengembangan model komunikasi berbasis masyarakat.

Sebagai akademisi, Alfian Muhazir aktif mengembangkan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), menyusun bahan ajar, serta menghasilkan publikasi ilmiah dan karya akademik yang berorientasi pada penguatan kualitas pendidikan tinggi. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan mutu perguruan tinggi, termasuk Audit Mutu Internal (AMI), pendampingan penelitian, serta pembinaan mahasiswa melalui kegiatan

akademik maupun pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatannya sebagai dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) turut mendukung implementasi pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di bidang keilmuan, Alfian Muhazir kerap menjadi narasumber dan memberikan pandangan akademik mengenai komunikasi politik, etika komunikasi, dan jurnalisme di era digital. Ia meyakini bahwa komunikasi yang berlandaskan etika, data, dan kepentingan publik merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kritis, demokratis, dan berdaya saing di tengah perkembangan teknologi informasi.

Ke depan, fokus pengembangan akademiknya diarahkan pada penguatan riset di bidang komunikasi politik, media digital, dan kebijakan komunikasi, dengan tujuan menghasilkan inovasi penelitian yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu komunikasi, kebijakan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.